



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
( RPJMD )**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN  
2018 - 2023

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5

tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
12. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
16. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
  17. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM);
  21. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  25. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  26. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
  28. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
  29. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
37. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi

antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

**a. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN**

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

**b. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur**

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

**c. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi

Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

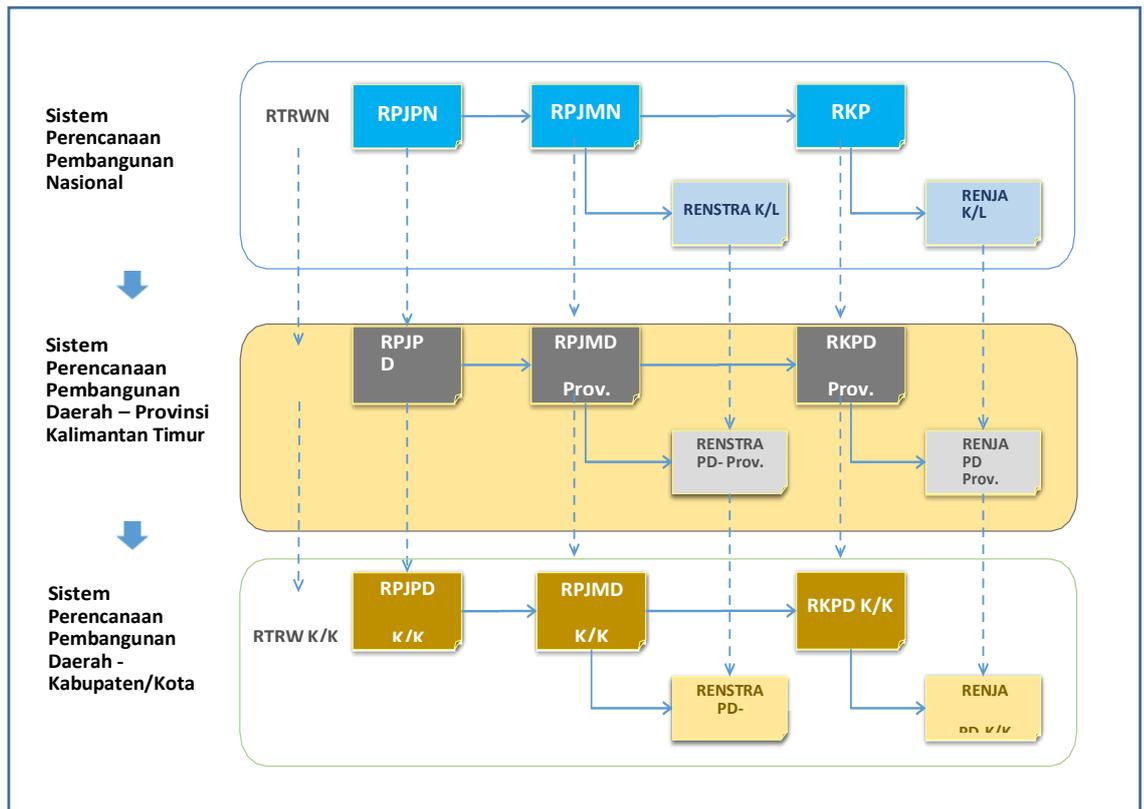
**d. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota**

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dan atau perubahan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota. Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

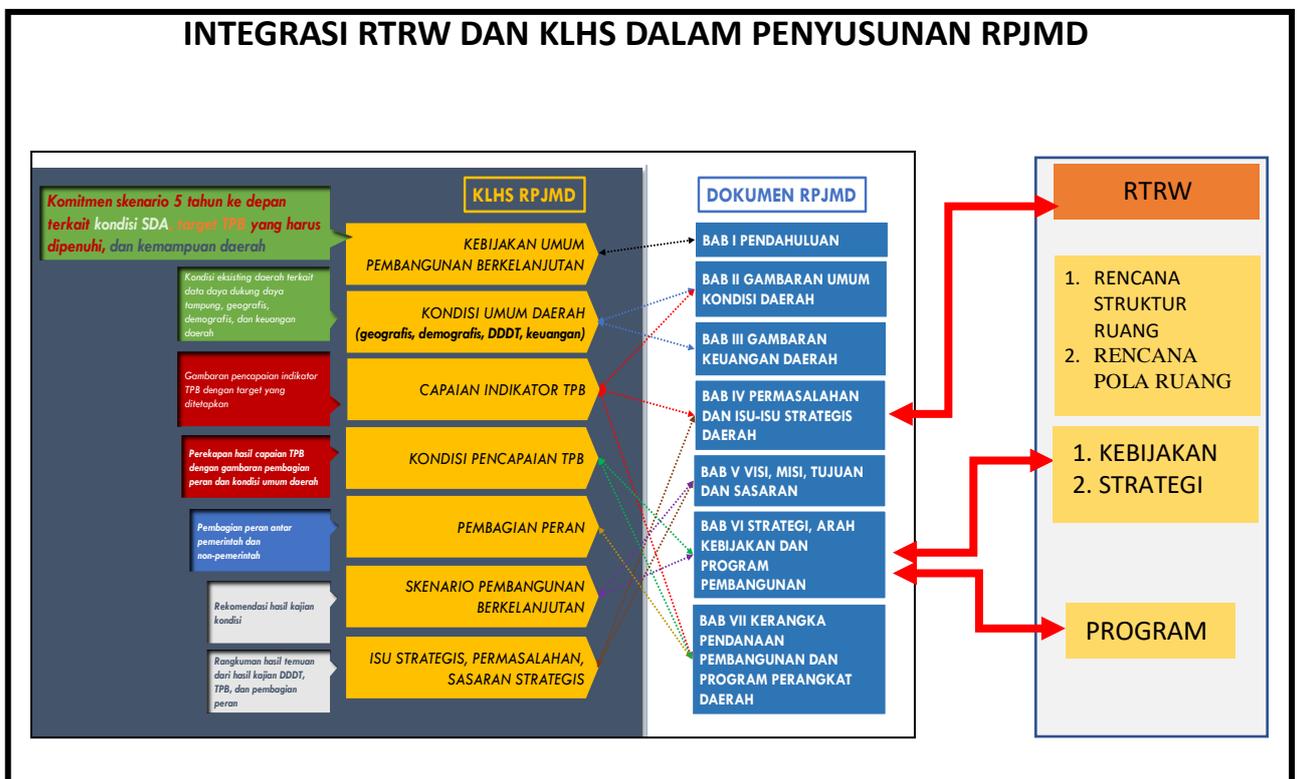
**Gambar 1.1**  
**Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. RPJMD, RTRWP dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) yang terdiri dari empat pilar yaitu; mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalisasikan visi dan misi kepala

daerah selama 5 tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program prioritas pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang memuat sub-bab mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menyajikan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Menyajikan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Memuat uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati, dan penjelasan keterkaitan antar elemen-elemen perencanaan tersebut.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, penjelasan hubungan setiap strategi dengan serangkaian arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap melalui program prioritas yang terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat uraian program prioritas beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

#### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat uraian mengenai gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

#### **BAB IX PENUTUP**

Memuat penjelasan dukungan yang diperlukan untuk menyempurnakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran permasalahan/ tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

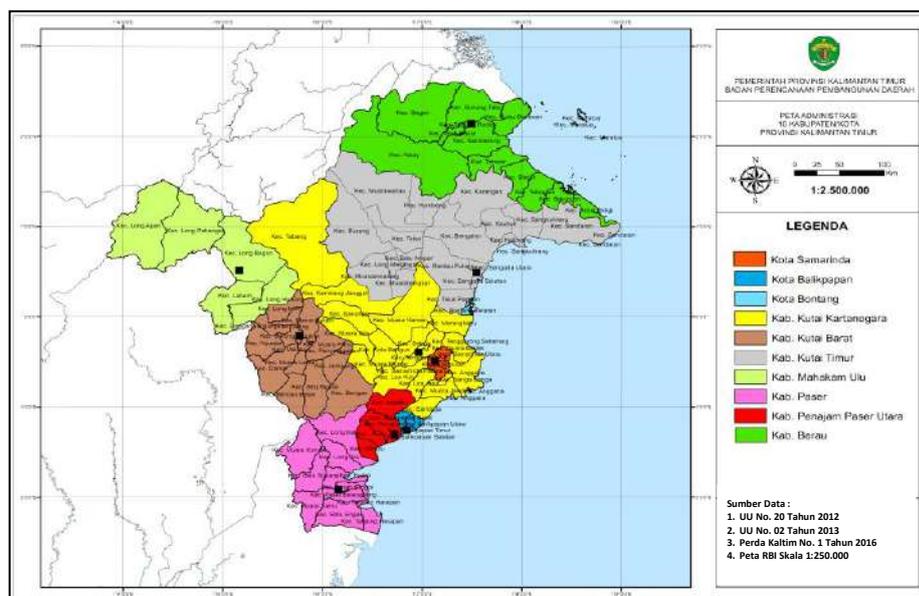
#### 2.1.1 Aspek Geografi

##### a. Kondisi Geografi

##### 1. Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara  $113^{\circ}35'31''$ - $119^{\circ}12'48''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ}34'23''$  Lintang Utara -  $2^{\circ}44'17''$  Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 16.732.065 ha terdiri dari daratan seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dan perairan laut seluas .....Ha 9 (...%). Secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu : Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Gambar 2. 1.  
Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, 2016)

Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur memiliki potensi dalam perdagangan internasional berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

### Peta ALKI II

## 2. Kondisi Fisik Wilayah

Karakteristik topografi wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 15 persen. Kondisi demikian mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan kegiatan budidaya. Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500 mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

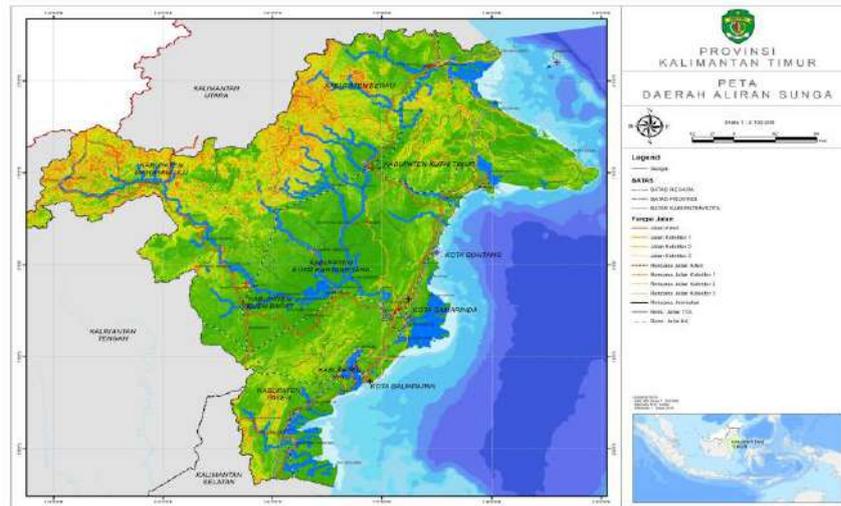
Jenis tanah di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah . Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran, dan hutan.

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km<sup>2</sup>. Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha. Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang. Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu **SWS Mahakam** (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; **SWS Berau-Kelay** (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; **SWS Karang** (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karang, Sangata, Bengalon, dan Santan.

Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dengan suhu udara berkisar dari 20,8°C sampai dengan 35,6°C, dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang

seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 83-87 persen dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3-4 knot .

**Gambar 2. 2.**  
**Peta topografi dan Daerah Aliran sungai Kalimantan Timur**



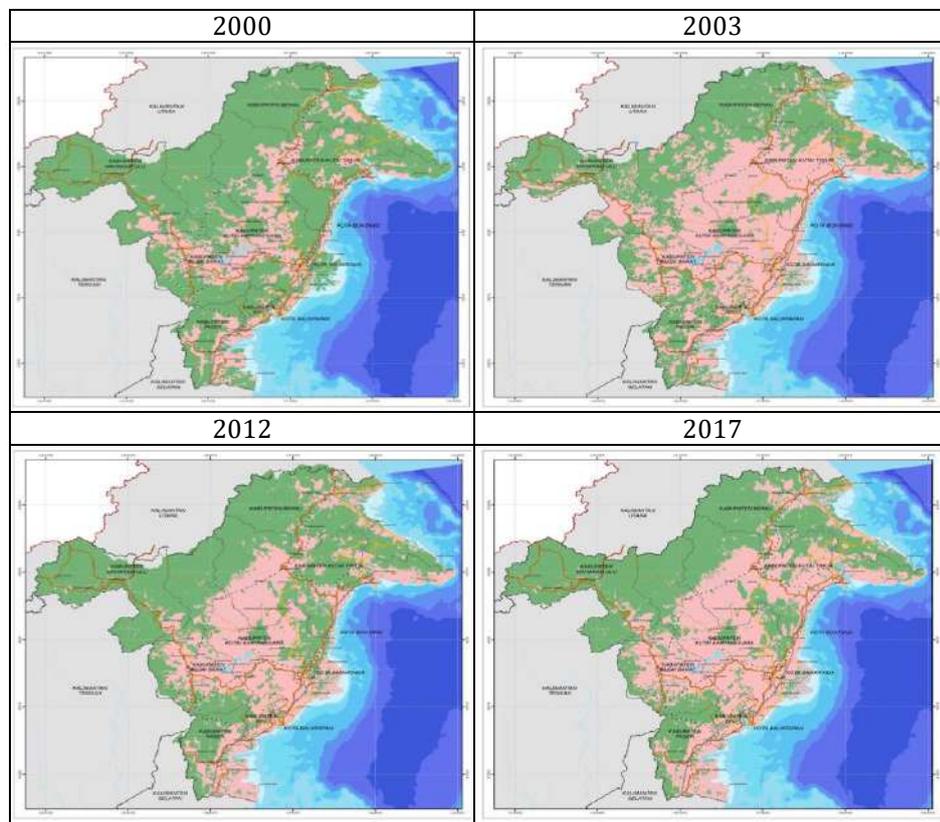
Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

### 3. Kondisi Tutupan Lahan

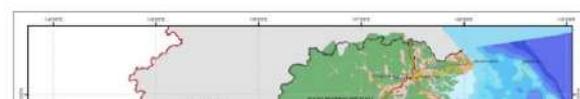
Kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 (diolah berdasarkan data citra satelit) telah terjadi deforestasi yang sangat luas hingga mencapai lebih dari 176 ribu Ha per tahun. Deforestasi menjadi salah satu isu degradasi lingkungan di Kalimantan Timur. Kondisi tutupan hutan di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, dimana luas tutupan hutan di tahun 2000 adalah seluas ± 9,28 Juta Hektare, kemudian turun di tahun 2003 menjadi ± 7,21 Juta Hektare. Selanjutnya di tahun 2012 tutupan hutan di Kalimantan Timur kembali turun menjadi seluas ± 7,19 Juta Hektare, dan terus menurun menjadi seluas ± 6,28 Juta Hektare di tahun 2017. Wilayah yang paling luas deforestasinya sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2017 adalah di Kabupaten Kutai Timur (± 911 ribu Ha) dan Kutai Kartanegara (± 797 ribu Ha).

Saat ini kondisi tutupan lahan didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 2,17 Juta Ha, Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luasan 3,89 Juta Ha dan Semak Belukar dengan luasan 2,71 Juta Ha, yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, dan Kabupaten Paser. Kondisi lahan terbuka untuk kegiatan pertambangan seluas 130.789 Ha, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur. Sementara untuk tutupan lahan yang telah ditanami komoditi perkebunan teridentifikasi seluas 1,33 Juta Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk kelas tutupan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran hanya seluas 494.293 Ha.

**Gambar 2. ....  
Peta Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur 2000-2017**

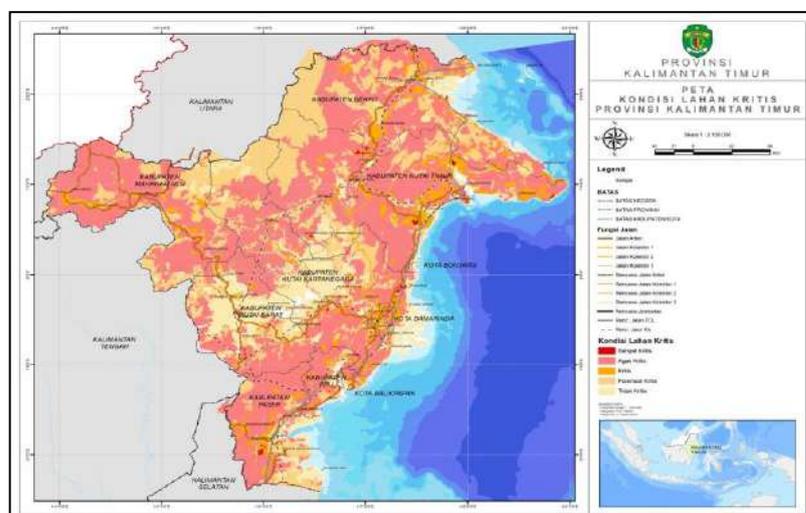


Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim



Ketersediaan sumber daya lahan yang produktif menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan komoditas pertanian di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki lahan dengan kategori Kritis seluas ± 820 ribu Ha (6,50 %), lahan kategori Agak Kritis seluas 6,95 Juta Ha (55,15 %), kategori lahan Potensial Kritis seluas ± 3,1 Juta Ha (25,18 %). Sementara itu lahan dengan kategori Sangat Kritis di Kalimantan Timur seluas ± 36.500 Ha (0,29 %), sedangkan lahan yang masuk kategori Tidak Kritis adalah seluas ±1,62 Juta Ha (12,88 %). Lahan kategori Sangat Kritis tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dan areal yang paling luas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Berau, dan Kabupaten Paser.

**Gambar 2.....  
Peta Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur 2017**



Sumber : Pusat Pengelolaan Informasi Geospasial (P2-IIG) Universitas Mulawarman

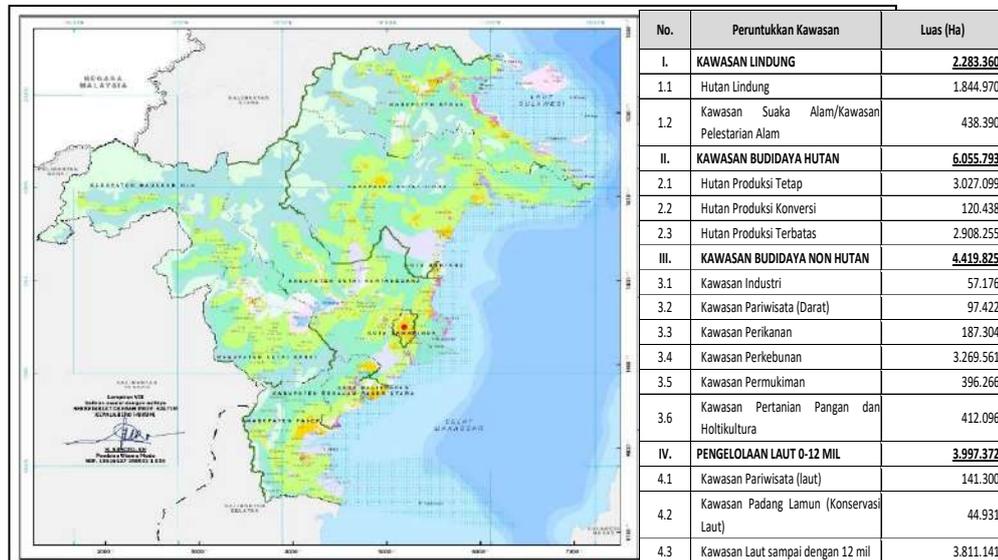
## **b. Potensi Pengembangan Wilayah**

### **1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi**

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Kawasan non

hutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan holtikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**Gambar 2. 2**  
**Peta Rencana Pola Ruang dalam RTRWP Kaltim 2016-2036**



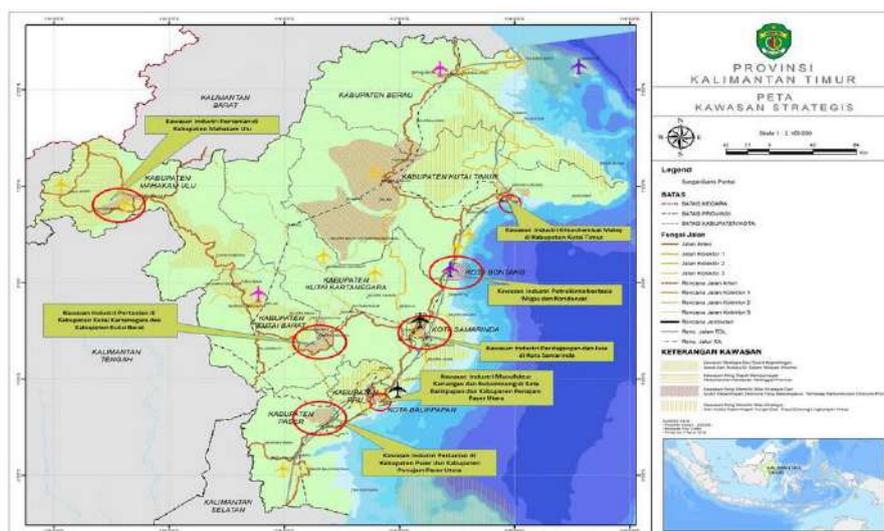
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Disamping itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 telah dikembangkan struktur ruang yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
  - Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
  - Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan

- Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- 2) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.
  - 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:
    - Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
    - Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
    - Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
  - 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
    - Kawasan Delta Mahakam;
    - Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
    - Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
    - Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

**Gambar 2. ....**  
**Peta Struktur Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Kaltim 2016-2036**



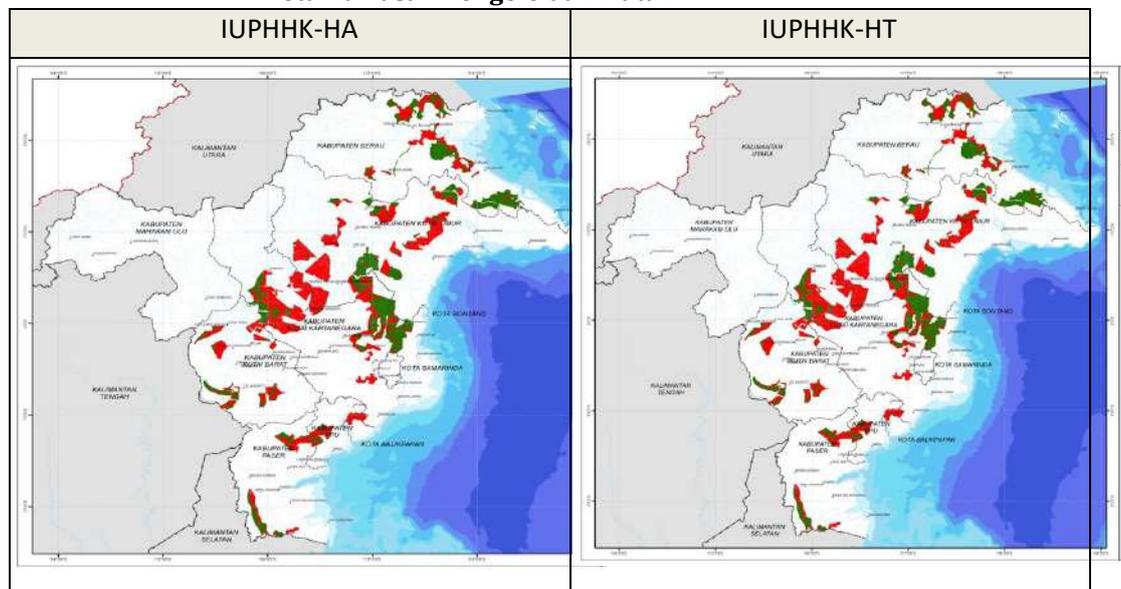
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036,  
 Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

## 2. Potensi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas ± 5,6 Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas ± 4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ± 2,4 Juta Ha. Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

**Gambar 2.....**  
**Peta Kawasan Pengelolaan Hutan**



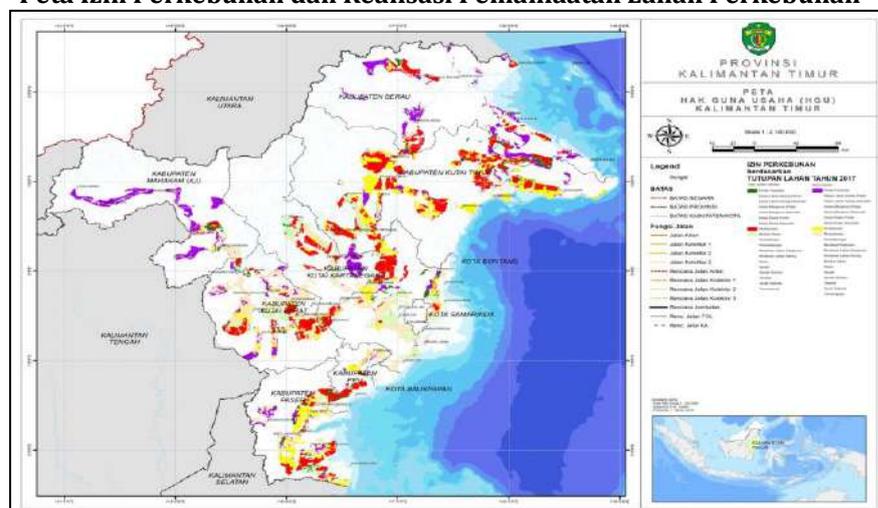
Sumber : Dinas Kehutanan Prov.Kaltim

Total luas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan Timur adalah ± 3,79 Juta Ha, dimana seluas ± 2,9 Juta Ha kondisinya masih berupa hutan (hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa primer dan sekunder) dan masih memiliki potensi kayu alam, sedangkan seluas ± 892 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan dan tidak memiliki potensi kayu alam (berupa belukar rawa, semak belukar, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, dan lain-lain).

Sementara total luasan untuk IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kalimantan Timur adalah seluas ± 1,57 juta Ha, dimana seluas ± 638 ribu Ha kondisi tutupan lahannya masih berupa hutan, sedangkan seluas ± 940 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan. IUPHHK-HA paling luas berada di Kabupaten Berau seluas ± 848 ribu Ha, sedangkan IUPHHK-HT paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 508 ribu Ha.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas ± 2,76 Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar ± 1,32 Juta Ha atau 48% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada ± 52 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

**Gambar 2.....  
Peta Izin Perkebunan dan Realisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan**

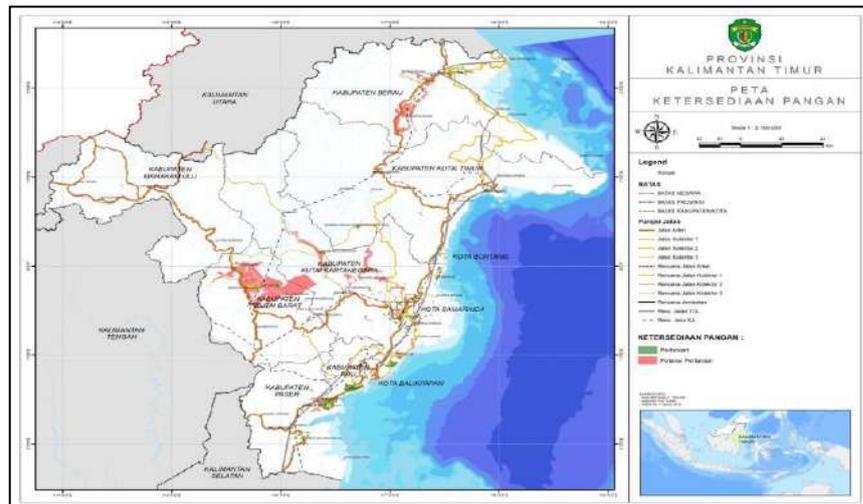


Sumber : BPN Kanwil Kalimantan Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2018 terdapat ± 2,76 Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas ± 1,02 Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah di identifikasi melalui citra satelit, baru ± 650 Ribu Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya dibawah HGU, luasan yang teridentifikasi adalah ± 1,74 Juta Ha, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ± 461 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

Upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 412.016 Ha, namun hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ± 42.546 Ha atau 10,3 % yang kondisi eksistingnya berupa sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran. Masih terdapat lahan seluas ± 369.470 Ha yang belum dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Areal ini selanjutnya menjadi lahan potensial untuk dikembangkan sesuai dengan arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Oleh karena itu, dibutuhkan insentif program/kegiatan agar potensi ruang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Gambar 2.....  
Peta Ketersediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan**

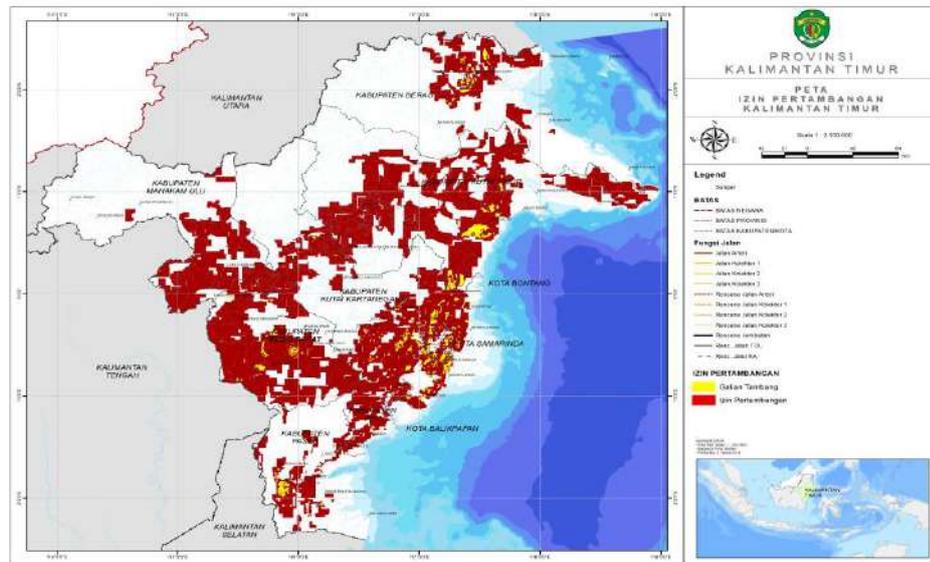


*Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim*

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan khususnya batubara, menjadi sektor ekonomi utama pembentuk struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Luas izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur yang memiliki status CnC (clean and clear) mencapai  $\pm 4,6$  Juta Ha. Luas izin usaha pertambangan (IUP) terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur seluas  $\pm 1,4$  Juta Ha, selanjutnya di Kabupaten Kutai Barat seluas  $\pm 957$  ribu Ha dan Kutai Kartanegara seluas  $\pm 937$  ribu Ha. Luasan IUP ini letaknya tersebar baik di dalam kawasan hutan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, maupun yang berada di areal peruntukan lain. Kawasan pertambangan ini masih menyisakan persoalan semakin meluasnya lubang bekas galian tambang. Dari hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2017, diketahui bahwa bukaan lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur telah mencapai  $\pm 130$  ribu Ha atau hanya 2,7 % dari total luas IUP yang diberikan.

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor potensial yang akan dikembangkan untuk mempercepat upaya transformasi ekonomi daerah, terlebih dengan adanya keunggulan komparatif berupa luasnya wilayah kewenangan wilayah laut dan pesisir sejauh 0 sampai dengan 12 mil dengan luas  $\pm 4$  Juta Ha.

**Gambar 2.....  
Peta Kawasan Pertambangan Migas dan Batu Bara**

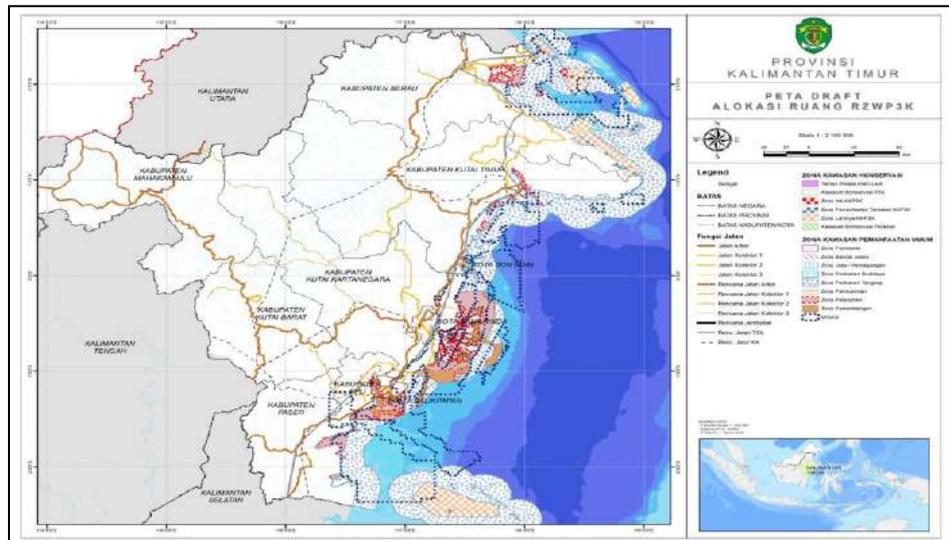


Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

Wilayah pesisir laut Kaltim sepanjang 1.583 km telah direncanakan alokasi ruang untuk perikanan tangkap pelagis seluas  $\pm 1,5$  Juta Ha, ikan pelagis dan demersal seluas  $\pm 605$  ribu Ha, ikan demersal seluas  $\pm 8$  ribu Ha, dan untuk budidaya laut seluas  $\pm 13$  ribu Ha. Sedangkan untuk wisata alam bawah laut dan pantai pesisir tersedia alokasi ruang seluas  $\pm 3$  ribu Ha. Disamping itu, Kalimantan Timur memiliki Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yakni Pulau Maratua dan sekitarnya, wilayah tersebut sebagian besar telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi laut oleh pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan kebijakan daerah yang menetapkan Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Disamping perikanan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam mendukung upaya transformasi ekonomi. Kalimantan Timur memiliki 406 titik obyek wisata alam dan budaya potensial yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

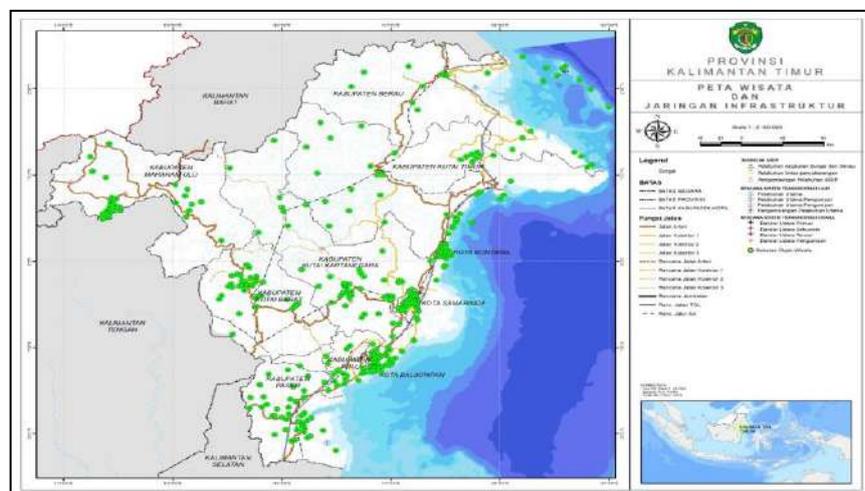
**Gambar 2.....**  
**Peta Kawasan Potensi Perikanan Kaltim**



Sumber : RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur , Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Titik obyek wisata terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 76 obyek wisata (18,72 %), Kota Samarinda dan Paser yang masing-masing memiliki 51 obyek wisata. Sedangkan Kabupaten Berau yang terkenal dengan wisata alam Kepulauan Derawan, memiliki 35 obyek wisata. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki titik obyek wisata paling sedikit yaitu 18 obyek wisata (4,43 %). Sebagian besar obyek wisata tersebut belum dikelola secara optimal.

**Gambar 2.....**  
**Peta Kawasan Potensi Obyek Pariwisata**



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

### c. Wilayah Rawan Bencana

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan dan banjir, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi:

- **Gempa Bumi**

Daerah rawan gempa bumi terdapat di Kabupaten Paser.

- **Banjir**

Daerah rawan banjir terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan kawasan yang sering dilanda banjir adalah kawasan perkotaan dan pemukiman di Bontang, Samarinda dan Balikpapan. Di wilayah Kalimantan Timur terdapat ± 2,9 Juta Ha (23,18 %) yang merupakan wilayah rawan banjir dengan kriteria rawan tinggi seluas 350.460 Ha (2,78 %) dan kategori rawan seluas 2.575.933 Ha (20,40 %). Wilayah lainnya merupakan wilayah dengan kategori kurang rawan seluas 8.611.705 Ha (68,21 %) dan tidak rawan seluas 1.087.525 Ha (8,61%). Wilayah yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi bencana banjir yang sangat luas terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kabupaten Paser, dimana sebagian besar morfologi wilayah dimaksud merupakan daerah dataran rendah, rawa, daerah yang dekat dengan danau-danau alam dan muara-muara sungai.

- **Tanah Longsor**

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Bontang dan Samarinda.

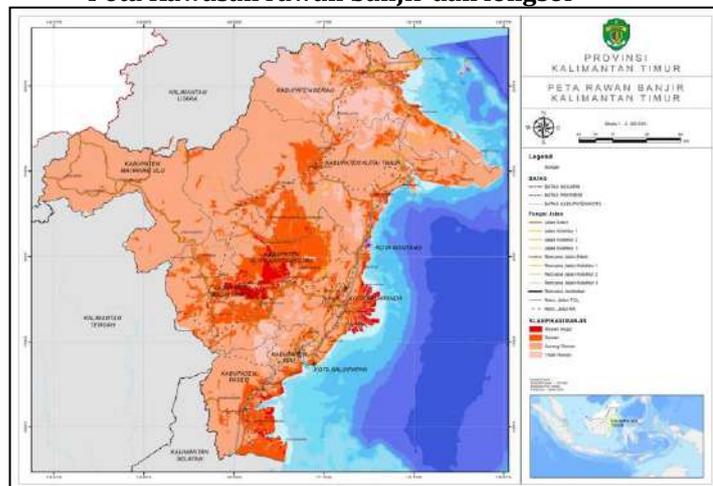
- **Tsunami**

Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah

dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

**Peta Jalur ring of fire Indonesia**  
**Peta Kawasan rawan kebakaran hutan**

**Gambar 2.....**  
**Peta Kawasan rawan banjir dan longsor**



*Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim*

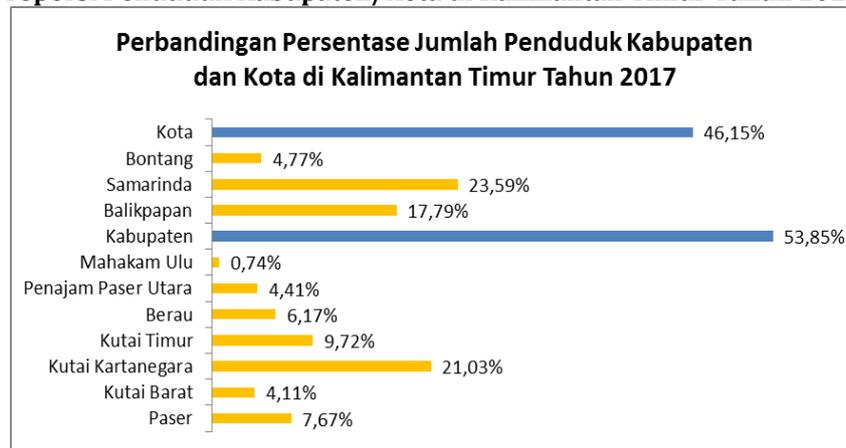
### 2.1.2 Aspek Demografi

Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.505.161 jiwa yang tersebar 53,85 % di 7 kabupaten dan 46,15 di 3 kota, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun dan kepadatan rendah 27,26 jiwa per Km<sup>2</sup>. Ketimpangan Distribusi penduduk yang tidak merata ini memiliki konsekuensi kebutuhan biaya infrastruktur yang sangat besar untuk meningkatkan akses pelayanan. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pemerataan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Kaltim didominasi oleh kelompok usia 5-39 tahun dengan proporsi masing-masing sekitar 8-9 persen sedangkan penduduk di atas usia 70 tahun menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah kurang dari 1 persen. Struktur penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim memiliki proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa

dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki.

**Gambar 2. ....**  
**Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran permasalahan/ tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi Ekonomi, sosial, kemasyarakatan saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan indikator kesejahteraan lainnya.

Perekonomian Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan sumber daya alam tak terbarui cukup tinggi, sehingga analisis pada PDRB baik secara total (dengan migas+batubara) maupun partial tanpa adanya migas maupun batubara (non migas dan non batubara) akan memberikan gambaran lebih proporsional jika dihubungkan dengan analisis mikro kesejahteraan masyarakat. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara masih memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur.

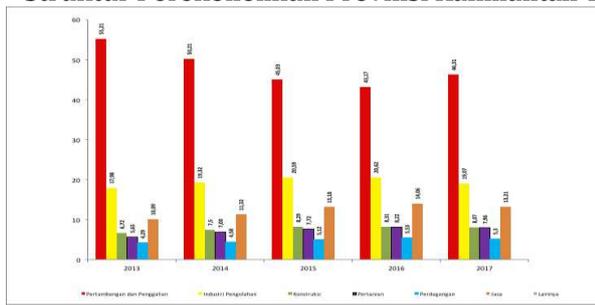
**Tabel 2.....**  
**Capaian Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Timur 2013-2017**

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,38	3,13	II.8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	%	5,99	5,87	3,60	1,57	5,24	II.8
3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	II.10
4	PDRB per kapita	Juta Rp	158,47	157,40	147,41	145,40	165,71	II.8
5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	II.10
6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		II.10
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,6	41,06		II.10
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,57	0,53	0,48	0,49	0,51	II.10
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			1,71	1,2	0,36	3,13	II.8
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,65	7,00	7,72	8,22	7,96	II.8
10	Produksi sektor pertanian	ton	76,653	84,516	76,100	89,083	105,669	II.8
11	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,59	3,75	3,98	4,43	4,49	II.8
12	Produksi sektor perkebunan	ton	6,988,344	9,717,275	10,902,358	11,499,164	13,249,959	II.8
13	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15	II.8
14	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,21	50,21	45,03	43,17	46,31	II.8
15	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,73	0,86	0,95	0,93	II.8
16	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46	II.8
17	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,12	5,53	5,30	II.8
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,98	19,32	20,59	20,62	19,07	II.8

*Sumber : BPS Kaltim*

Besarnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDB Nasional tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba dan CPO Sawit di pasar internasional. Pada saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen. Seiring membaiknya harga komoditas minerba dan CPO Sawit, perekonomian Kaltim mulai merangkak naik di tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen, dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten/Kota, hanya Mahakam Ulu, Balikpapan dan Samarinda yang mengalami pertumbuhan ekonomi relatif stabil.

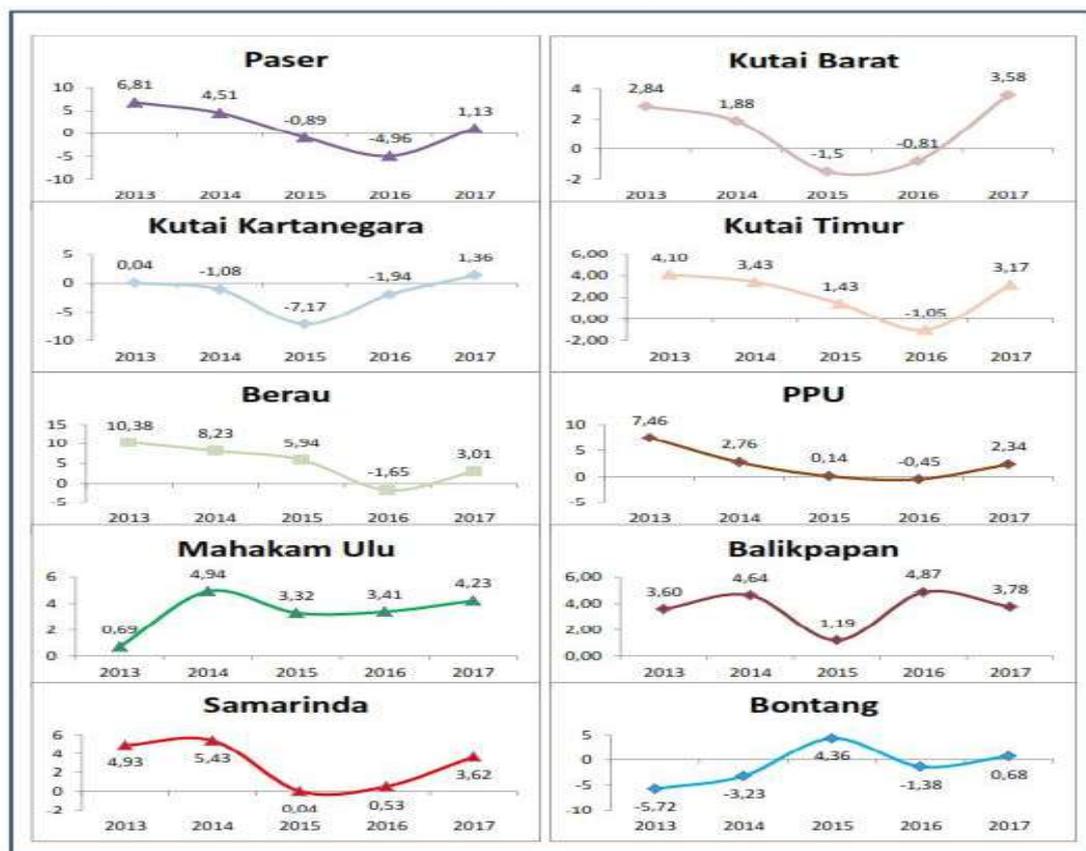
**Gambar 2.....  
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)**



Grafik nilai pdrb

Sumber : BPS Prov. Kaltim

**Gambar 2. ....  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (persen) Tahun 2013-2017**



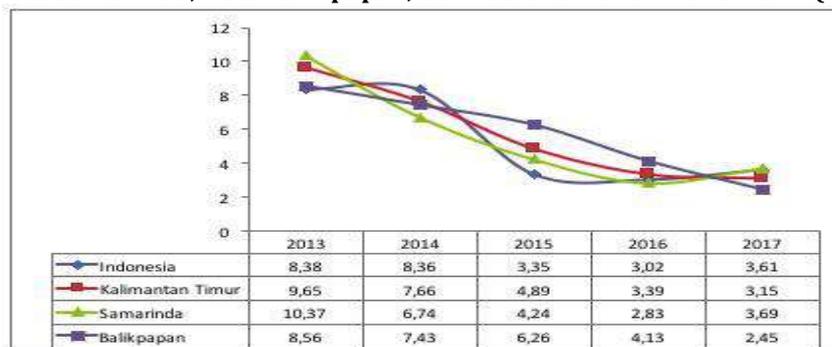
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lapangan usaha konstruksi dan pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat perannya terhadap PDRB Kalimantan Timur, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian cenderung menurun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi ekonomi Kaltim ke arah sumber

daya alam terbarukan (*renewable resources*) sudah berjalan. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) menjadi harapan dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi Kaltim kedepan. Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif dan terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil yaitu 5,30 persen.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Laju inflasi pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,02 %.

**Gambar 2. 1**  
**Laju Inflasi Kalimantan Timur,**  
**Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)**

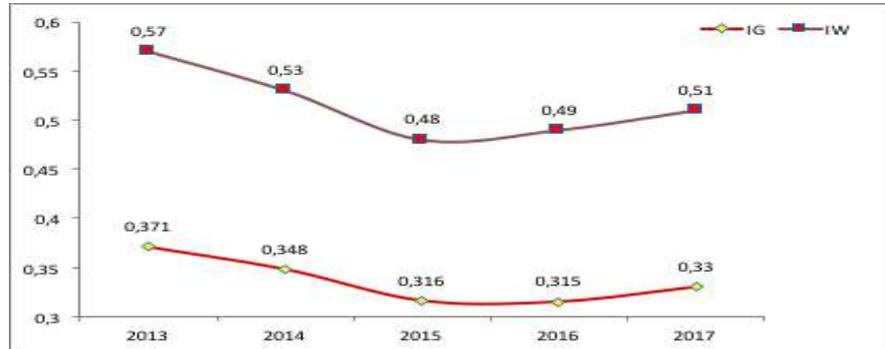


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Indeks Gini Kaltim selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,330. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Williamson selama 2013-2017 juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan ketimpangan menjadi sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kaltim masih relatif tinggi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan

mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut.

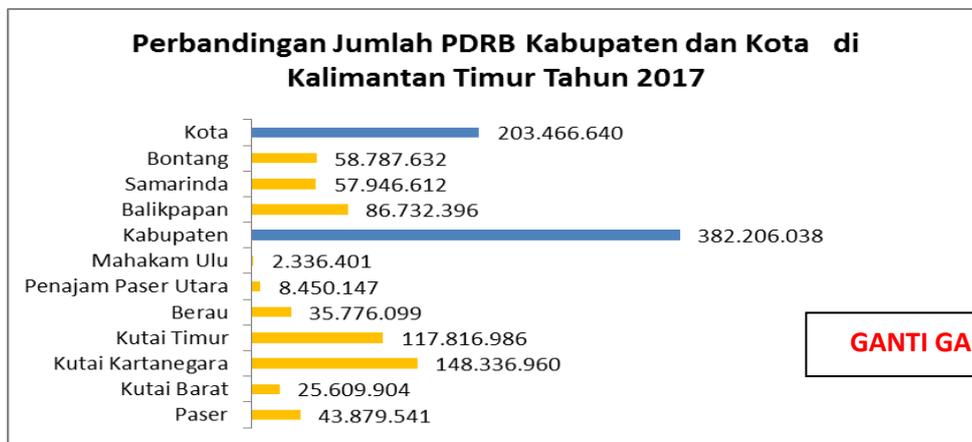
**Gambar 2. ....**  
**Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh 2 (dua) kabupaten yaitu Kutai Timur (Rp. 117.816.986.000.000) dan Kutai Kartanegara (Rp. 148.336.960.000.000), sedangkan besar PDRB kabupaten/kota lainnya tidak sampai 50% dari nilai PDRB kedua kabupaten tersebut. Hanya Kota Balikpapan yang berada di urutan ketiga dengan nilai Rp. 86.732.396.000.000.

**Gambar 2. ....**  
**PDRB Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur Tahun 2017**



sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

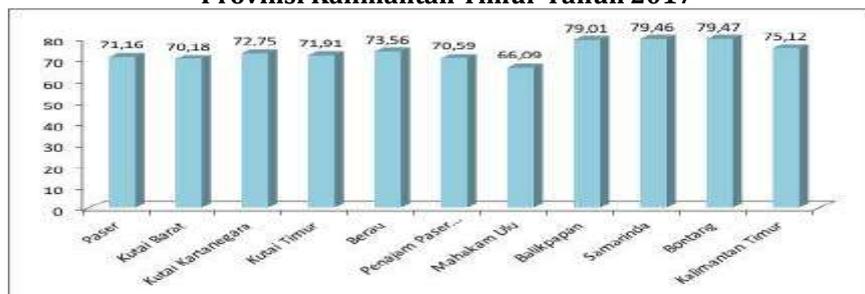
## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan adanya ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota, tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan selama periode 2013-2017, sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan IPM Nasional.

**Gambar 2. ....**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi secara nasional**

Jika dilihat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, ketujuh kabupaten memiliki nilai IPM dibawah IPM Provinsi. Hanya wilayah kota yang memiliki nilai IPM di atas IPM Provinsi. Pemerataan pembangunan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup di wilayah kabupaten perlu ditingkatkan terutama pada daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

**Gambar 2. ....**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

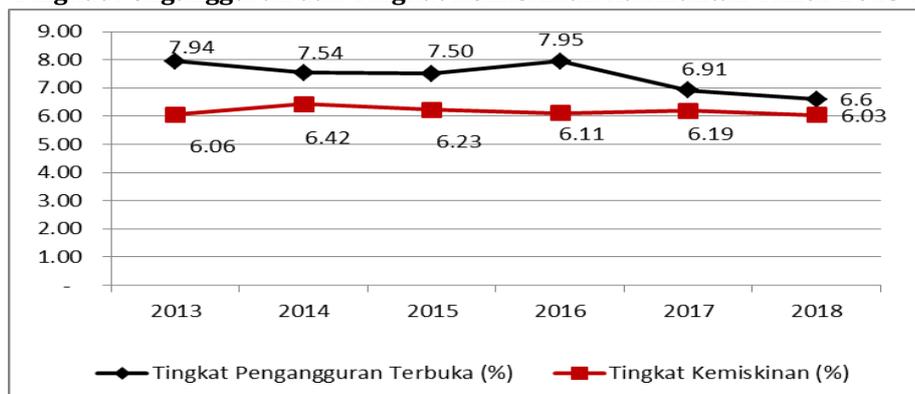
**Tabel 2.....**  
**Capaian Kesejahteraan Sosial Kalimantan Timur 2013-2017**

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		II.10
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,6	41,06		II.10
2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,94	93,58	93,77	93,89	93,09	I.1
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,06	6,42	6,23	6,11	6,19	I.1
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	I.1
5	Indeks Desa Membangun (Permendes 2/2016)				0,525	0,525	0,525	II.10
6	Angka Melek Huruf	%	97,95	98,59	98,69	98,81	98,96	I.4
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	11	9,24	I.4
8	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	I.3
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,9	3,7	3,7	0,1		I.3
10	Prevalensi balita gizi kurang		17,1	17,3	19,1	19,8		I.3
11	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	70	63,98	78	79		I.3
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	II.8
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,94	7,54	7,5	7,95	6,91	II.8
14	Rasio penduduk yang bekerja		102,09	102,21	57,71	62,4	59,35	II.8
15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22,81	24,02	65,35	64,44	60,86	I.1
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92,53	97,75	97,74	97,26	98,16	I.2

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur*

Pada aspek kesejahteraan masyarakat lainnya, Kaltim masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Selama periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Timur berfluktuasi dan cenderung meningkat walaupun disisi lain tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Kondisi tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh migrasi penduduk miskin dari luar daerah yang menambah jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur.

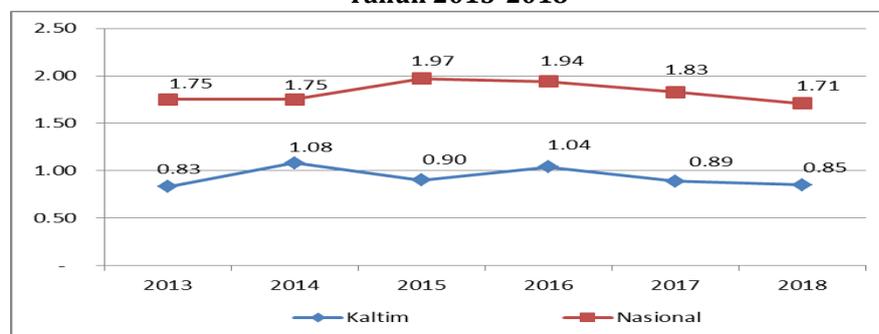
**Gambar 2. ....**  
**Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur 2013-2017**



*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur*

Angka kemiskinan terkait dengan pengeluaran, sementara pengeluaran masyarakat terkait dengan pendapatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Kaltim sangat fluktuatif dan selalu berada di bawah nasional, serta cenderung menurun menunjukkan bahwa semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Strategi penurunan kemiskinan di beberapa daerah dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengembangan ekonomi Kaltim kedepan harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

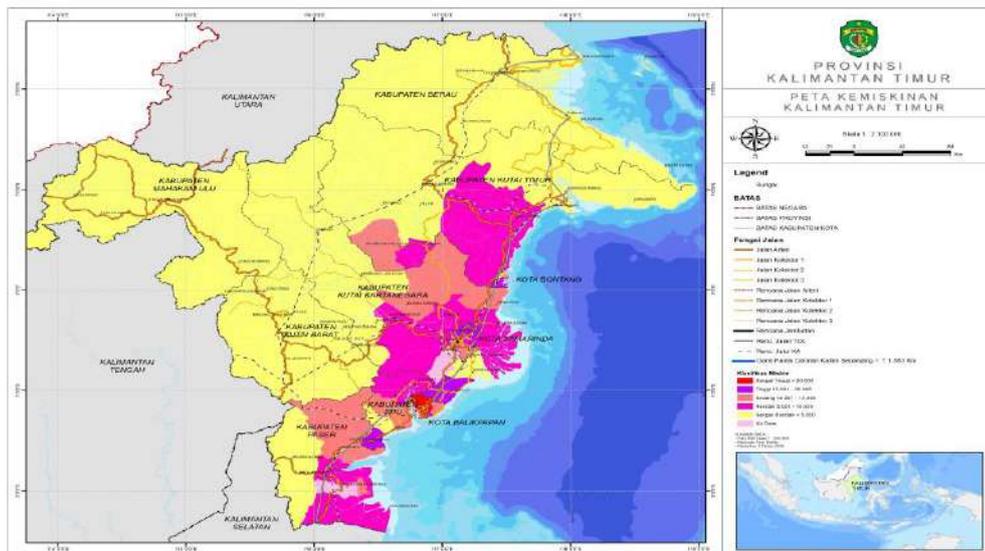
**Grafik 2. ....**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional**  
**Tahun 2013-2018**



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Timur sebagian besar berada di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Diperlukan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin pada daerah-daerah ini.

**Gambar 2. ....**  
**Peta Sebaran Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2017**



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

**Gambar 2. ....**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017**



Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K

Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur diharapkan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat yang berada di desa-desa sekitarnya. Namun sampai saat ini sebagian penduduk belum mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut, masih terdapat banyak penduduk miskin di sekitar kawasan lindung dan kawasan konsesi hutan produksi, pertambangan, dan perkebunan sejumlah 341.114 jiwa atau 53% dari total 643.743 jiwa penduduk miskin di Kalimantan Timur.

Kabupaten Paser memiliki jumlah desa terbanyak (22 desa) yang berada pada kawasan Hutan Lindung, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 16.865 jiwa. Di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk miskin 30.309 jiwa pada Kawasan Hutan Produksi dan pada kawasan Perkebunan sebanyak 62.815 jiwa.

**Tabel 2. ....**  
**Jumlah Desa dan Penduduk Miskin dalam Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam**  
**Kalimantan Timur Tahun 2017**

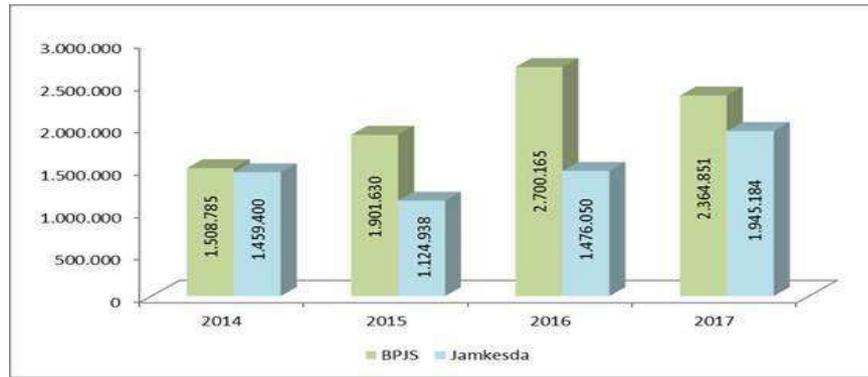
No	Kota/Kabupaten	Kawasan						Total	
		Hutan Lindung		Hutan Produksi		Perkebunan		Jumlah Desa	Penduduk Miskin
		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin		
1	Balikpapan	2	10.706					2	10.706
2	Berau	9	839	46	12.051	30	9.210	85	22.100
3	Bontang	1	1.870			1	2.464	2	4.334
4	Kutai Barat	4	691	21	4.640	81	14.198	106	19.529
5	Kutai Kartanegara	11	9.549	57	30.309	120	62.815	188	102.673
6	Kutai Timur	11	13.816	41	22.460	76	37.520	128	73.796
7	Mahakam Ulu	14	2.362	20	3.614	16	3.206	50	9.182
8	Paser	22	16.865	23	7.896	69	34.198	114	58.959
9	Penajam Paser Utara	4	5.020	10	6.368	15	12.591	29	23.979
10	Samarinda	7	15.856					7	15.856
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>77.574</b>	<b>218</b>	<b>87.338</b>	<b>408</b>	<b>176.202</b>	<b>711</b>	<b>341.114</b>

**TABEL INI TAMBAHKAN MISKIN DI KAWASAN PERTAMBANGAN**

Terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat, Kaltim memiliki tingkat literasi masyarakat yang sangat baik dengan angka melek huruf di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin dan telah melampaui capaian provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Selain Harapan Lama Sekolah (HLS) indikator penting untuk melihat keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan RLS Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena hanya naik sebesar 0,49 tahun. Jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia sekolah di Kaltim rata-rata pada jenjang pendidikan SMP.

Disamping pendidikan, kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, perkembangan rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan secara perlahan. Dalam kurun waktu lima tahun UHH Provinsi Kalimantan Timur telah meningkat dari 73,32 tahun di tahun 2012 menjadi 73,70 tahun di tahun 2017. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat dapat terlihat melalui jumlah kepesertaan jaminan kesehatan baik melalui Jamkesda (untuk penduduk miskin) dan BPJS (berbayar) di Provinsi Kalimantan Timur.

**Gambar 2. 2**  
**Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2014-2017**



*Sumber : SIDATA, Bappeda Provinsi Kaltim*

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang seni budaya dan keolahragaan juga menjadi aspek penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya keolahragaan di Kalimantan Timur dapat dilihat dari capaian prestasi olahraga Kaltim dalam kejuaraan tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016 dimana Kaltim menempati posisi ke lima dari 34 provinsi. Peringkat Kaltim di PON 2016 tidak jauh berbeda dengan PON 2012 di Bengkulu yang juga menempati posisi kelima. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keolahragaan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kaltim. Selain itu, capaian prestasi olahraga tersebut juga ditopang oleh adanya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai.

Secara umum, jenis olahraga yang paling populer adalah olahraga terukur seperti lari, renang, angkat besi, lompat tinggi, dan sebagainya. Olahraga ini paling banyak memiliki klub olahraga dan atlet dengan jumlah sarana dan prasarana sekitar 24 buah. Sedangkan olahraga lain yang juga populer di Kalimantan Timur adalah olahraga beladiri seperti taekwondo, silat, dan lain-lain dengan jumlah atlet profesional lebih dari 260 orang dan terdapat 11 klub. Di samping itu, olahraga lain seperti permainan dan olahraga beregu juga tetap menjadi minat yang populer.

Aktifitas seni dan budaya di Kalimantan Timur meliputi grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater

masih belum berkembang optimal. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar-sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih belum aktif. Disamping itu, event seni budaya Kalimantan Timur hanya diselenggarakan setahun sekali diantaranya Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Budaya Dayak Kenyah.

Kinerja pembangunan pemuda di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu satu tahun 2015-2016 mampu meningkatkan capaian IPP nya dari sebesar 50,83 menjadi 56,33 dan berhasil menempati posisi ketiga secara nasional dibawah DI Jogjakarta dan Bali. Dimana peningkatan angka indeks ini dominan dipengaruhi oleh perbaikan kinerja pemuda dari sisi lapangan dan kesempatan kerja. Indikator pendukung pemuda wirausaha (*white collar*) dan tingkat pengangguran menunjukkan kinerja yang baik.

## **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**

#### **1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **a. Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur pada usia pendidikan dasar dan lanjutan memiliki capaian yang cukup baik. Namun Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan pada partisipasi pendidikan di tingkat sekolah menengah atas terutama jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata belum mencapai 90 persen dan angka putus sekolah yang tinggi yaitu rata-rata 21,09 % setiap tahun.

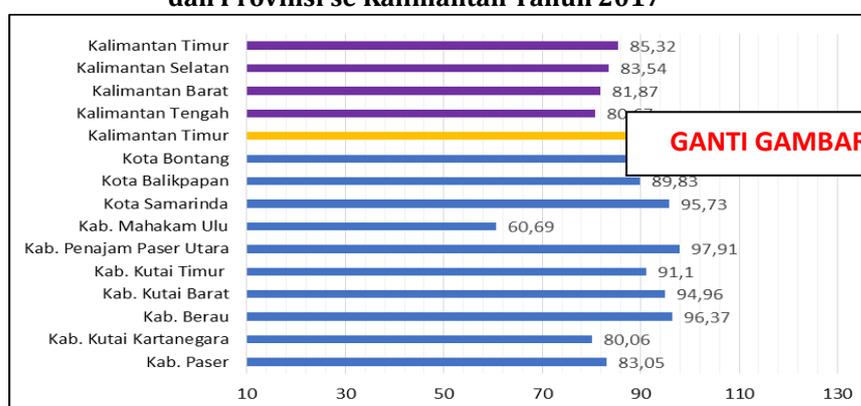
**Tabel 2.....**  
**Capaian Kinerja Pendidikan Kalimantan Timur 2013-2018**

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.85	13.17	13.18	13.35	13.49	I.4
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	11	9,24	I.4
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	APK PAUD	%	43.97	48.66	49.01	51.41	53.16	I.4
	APK SD/MI	%	107.57	111.04	112.61	113.76	108,07	I.4
	APK SMP/MTs	%	91.06	91.49	97.9	97.78	91,46	I.4
	APK SMA/SMK/ MA	%	82.21	85.54	90.31	87.93	99,51	I.4
4	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	APM SD/ MI	%	95.91	96.7	97	97.13	97.43	I.4
	APM SMP/MTs	%	76.1	78.73	79.06	79.2	79.58	I.4
	APM SMA/SMK/MA	%	62.22	67.03	67.78	67.92	68.23	I.4
5	Angka Partisipasi Sekolah							
	- 7-12 tahun	%	99.46	99.33	99.63	99.54	99,67	I.4
	- 13-15 tahun	%	96.62	97.99	97.92	98.18	98.79	I.4
	- 16-18 tahun	%	73.1	80.5	80.68	80.81	81.32	I.4
6	Rasio murid terhadap sekolah							
	- SD Negeri	%	215.24	220.19	220.43	220.36	217,02	I.4
	- SD Swasta	%	248.83	260.04	256.08	254.08	265,50	I.4
	- MI	%	124.89	165.96	183.24	201.42	202,72	I.4
	- SMP Negeri	%	285.97	299.71	303.78	298.05	296,15	I.4
	- SMP Swasta	%	148.51	155.96	157.32	154.89	162,41	I.4
	- MTs	%	153.11	164.54	155.98	185	178,07	I.4
	- SMA Negeri	%	371.26	370.11	395.19	399.5	454,84	I.4
	- SMA Swasta	%	112.76	111.29	120.87	121.01	145,07	I.4
	- MA	%	120.18	121.6	123.92	134.35	149,36	I.4
	- SMK	%	264.04	291.87	332.01	327.75	358,07	I.4
7	Rasio murid terhadap guru							
	- SD Negeri	%	14	16.48	16.46	16.42	17,56	I.4
	- SD Swasta	%	14	15.95	16.19	16.11	18,52	I.4
	- MI	%	14	12.33	10.96	15.91	16,29	I.4
	- SMP Negeri	%	13	15.6	16.51	16.22	16,99	I.4
	- SMP Swasta	%	11	11.23	13.7	13.42	15,59	I.4
	- MTs	%	11	9.63	10.18	12.2	13,85	I.4
	- SMA Negeri	%	14	13.95	14.99	15.08	17,49	I.4
	- SMA Swasta	%	8	7.38	10.72	10.71	14,58	I.4
	- MA	%	8	6.69	7.27	9.24	11,58	I.4
	- SMK	%	12	11.21	16.36	14.22	15,21	I.4
8	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0.17	0.15	0	0	0,13	I.4
	- SMP/MTs	%	2.89	1.77	1.74	1.82	1,21	I.4
	- SMA/SMK/MA	%	26.71	19.4	19.27	19	18,68	I.4
9	Angka Kelulusan							
	- SD/MI	%	100	100	100	100	100	I.4
	- SMP/MTs	%	99.72	100	100	99.99	99,9	I.4
	- SMA/SMK/MA	%	99.63	99.96	100	99.93	99,98	I.4
10	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	2,408	1,960	1,954	1,948	1,978	I.4
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	1,384	1,175	1,233	1,211	1,250	I.4
11	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.							
	- Laki-laki	%	98,30	98,30	98,69	98,82	98,96	I.4
	- Perempuan	%			98,12	98,25	98,36	I.4
12	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	*	65.3	65.3	65		I.4

Sumber : SIDATA, Bappeda Prov. Kaltim

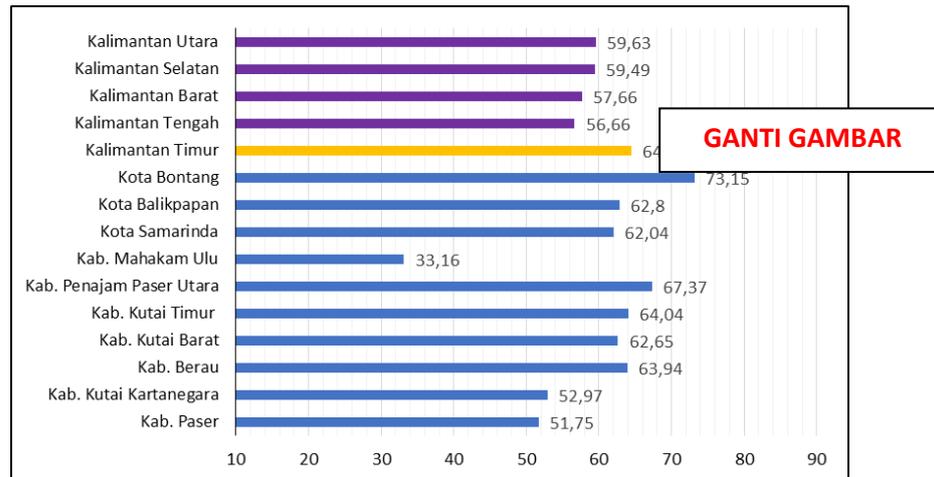
Secara umum capaian APK Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan 9,56 persen dalam kurun waktu lima tahun, demikian pula capaian APM Kaltim meningkat sebesar 6,29 persen. Meskipun capaian APK dan APM Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, tetapi terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara APK dan APM yaitu sebesar 25,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan SMA tidak diikuti dengan kesesuaian umur peserta didik dengan golongan umur yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peserta didik di SMA/SMK/MA yang tinggal kelas atau mengulang atau juga disebabkan oleh adanya umur peserta didik lebih muda daripada golongan umur yang seharusnya masuk jenjang SMA. Demikian pula capaian APK dan APM di Kabupaten/Kota mencerminkan disparitas kualitas pendidikan di Kaltim. Daerah yang harus menjadi prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Kutai Barat karena nilai APK dan APM dan pertumbuhannya selalu menjadi yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

**Gambar 2. 3**  
**Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi se Kalimantan Tahun 2017**



Sumber: Kemdikbud 2013-2018

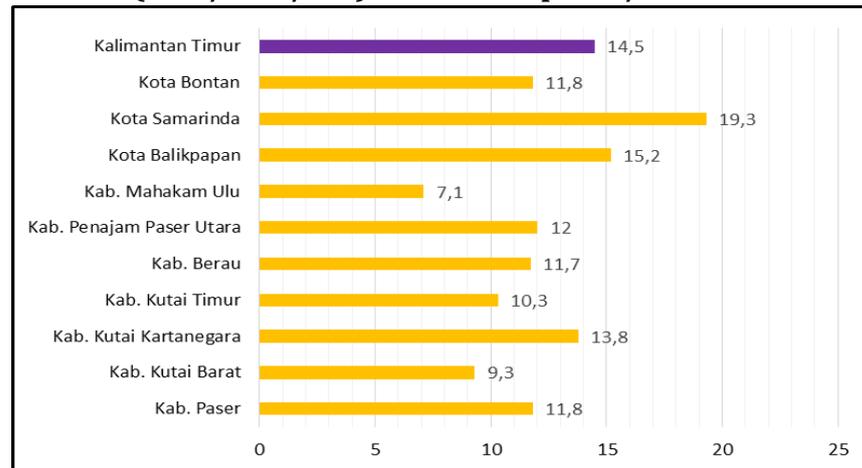
**Gambar 2. 4**  
**Perbandingan APM tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan**  
**Timur dengan Provinsi Sekitar, Tahun 2017**



*Sumber: Data APK APM Kemdikbud 2013-2018, diolah*

Disamping itu, disparitas pelayanan pendidikan dapat juga dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketercukupan tenaga pengajar. Kalimantan Timur memiliki tenaga pengajar yang terbatas di tingkat sekolah menengah atas, dimana rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK di Kalimantan Timur adalah 14,5 yang bermakna bahwa satu orang guru mengajar sebanyak kurang lebih 14-15 siswa. Terdapat beberapa daerah dengan rasio guru-murid yang kecil seperti di Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Kutai Timur. Di sisi lain, juga terdapat daerah dengan rasio guru-murid sangat tinggi seperti di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi guru-murid lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota.

**Gambar 2. 5**  
**Perbandingan Rasio Guru-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) antar Kabupaten/Kota**

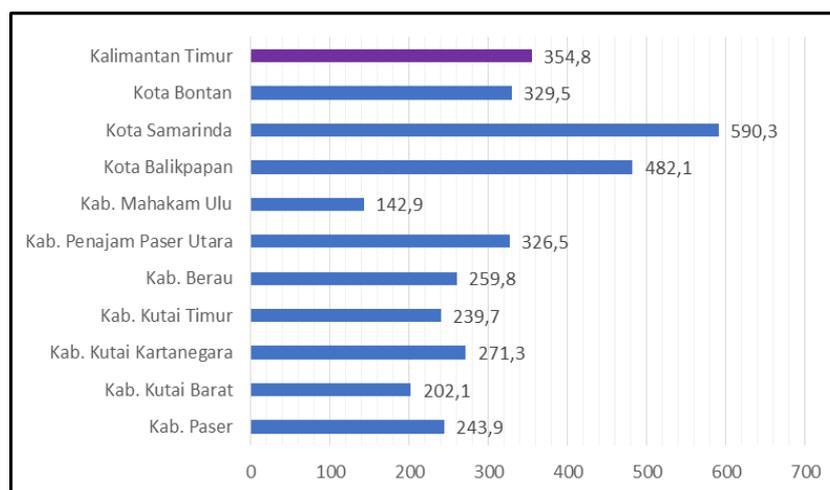


*Sumber: Kaltim Dalam Angka 2017*

Di samping rasio guru-murid, indikator lain yang juga menjadi indikasi penyebab disparitas pelayanan pendidikan adalah rasio sekolah-murid. Berdasarkan pada tabel di atas, rasio murid-sekolah di Kaltim sebesar 354,8 yang artinya setiap satu sekolah rata-rata memiliki 354 siswa. Namun demikian, data tersebut belum menggambarkan daya tampung sekolah secara lebih rinci karena diperlukan data-data terkait jumlah ruang kelas per sekolah untuk mengukur rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang belajar.

Selain itu, data rasio siswa dan jumlah sekolah juga dapat dilihat berdasarkan perbandingannya di tiap kabupaten/kota. Data tersebut dapat dilihat seperti pada diagram berikut:

**Gambar 2. 6**  
**Perbandingan Rasio Sekolah-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Antar Kabupaten/Kota**



*Sumber: Kaltim Dalam Angka 2017*

Data tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ketimpangan dalam hal daya tampung sekolah di Kalimantan Timur. Sebagian daerah terutama wilayah perkotaan yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda rasio sekolah-murid sangat tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa satu sekolah rata-rata memiliki jumlah siswa 500 orang. Sebaliknya, di beberapa daerah terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser perbandingan sekolah-siswa terlihat lebih kecil. Oleh karena itu, ketimpangan ketersediaan prasarana pendidikan ini menjadi poin penting dalam merumuskan peta persoalan di bab IV.

## **b. Kesehatan**

Kesehatan merupakan aspek krusial dalam menentukan derajat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi penentu penting bagi produktivitas suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan bidang kesehatan perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Salah satunya adalah Angka Kesakitan, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu, Proporsi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih.

**Tabel 2. 1**  
**Angka Kesakitan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
----	------------	------	------	------	------	------

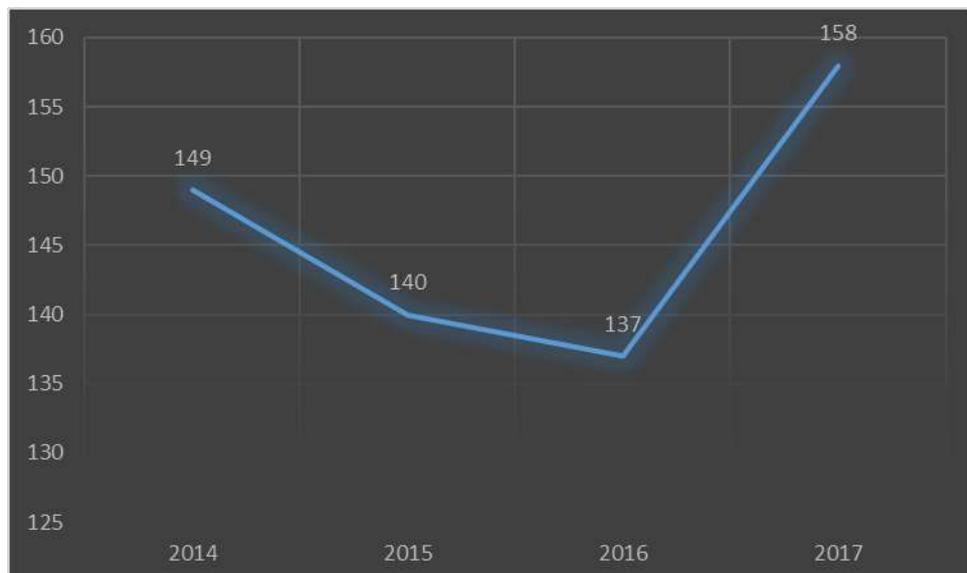
1.	Angka Kesakitan	11,74	9,18	9,18	11,9	11,9
----	-----------------	-------	------	------	------	------

Sumber : Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Prov. Kaltim

Angka kesakitan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) tidak menunjukkan banyak perubahan. Hal ini tidak bisa menjadi ukuran secara riil mengenai derajat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Namun setidaknya bisa menggambarkan bahwa kesehatan masyarakat di Kaltim berada dalam posisi yang baik karena capaian ini lebih rendah dari daerah lainnya.

Secara umum, perkembangan jumlah kematian ibu di Provinsi Kalimantan Timur fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Penyumbang terbesar kematian ibu di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Kartanegara selama empat tahun terakhir. Sedangkan, penyumbang terkecil kematian ibu di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut mengindikasikan relatif tingginya resiko kematian ibu saat mengandung maupun melahirkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan jumlah kematian ibu tersebut berpengaruh terhadap perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) rata-rata di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun perkembangan AKI Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 7**  
**Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017**



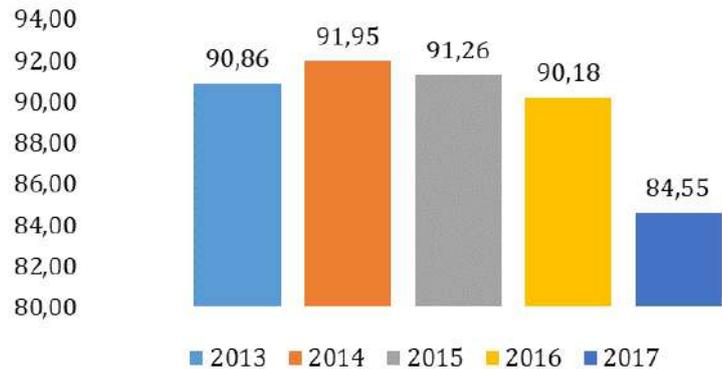
Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kelahiran hidup di masing-masing kabupaten/kota tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup. Sehingga, Angka Kematian Ibu (AKI) tersebut merupakan jumlah seluruh kematian di seluruh kabupaten/kota dibandingkan dengan jumlah seluruh kelahiran hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, capaian AKI rata-rata Provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang memburuk. Setelah sempat turun dari tahun 2014 ke tahun 2015, AKI di Provinsi Kalimantan Timur justru meningkat sebesar 13% dari 137 pada tahun 2016 menjadi 158 pada tahun 2017. Kondisi tersebut mengindikasikan memburuknya kualitas kesehatan ibu yang disebabkan oleh berbagai persoalan mendasar kesehatan ibu. Persoalan mendasar kesehatan ibu tersebut meliputi rendahnya pelayanan dan upaya kesehatan saat hamil serta belum optimalnya upaya peningkatan keselamatan persalinan. Optimalisasi upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan melahirkan ibu di beberapa daerah dengan jumlah kematian ibu yang kecil mungkin tidak dapat diikuti oleh daerah-daerah dengan sumber daya terbatas. Hal tersebut karena peningkatan kesehatan dan keselamatan melahirkan ibu membutuhkan fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan yang terbatas. Ketersediaan fasilitas dan berbagai jenis pelayanan kesehatan dan keselamatan melahirkan tersebut tentu membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit sementara daerah kabupaten/kota memiliki kemampuan sumber daya yang sangat berbeda.

Dalam konteks ini, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dijadikan proksi indikator untuk mengetahui penyebab kematian ibu. Apabila cakupan persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan meningkat, maka diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

### **Gambar 2. 8**

### Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id)

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai angka 91,95. Kondisi tersebut menggambarkan belum optimalnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Persoalan tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kurangnya tenaga kebidanan dan masih adanya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang lebih mempercayai dukun paraji dalam pertolongan persalinan.

#### 1) Penanggulangan Penyakit

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu kategori penyakit TB adalah hasil uji pemeriksaan dahak (BTA). Persentase penemuan kasus BTA merupakan angka yang menggambarkan mutu dari proses penemuan dan diagnosis terhadap pasien TB. Sementara itu, penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan upaya pemerintah mengatasi terjadinya kasus TBC. Semakin tinggi jumlah kasus TBC BTA ditemukan di suatu daerah, maka kondisi tersebut berdampak pada turunnya derajat kesehatan masyarakat.

Secara umum, temuan kasus baru TB BTA+ di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, temuan kasus TB BTA+ baru di Kalimantan Timur meningkat sebesar 34,92 % yaitu sebanyak 1.953

kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.635 kasus pada akhir tahun 2017. Kota Samarinda dan Kota Balikpapan merupakan penyumbang terbesar kasus TB BTA+ Baru selama kurun waktu empat tahun terakhir. Selain itu, dari tahun ke tahun temuan kasus TB BTA+ baru di dominasi oleh kasus yang ditemukan pada penduduk laki-laki. Kondisi tersebut mengindikasikan upaya penanggulangan penyakit yang diselenggarakan oleh pemerintah belum optimal atau justru memburuk karena temuan kasus semakin meningkat.

Meningkatnya jumlah temuan kasus TB BTA+ Baru berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan kasus TB BTA+ baru di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah keseluruhan kasus TB BTA+ menunjukkan besaran penderita penyakit TB di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Besaran tersebut juga mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat serta resiko gangguan kesehatan masyarakat.

Secara umum, jumlah seluruh kasus TB BTA+ di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah keseluruhan kasus TB BTA+ meningkat sebesar 69,44% dari 3.372 kasus pada tahun 2014 menjadi 5.838 kasus pada akhir tahun 2017. Penyumbang terbesar jumlah kasus TB BTA+ selama empat tahun adalah Kota Balikpapan dan Samarinda. Hal tersebut mengindikasikan tingginya resiko penyebaran TB BTA+ di dua wilayah tersebut sekaligus menunjukkan belum optimalnya upaya penanggulangan penyakit menular secara umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan khususnya di Kota Balikpapan serta Samarinda.

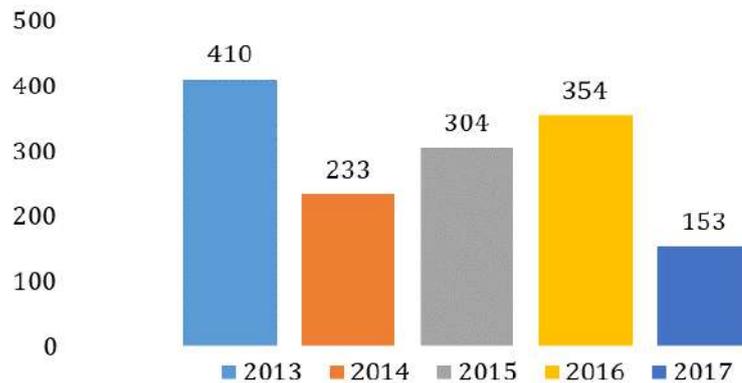
Secara umum, temuan kasus TB pada anak usia 0-14 mengalami tren yang sama dengan temuan kasus TB BTA+ pada penduduk dewasa yaitu, mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu empat tahun temuan kasus TB pada anak usia 0-14 tahun mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 78,70%. Meskipun proporsi anak yang terjangkit TB fluktuatif dan cenderung menurun namun

permasalahan ini tetap menunjukkan rendahnya kualitas kesehatan anak. Sejalan dengan temuan kasus pada orang dewasa, Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang merupakan kontributor terbesar dalam temuan kasus TB pada anak usia 0-14 tahun. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya resiko penularan TB diantara penduduk dewasa maupun anak-anak.

## 2) Gizi Buruk

Perkembangan jumlah penemuan kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 9**  
**Jumlah Penderita Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*

Perkembangan jumlah penderita gizi buruk di Provinsi Kalimantan timur mengalami tren fluktuatif. Penderita gizi buruk berkurang 63 persen dalam periode 2013-2017. Namun, jumlah kasus balita gizi buruk masih tergolong tinggi. Kasus gizi buruk di Provinsi Kalimantan timur disebabkan oleh rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi yang baik bagi anak-anak.

Permasalahan kualitas kesehatan dapat dipengaruhi oleh akses kesehatan. Pada konteks Provinsi Kalimantan Timur, dimensi akses kesehatan dapat ditinjau dari beberapa indikator, yaitu ketersediaan tenaga kesehatan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan bayi, persentase lamanya menyusui, persentase penduduk berobat jalan, Desa/Kelurahan

*Universal Child Immunization*, Rumah Tangga ber-PHBS, Jaminan kepteraan masyarakat melalui BPJS, dan sarana prasarana kesehatan.

### **3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan**

Ketersediaan dan kecukupan tenaga dokter dapat digambarkan melalui rasio penduduk dibanding dokter. Secara umum, rasio dokter umum -penduduk di Provinsi Kalimantan Timur melebihi rasio ideal yaitu 1 : 2.500. Namun demikian, ketersediaan dokter spesialis di Kalimantan Timur sudah sesuai dengan rasio ideal yaitu tidak lebih dari 1: 16.000. Selanjutnya, rasio ketersediaan perawat cukup ideal karena tidak melebihi rasio idealnya sebesar 1 : 855. Namun, berdasarkan data diatas ketersediaan bidan masih kurang karena rasio penduduk-bidan di Provinsi Kalimantan Timur melebihi 1 : 1.000. Pada konteks ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami masih terbatasnya jumlah bidan. Kekurangan tenaga bidan tersebut tereksplisit pada masih belum adanya tenaga bidan di beberapa kabupaten seperti Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang. Kondisi ini memberikan gambaran penyebab indikatif tingginya AKI, AKB, dan AKBa di daerah-daerah seperti Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi serta penataan ruang.

#### **1) Jalan dan Jembatan**

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan dan kualitas. Dalam konteks ini, kedua aspek

tersebut belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan belum mampu menjangkau seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Selain itu, kualitas jaringan jalan terbangun belum optimal yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan.

**Tabel 2. 2**  
**Panjang Jalan (Km) Menurut Kewenangan di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	428.45	27.29	387.6	24.69	380.21	24.22	373.81	23.81
2016	149.97	9.55	720.54	45.89	500.52	31.88	269.04	17.14
2015	452.98	28.85	329.52	20.99	251.39	16.01	536.68	35.83
2014	456.86	29.1	339.57	21.63	359.21	22.88	414.43	26.4
2013	440.48	28.05	334.85	21.33	249.75	15.91	544.99	34.71

*Sumber: Diolah dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan KDA, 2017*

Sebagian besar infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur berstatus jalan kabupaten/kota. Pada tahun 2017, sebesar 81,8% dari total panjang jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, proporsi panjang jalan nasional dan jalan provinsi pada tahun yang sama masing-masing sebesar 11,9% dan 8,5%.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terindikasi bahwa upaya peningkatan ketersediaan jalan provinsi masih belum memadai. Panjang jalan yang berada dalam kewenangan provinsi mengalami stagnasi pada angka 1.570,07 km pada periode 2013-2017. Capaian tersebut belum mampu menghubungkan 8 Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No 1 tahun 2016) secara baik. Saat ini, belum semua pusat produksi, kawasan industri, dan outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan.

Persoalan lain yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan jalan adalah belum optimalnya keterhubungan jalan antar kabupaten. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut

disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan distribusi alat berat menjadi lebih mahal.

**Tabel 2. 3**  
**Panjang Jalan (Km) Provinsi Menurut Kondisi**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	428.45	27.29	387.60	24.69	380.21	24.22	373.81	23.81
2016	149.97	9.55	720.54	45.89	500.52	31.88	269.04	17.14
2015	452.98	28.85	329.52	20.99	251.39	16.01	536.68	35.83
2014	456.86	29.10	339.57	21.63	359.21	22.88	414.43	26.40
2013	440.48	28.05	334.85	21.33	249.75	15.91	544.99	34.71

*Sumber: Diolah dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Kualitas jalan provinsi belum terlalu baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 hanya 27,29%. Kondisi jalan pada tahun yang sama didominasi oleh jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang mencapai 48,03%. Tingginya kerusakan jalan provinsi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksesuaian konstruksi jalan dengan standar kenyamanan, belum optimalnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi serta tingginya pelanggaran batas muatan kendaraan.

Persoalan lain mempengaruhi ketidakefektifan kualitas jaringan jalan adalah minimnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan terbangun. Hal ini dapat dilihat dari panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang hanya menurun 11,3% pada periode 2013-2017. Selain itu, kerusakan jalan juga disebabkan oleh tingginya pelanggaran batas muatan pada ruas-ruas tertentu.

Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, masing-masing mencapai 135,22 km dan 112 km pada tahun 2017. Angka tersebut mengindikasikan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak berat di kedua wilayah mencapai 36% dan 30% secara berurutan terhadap total panjang jalan provinsi dalam kondisi yang sama. Sementara itu, mayoritas

jalan dalam kondisi rusak pada tahun 2017 berada di Kabupaten Paser yang mencapai 36% terhadap total panjang jalan provinsi dalam kondisi yang sama. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar panjang jalan provinsi di daerah tersebut berada dalam kondisi rusak (88,4%).

Kota Samarinda merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada daerah tersebut mencapai 56%. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

## **2) Sumber Daya Air**

Konsep pengelolaan air dan sumber daya air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya air berupa menyalurkan (*redistributing*) air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu. Pengelolaan air berperan sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, dapat terlihat dari masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Pada tahun 2017, luas lahan yang terairi sebesar 14.928 ha. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belum semua lahan pertanian membutuhkan yang terairi jaringan irigasi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan jaringan irigasi. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi dan ketidaksesuaian ketersediaan jaringan irigasi dengan lahan pertanian strategis. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting.

**Tabel 2. 4**  
**Rencana dan Realisasi Jaringan Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

No.	Lokasi	Biatan	Merancanag	Kaliurang	R.Pulung	Total
1.	Rencana	33.570	19.386	9.977	20.803	83.736
2.	Realisasi	13.214	10.094	2.271		26.029

*Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Ketersediaan jaringan irigasi hanya mencapai 31% dibandingkan dengan rencana pembangunan/total kebutuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan belum optimalnya produksi hasil pertanian. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari rendahnya capaian rasio pemenuhan beras serta indeks pertanaman.

**Tabel 2. 5**  
**Rasio Pemenuhan Beras/Kebutuhan Konsumsi Beras**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi (GKG) (ton)	Beras Tersedia (ton)	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus/ Minus (ton)	Ketersediaan (%)
1.	2013	3.275.844	439.439	275.704	373.446	-97.742	<b>73,83</b>
2.	2014	3.351.432	426.467	267.565	382.063	-114.498	<b>70,03</b>
3.	2015	3.426.638	408.782	256.470	390.637	-134.167	<b>65,65</b>
4.	2016	3.501.232	305.337	191.568	399.140	-207.572	<b>48,00</b>
5.	2017	3.575.449	400.102	251.024	407.601	-156.577	<b>61,59</b>

*Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Berdasarkan tabel di atas, seiring terus meningkatnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur, kebutuhan konsumsi beras juga semakin meningkat. Akan tetapi, ketersediaan beras mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai 2017. Artinya, untuk mengatasi minus kebutuhan konsumsi beras, diperlukan peningkatan infrastruktur irigasi yang mampu menjangkau daerah pertanian strategis. Peningkatan infrastruktur irigasi ini disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku melalui infrastruktur bendungan atau waduk. Selain sebagai sumber air baku irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air minum dan pengendali banjir.

Persoalan berikutnya terkait kebutuhan air baku untuk irigasi adalah belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi. Luas irigasi berdasarkan kondisi di Kalimantan Timur yang berpotensi mencapai 58.943 ha dan fungsional sebesar 14.928 ha. Kebutuhan irigasi sebesar 166.855 ha untuk memenuhi kebutuhan 3.575.449 jiwa penduduk dengan konsumsi beras 112,00 kg/tahun. Kebutuhan konsumsi beras sebesar 400.451 ton/tahun dengan produksi beras per hektar adalah 2,4 ton per sekali tanam.

Permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dapat dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum.

**Tabel 2. 6**  
**Persentase Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan**

NO	KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang terlayani air bersih perpipaan (%)		
		2015	2016	2017
1	PASER	15.882	18.743	19.050
2	PENAJAM PASER UTARA	4.798	5.339	5.470
3	SAMARINDA	127.633	137.135	146.225
4	BALIKPAPAN	87.999	95.781	97.243
5	KUTAI KERTANEGARA	65.026	69.942	68.035
6	KUTAI BARAT	9.560	9.987	10.012
7	KUTAI TIMUR	17.727	20.656	15.945
8	BERAU	13.159	16.120	16.517
9	BONTANG	19.212	22.970	23.999
10	MAHAKAM ULU	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>360.996</b>	<b>396.673</b>	<b>402.496</b>

*Sumber: Data Sektor Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. Terbatasnya akses air bersih terutama untuk air minum tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Persoalan ini salah satunya dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota. SPAM dapat dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota kemudian dikelola dan disalurkan.

Cakupan layanan air minum melalui jaringan PDAM Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan tabel data cakupan layanan air minum di atas, kabupaten yang sudah terlayani dengan cukup baik antara lain Samarinda dengan cakupan layanan air minum sebesar 95,46%. Pembagian dan pemerataan layanan air bersih terutama untuk air minum maupun pengelolaannya perlu lebih ditingkatkan.

Persoalan cakupan layanan air minum yang belum optimal, membuat masyarakat lebih memilih air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini terlihat pada tabel di atas, cakupan sumber air minum berupa air kemasan dan air isi ulang memiliki persentase tertinggi selama tiga tahun terakhir.

### **3) Banjir dan Abrasi**

Permasalahan banjir akan mempunyai skala yang besar bila parameter permasalahan di atas terjadi secara simultan, DAS yang luas, daerah paparan banjir, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur pernah mengalami permasalahan ini kecuali Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan

Bontang. Daerah rawan banjir di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 7**  
**Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur**

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
		3	Kota Bontang
Guntung	20		
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

*Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Tingginya kejadian banjir disebabkan oleh belum memadainya infrastruktur pengendali banjir dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan

sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase yang memadai serta banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

**Tabel 2. 8**  
**Perkiraan Volume Sedimentasi di Infrastruktur Pengendali Banjir**  
**Kota**  
**(Sungai, Kolam Retensi Banjir dan Saluran Drainase)**

No.	Jenis Infrastruktur	Kapasitas/ Panjang	Laju Sedimentasi (mm/th)	Volume Sedimentasi (m <sup>3</sup> /th)
1	Kota Balikpapan			
	- Sungai Ampal	7 Km	0,95	21.613
	- Sungai Klandasan	5 Km	1,1	13.200
	- Sungai Sepinggan	4 Km	1,2	11.520
	- Saluran Drainase Kota	35 Km		10.500
2	Kota Bontang			
	- Sungai Bontang (dalam Kota)	8 Km	1,3	12.480
	- Danau Kanaan	7 Ha	1,3	26.000
	- Saluran Drainase Kota	25 Km		7.500
3	Kota Samarinda			
	- Sungai Karangmumus (dlm Kota)	15 Km	1,25	78.125
	- Sungai Kr.Asam Kecil	6 Km	1,25	12.000
	- Sungai Kr.Asam Besar	8 Km	1,15	34.500
	- Sungai Rapak Mahang	5 Km	1,25	10.000
	- Kolam Retensi Banjir Stadion Semapaja	1 Ha	1,25	13.000
	- Kolam Retensi Banjir Loa Hui	4,5 Ha	1,3	7.280
	- Kolam Retensi Banjir Vorvo	1 Ha	0,6	1.440
	- Saluran Drainase Kota	50 Km		17.500

*Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Bertambahnya volume sedimentasi yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan. Pertambahan volume terbesar terjadi di Sungai Karangmumus dan Sungai Kr. Asam Besar Kota Samarinda. Salah satu faktor penyebab

terjadinya sedimentasi di wilayah perkotaan adalah karena perubahan penggunaan lahan.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hubungan yang seimbang antara masyarakat dengan pengelolaan lingkungan dapat memacu pengendalian risiko banjir.

#### **d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-13 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Adapun kondisi perumahan dan kawasan pemukiman di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 9**  
**Luas Kawasan Pemukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ha)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Kawasan Pemukiman Eksisting</b>	<b>Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman</b>
Samarinda	12.910,00	39.156
Kutai Kartanegara	9.558,62	63.928
Bontang	3.024,09	7.775
Kutai Timur	9.906,89	79.923
Berau	5.818,32	76.643
Balikpapan	8.905,67	25.318
Penajam Paser Utara	3.342,19	27.123
Paser	3.944,22	62.298
Kutai Barat	1.359,78	11.311
Mahakam Ulu	138,94	2.790
<b>Total</b>	<b>58.908,76</b>	<b>396.265</b>

Sumber : RTRW Prov. Kaltim 2016-2036

Luas kawasan peruntukan pemukiman mencapai 396.265 Ha. Pada tahun 2017, luas kawasan pemukiman eksisting sebesar 58.908,76 Ha atau 14,87 persen dari total luas kawasan peruntukan pemukiman. Sebagian besar kawasan pemukiman berada di Kota Samarinda (12.910 Ha) yang mencapai 21,9 persen dari total luas kawasan pemukiman.

Sementara itu, akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni belum optimal. Hal tersebut terindikasi dari masih adanya kawasan pemukiman yang termasuk dalam kategori pemukiman kumuh. Saat ini terdapat 70 titik kawasan pemukiman kumuh, 11 diantaranya berada di bawah kewenangan provinsi yang tersebar di empat kabupaten/kota.

**Tabel 2. 10**  
**Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

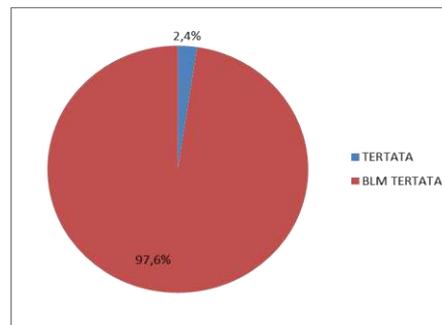
No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Balikpapan	Karang Jati	12,52
2.	Samarinda	Bantaran Sungai Mahakam (D), Kecamatan Seberang	10,36
		Sistem Folder H Kec. Samarinda Ulu	13,05
3.	Bontang	Tanjung Laut Indah	12,32
		Loktuan	14,43
		Guntung	12,05
		Tanjung Laut	12,22
4.	Kutai Kartanegara	Loa Kulu Kota	11,56
		Loa Sumber	
		Jembayan	
		Muara Jawa Pesisir	15,06
	Jumlah		113,55

Sumber: SK Kumuh dan Numerik Kumuh KOTAKU 2018

Total kawasan pemukiman kumuh yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi (10-15 Ha) mencapai 113,55 Ha. Sebagian besar kawasan tersebut berada di Kota Bontang yang mencapai 51,02 Ha atau 38,9 persen dari total luas kawasan pemukiman kumuh provinsi. Kawasan pemukiman kumuh juga tersebar di dua kota lainnya yaitu Kota Samarinda dan Balikpapan, masing-masing sebesar 11,8 persen dan 10,39 persen. Sementara itu, wilayah pemukiman kumuh juga

berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di empat lokasi yang mencapai 26,62 Ha atau 23,5% dari luas kawasan pemukiman kumuh provinsi. Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Selain itu, ketidakefektifan akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni juga disebabkan oleh rendahnya upaya penataan pemukiman. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya cakupan pemukiman yang tertata. Sampai tahun 2017, hanya 1.045,14 Ha atau 2,38 persen dari luas kawasan pemukiman keseluruhan yang telah tertata.

**Gambar 2. 10**  
**Kondisi Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**



*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Belum optimalnya penataan pemukiman disebabkan oleh beberapa hal. Persoalan utama yang terjadi adalah belum optimalnya upaya relokasi pemukiman tidak layak di beberapa titik di sepanjang sempadan sungai, kawasan padat di perkotaan, kawasan sepanjang garis pantai, kawasan lindung, kawasan rawan bencana. Kondisi ini mengakibatkan pemenuhan infrastruktur dasar pemukiman layak huni belum memadai.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Data mengenai rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 11**

**Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Verifikasi	
		Verifikasi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)
Paser	72.324	0	4.476
Kutai Barat	44.729	16.247	0
Kutai Kartanegara	183.156	0	19.183
Kutai Timur	83.060	23.892	20.451
Berau	50.510	0	523
Penajam Paser Utara	39.129	8.817	1.028
Mahakam Hulu	7.778	0	535
Balikpapan	161.892	0	359
Samarinda	236.778	0	5.167
Bontang	50.896	0	0
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>930.252</b>	<b>48.956</b>	<b>51.722</b>

*Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017*

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

**Tabel 2. 12**  
**Persentase RT menurut Kualitas Fisik Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017 (%)**

Kualitas Fisik Perumahan	2015	2016	2017
Lantai tanah	0,79	0,76	0,52
Luas lantai per kapita <10 m <sup>2</sup>	19,63	22,32	22,16
Atap ijuk/rumbia + lain sejenisnya	1,02	0,46	0,27
Dinding bambu + lain sejenisnya	0,95	0,67	0,23

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Kualitas perumahan di Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari rasio luas lantai per orang belum menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2017, terdapat 22,16% dari jumlah RT yang memiliki bangunan rumah kurang dari 10 m<sup>2</sup> per orang. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun 2016, tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 19,63%. Namun demikian, kualitas perumahan jika dilihat dari spesifikasi

bahan bangunan yang digunakan telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Persentase RT dengan luas lantai tanah, atap ijuk/rumbia dan dinding bambu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, persentase RT yang memiliki rumah berlantai tanah hanya sebesar 0,52 %, bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, persentase rumah tangga yang menggunakan bahan ijuk/rumbia dan sejenisnya sebagai atap rumah hanya sebesar 0,27%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kualitas dinding pada tempat tinggal yang terbangun. hanya sebesar 0,23% dari total tempat RT yang masih memiliki tempat tinggal dengan dinding berbahan bambu dan sejenisnya.

Selain mengukur kualitas bangunan perumahan, kinerja pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dapat dilihat dari akses dan kualitas sanitasi. Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik.

**Tabel 2. 13**  
**Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017**

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jamban sendiri	89,71	89,75	91,76
Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	70,08	77,66	76,56

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Pada tahun 2017, sebagian besar RT telah mempunyai jamban sendiri sebesar 91,76% dari total RT keseluruhan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, proporsi RT yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebesar 76,56%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

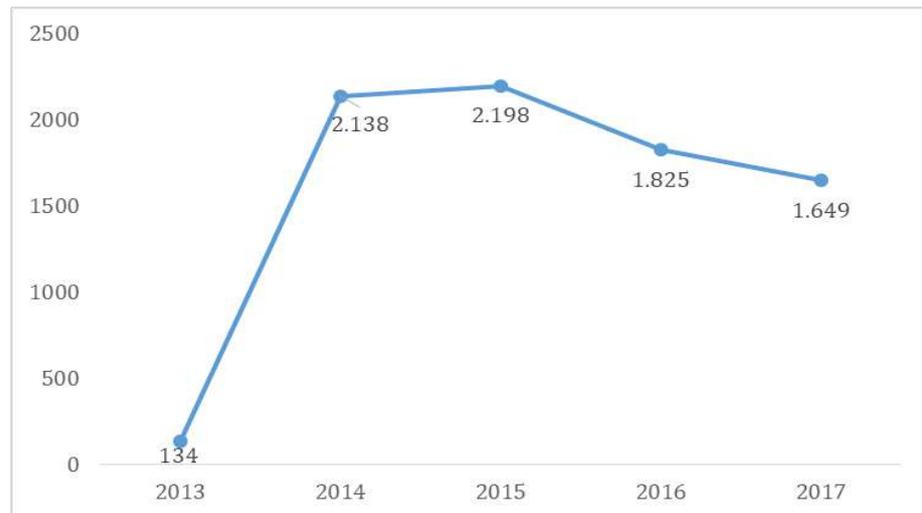
Di samping fasilitas sanitasi, akses air bersih juga menjadi salah satu indikator rumah layak huni. Pada tahun 2016, rumah tangga yang mendapat akses air minum layak mencapai 92,25% dari total rumah

tangga, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun 7,75% sisanya belum dapat mengakses air minum layak.

**e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Ketersediaan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui Gambar berikut:

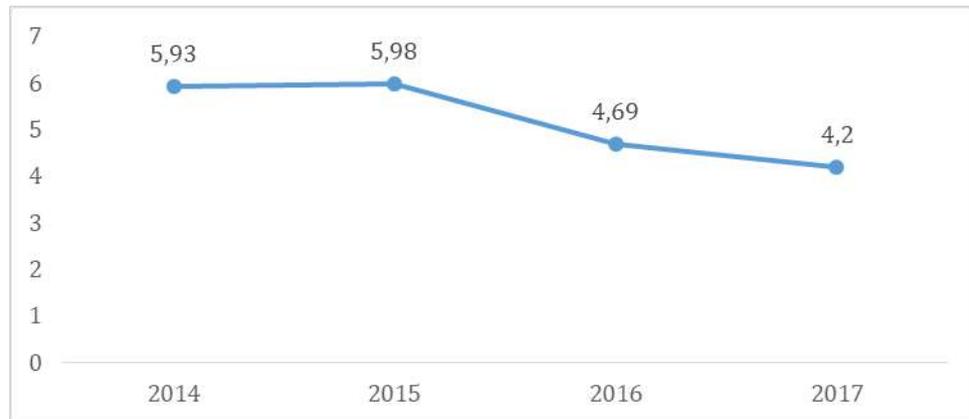
**Gambar 2. 11**  
**Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018*

Jumlah Satpol PP di Kalimantan Timur pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 134 personil pada tahun 2013 menjadi 2.138 personil pada tahun 2014. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing menjadi 1.825 dan 1.649 personil.

**Gambar 2. 12**  
**Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017**

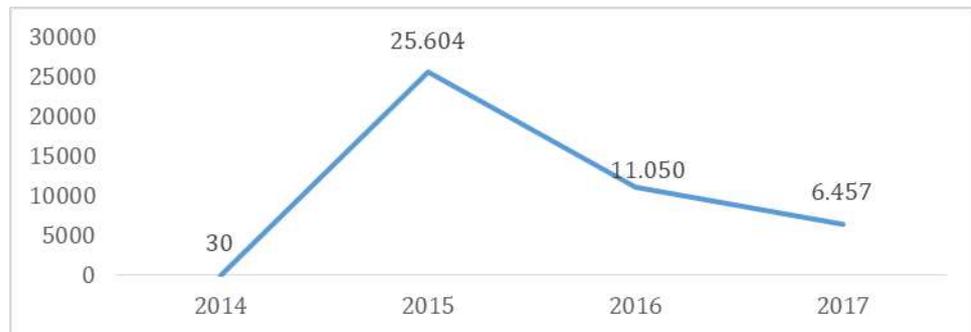


*Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018*

Rasio Polisi Pamong Praja per satuan penduduk per 10.000 penduduk pada tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi pada tahun 2015 sebanyak 0,84 persen. Adapun pada tahun 2016 dan 2017 rasio Satpol per 10.000 yaitu masing-masing menjadi 4,69 dan 4,2. Artinya, pada tahun 2017, dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 4 orang personil polisi pamong praja. Penurunan rasio tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah polisi pamong praja yang ada.

Begitu juga dengan jumlah petugas Linmas yang saat ini mengalami penurunan. Padahal Sat Linmas berfungsi untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan.

**Gambar 2. 13**  
**Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017**



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jumlah Linmas di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Peningkatan paling drastis terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 30 personil Linmas pada tahun 2014 menjadi 25.604 pada tahun 2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 dan 2017 capaian tersebut menurun menjadi masing-masing 11.050 dan 6.457 personil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat mengalami penurunan akibat adanya penurunan jumlah linmas.

#### f. Sosial

Pelayanan sosial juga sangat berkaitan dengan status kesejahteraan masyarakat. Indikator yang mengukur kesejahteraan suatu masyarakat salah satunya adalah indikator yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tingkat kesejahteraan berdasarkan BKKBN terbagi menjadi 5 level yaitu *Pra Sejahtera (Sangat Miskin)*, *Sejahtera I (Miskin)*, *Sejahtera II*, *Sejahtera III*, dan *Sejahtera III Plus*. Di Kalimantan Timur, jumlah keluarga berdasarkan level kesejahteraan terbawah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 14**  
**Jumlah Keluarga berdasarkan Klasifikasi Keluarga**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Level Kesejahteraan			Jumlah
	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	
<b>Kabupaten</b>				

1. Paser	4.033	14.360	18.905	37.298
2. Kutai Barat	2.397	11.414	7.737	21.548
3. Kutai Kartanegara	11.131	69.429	47.463	128.023
4. Kutai Timur	1.647	9.046	6.556	17.249
5. Berau	2.370	20.581	15.462	38.413
6. Penajam Paser Utara	2.409	23.073	14.140	39.622
7. Mahakam Ulu	-	-	-	-
<b>Kota</b>				
1. Balikpapan	11.583	99.388	50.921	161.892
2. Samarinda	15.731	96.205	56.418	168.354
3. Bontang	2.858	21.224	13.483	37.565
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>54.159</b>	<b>364.720</b>	<b>231.085</b>	<b>649.964</b>

*Sumber: Kalimantan Dalam Angka 2017*

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 54 ribu keluarga Pra Sejahtera atau keluarga **sangat miskin** dan lebih dari 360 ribu keluarga Sejahtera I atau **keluarga miskin**. Secara umum, penduduk sangat miskin terbanyak berada di Kota Samarinda (29,0% dari total keseluruhan Kaltim), Kota Balikpapan (21,3%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (20,5%). Angka tersebut sesuai dengan proporsi jumlah penduduk yang sebagian besar berada di tiga wilayah tersebut. Jumlah penduduk sangat miskin terkecil ada di Kutai Timur dengan proporsi 3,0 persen dari total keseluruhan keluarga sangat miskin di Kalimantan Timur. Terkonsentrasinya keluarga sangat miskin di tiga daerah di atas sesuai dengan konsentrasi penduduk miskin.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kondisi PMKS di Provinsi Kalimantan Timur dapat dipaparkan melalui beberapa indikator yaitu: jumlah PMKS, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase PMKS yang ditangani.

**Tabel 2. 15**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

<b>Rincian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah PMKS (orang)	120.971	113.807	113.807	247.167	243.459
PMKS Yang Ditangani (orang)	26	26	26	26	75.696
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	0,02 %	0,02%	0,02%	0,01%	31,09%
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan (orang)	355.636	355.636	355.636	78.690	76.000
PMKS yang diberikan bantuan (orang)	23,69	14,12	14,12	54,67	99,60
PMKS yang memperoleh bantuan Sosial (%)	n/a	n/a	n/a	51%	n/a

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id*

Jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami permasalahan tingginya penduduk PMKS. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan, rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial, belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan panti sosial, rendahnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial. Berdasarkan hasil kompilasi data RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, saat ini belum ada Panti Sosial yang khusus melayani Psiko Sosial, sarana dan prasarana Panti Sosial kurang optimal, serta minimnya jumlah pekerja sosial yang ada dalam Panti Sosial sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah 11 aparatur terdiri dari penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat.

## **2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **a. Tenaga Kerja**

Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja. Variabel ini memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi baik atau buruknya ketenagakerjaan di suatu daerah yaitu: angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Kesempatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk pada usia produktif yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Data angkatan kerja merupakan basis bagi penyusunan berbagai data ketenagakerjaan seperti tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan

kerja dan dijadikan dasar bagi perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Kondisi angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 16**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kalimantan Timur, 2012 - 2017**

Uraian Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Angkatan Kerja</b>	1.777.381	1.497.572	1.537.938	1.539.491	1.717.892	1.654.964
Bekerja	1.619.118	1.378.610	1.421.952	1.423.957	1.581.239	1.540.675
Pengangguran	158.263	118.692	115.986	115.534	136.653	114.289
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	889.718	859.778	884.603	928.020	816.221	941.028
Sekolah	246.473	263.369	271.956	272.331	203.316	247.456
Mengurus RT	557.100	526.867	521.681	560.800	535.158	612.093
<b>Lainnya</b>	66.145	69.542	90.966	94.889	77.747	81.479

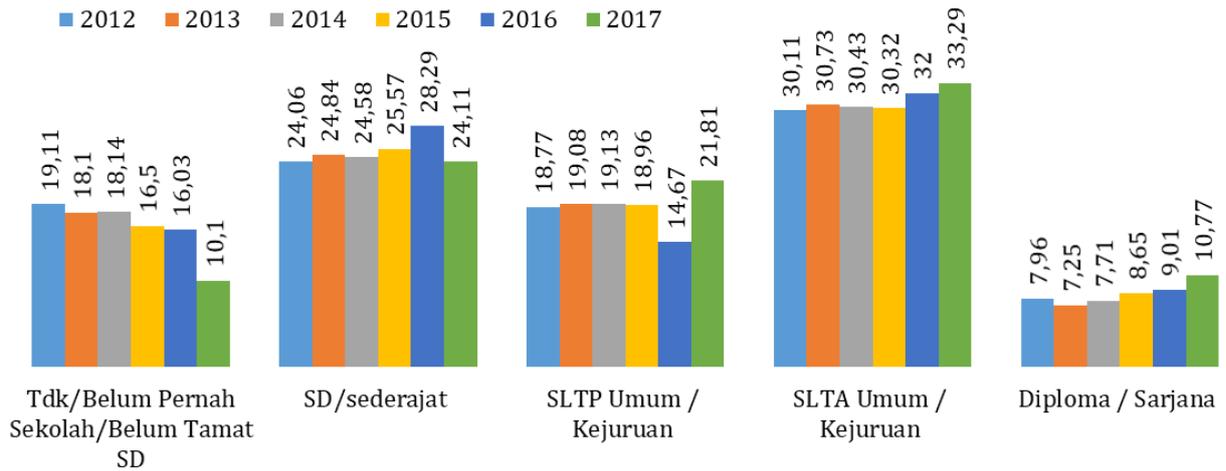
*Sumber: Sakernas-BPS Prov. Kalimantan Timur dan <http://sidata.kaltimprov.go.id>*

Secara garis besar, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang fluktuatif. Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2012-2013 sebesar 15 persen. Pada periode tahun 2013-2014, angkatan kerja kembali mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2014-2015 sebesar 0,1 persen dan pada tahun 2015-2016. Kenaikan jumlah angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk terus berkembang, sehingga memerlukan perluasan lapangan kerja. Penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2016. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2015-2016, yaitu sebesar 11 persen. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja kembali mengalami penurunan.

Data mengenai angkatan kerja dapat dirinci secara lebih detail berdasarkan jenjang pendidikan angkatan kerja. Data tersebut dijadikan dasar penyusunan intervensi kebijakan ketenagakerjaan berbasis jenjang pendidikan yang ditamatkan. Jenjang pendidikan berpengaruh positif pada keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Pembagian angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. 14**

**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017 (%)**

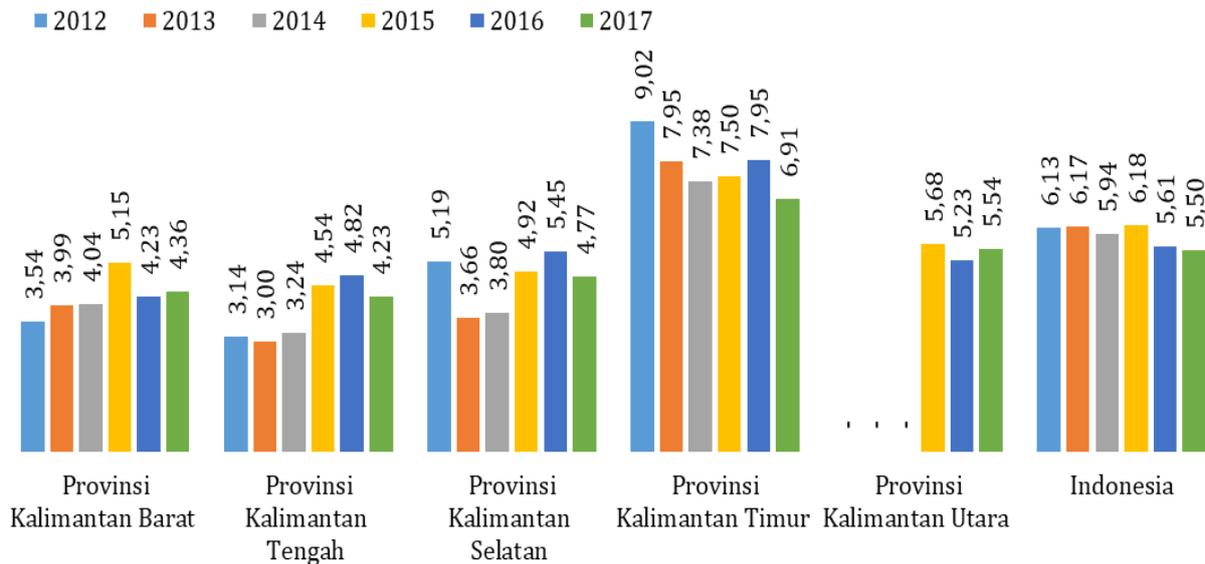


*Sumber : Hasil Kompilasi Data RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018*

Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur terbesar terjadi pada jenjang pendidikan SMA/SMK. Serapan tenaga kerja sangat besar untuk pendidikan SMA/SMK dibandingkan dengan lulusan Diploma/Sarjana. Besarnya angkatan kerja pada jenjang tersebut berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk yang berkerja dan sekaligus yang menganggur. Besarnya serapan tenaga kerja pada jenjang pendidikan SMA/SMK mengindikasikan diperlukannya penyesuaian antara keterampilan tenaga kerja pada jenjang pendidikan tersebut dengan permintaan pasar sehingga serapan tenaga kerja pada jenjang pendidikan SMA/SMK dapat lebih ditingkatkan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan. TPT berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tingginya TPT menandakan masih perlu dimaksimalkannya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Capaian mengenai tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur ditampilkan sebagai berikut:

**Gambar 2. 15**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur**  
**Dengan Daerah Lainnya Tahun 2012-2017 (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat 2018  
Keterangan: data TPT dihitung per Agustus per tahun

Capaian TPT di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun. Namun, capaian TPT lebih tinggi dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya partisipasi tenaga kerja yang belum terserap secara optimal ke dalam lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk dapat menurunkan TPT ke angka yang lebih rendah.

TPT juga berkorelasi dengan tingkat kesempatan kerja (TKK). TKK merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Pada umumnya, data ini digunakan untuk menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Gambaran TKK Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 17**  
**Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur (%) Tahun 2012 - 2017**

Indikator Tenaga Kerja	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Kesempatan Kerja	63.61	92.06	92.46	92,50	n/a	n/a

Sumber: Sakernas-BPS Prov. Kalimantan Timur dan <http://sidata.kaltimprov.go.id>

TKK Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren kenaikan dari tahun 2012 hingga 2015. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2012 hingga 2013, yaitu sebesar 28,45 persen. Pada tahun 2013-2014 dan 2014-2015, kenaikan hanya terjadi masing-masing 0,40 persen. Turunnya TKK pada tahun 2013 hingga 2015 mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur belum terbuka lebar akibat kurangnya pengembangan sektor padat karya secara optimal.

Kompetensi tenaga kerja lokal di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu untuk dimaksimalkan. Kondisi tersebut ditunjukkan capaian persentase tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh lulusan SLTA umum/kejuruan. Sementara itu, capaian tenaga kerja pada tahun 2017 berdasarkan pendidikan diploma/sarjana (pendidikan tinggi) di Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 10,77 persen. Pada konteks ini, capaian tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi tenaga kerja lokal masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan kualifikasi tenaga kerja masih rendah, kualitas tenaga kerja masih rendah, dan kapasitas pelatihan yang diberikan Balai Latihan Kerja (BLK) masih belum optimal.

Kualifikasi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu dimaksimalkan. Kualifikasi tenaga kerja yang masih rendah mempengaruhi input tenaga kerja belum optimal. Berdasarkan data wawancara dengan pengurus BLK Balikpapan, jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang diploma/sarjana masih rendah. Selain itu, Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak mempunyai data yang lengkap terkait pelaporan lulusan SMA yang telah diterima di perguruan tinggi (diploma/sarjana).

#### **b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik

dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dapat dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perkembangan IDG di Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 18**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota dan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (%)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kabupaten Paser	56,08	54,51	52,85	58,90	64,58
Kabupaten Kutai Barat	47,77	53,70	49,15	63,49	62,36
Kabupaten Kutai	45,81	46,04	45,86	52,91	53,41
Kabupaten Kutai Timur	54,92	48,56	50,52	55,13	55,20
Kabupaten Berau	49,53	50,34	50,48	49,20	47,09
Kabupaten Penajam Paser Utara	63,69	63,98	61,74	49,42	49,92
Kabupaten Mahakam Ulu	Na	Na	Na	68,19	66,37
Kota Balikpapan	58,62	68,94	67,83	65,82	66,29
Kota Samarinda	57,49	55,60	56,79	70,67	73,60
Kota Bontang	59,11	59,06	59,47	44,29	45,85
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>61,29</b>	<b>61,84</b>	<b>63,12</b>	<b>53,74</b>	<b>55,96</b>
Provinsi Kalimantan Barat	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44
Provinsi Kalimantan Tengah	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87
Provinsi Kalimantan Selatan	66,61	68,40	65,60	68,22	70,05
Provinsi Kalimantan Utara	Na	Na	Na	66,52	67,31
<b>INDONESIA</b>	<b>69,14</b>	<b>70,07</b>	<b>70,46</b>	<b>70,68</b>	<b>70,83</b>

*Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Pusat 2016*

IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan di ruang publik. Capaian IDG Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, capaian IDG Provinsi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

Layanan publik ramah anak merupakan salah satu capaian indikator Kabupaten kota Layak Anak. Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Dari 10 kabupaten/kota, 9 daerah sudah menjadi pengembang kota kabupaten layak anak,. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai barat dan Kabupaten Mahakam Hulu belum menjadi pengembang kabupaten layak anak.

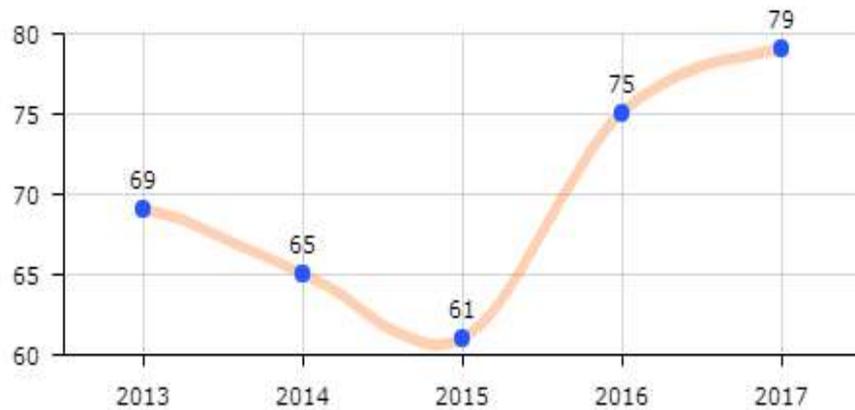
### **c. Pangan**

Ketahanan pangan khususnya beras dan daging di Provinsi Kalimantan belum mencapai titik optimal. Ketahanan pangan berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan utama, akses atau distribusi pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Berbagai indikator tersebut berhubungan erat dengan urusan kesehatan dan rumpun urusan ekonomi yang menjadi basis bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berikut adalah uraian berbagai data tentang urusan pangan di Provinsi Kalimantan Timur:

#### **1) Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan adalah dasar bagi pencapaian indikator akses dan konsumsi pangan. Ketersediaan pangan terdiri dari pangan utama yang dikonsumsi masyarakat. Pada umumnya beras menjadi salah satu komponen dalam indikator tersebut. Ketersediaan pangan berkorelasi dengan stok cadangan pangan daerah. Berikut adalah gambaran data tentang ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur:

**Gambar 2. 16**  
**Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2013-2017(%)**



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Pada tahun 2013 hingga 2014 ketersediaan pangan utama Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 5,8%. Penurunan ini terus terjadi pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 6,15%. Kenaikan mulai terjadi pada tahun 2016 dan 2017, yaitu masing-masing sebesar 22,95% dan 5,33%. Data ini mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur tetap harus ditingkatkan karena sebagian besar pangan utama berasal dari luar daerah. Belum optimalnya stok cadangan pangan beras menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab bagi ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan yang menurun akan berimplikasi pada persoalan kesehatan dan ekonomi.

**Gambar 2. 17**

### Ketersediaan Pangan Perkapita di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Ton)



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Pada tahun 2014 ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur turun sebesar 3,42%. Namun data tahun 2015 dan 2016 menunjukkan tren yang tetap. Kenaikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,88%. Tren menurun selama 2013 hingga 2017 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi perhatian utama untuk diintervensi. Ketersediaan pangan perkapita erat dengan persoalan kemiskinan. Pemenuhan terhadap ketersediaan pangan per kapita secara merata dapat mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pangan.

**Gambar 2. 18**  
**Stok Beras Sebagai Bahan Makanan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (Ton)**



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Stok beras sebagai bahan makanan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 2,93%. Kenaikan sebesar 0,6% terjadi pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan tajam sebesar 20,34%. Tahun 2017 stok beras di Kalimantan Timur tetap berada pada angka yang sama seperti tahun 2016. Stok beras di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Beras dari dalam daerah baru mampu memenuhi stok sebesar 61% dengan tingkat produksi yang fluktuatif karena sebagian besar berasal dari sawah tadah hujan. Umur padi yang panjang juga menjadi penentu stok pangan beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur.

## 2) Akses Pangan

Rendahnya akses terhadap pangan menjadi persoalan tingkat kedua yang dihadapi setelah ketersediaan pangan. Terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi permasalahan akses pangan. Akses terhadap pangan berhubungan erat salah satunya dengan stok cadangan pangan.

**Tabel 2. 19**  
**Stok Cadangan Pangan Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur (Ton)**

Tahun	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2015	112

2016	212
2017	240

*Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017 diolah*

Belum optimalnya stok cadangan pangan pemerintah daerah. Setiap tahun selama tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Meskipun demikian, stok ini belum optimal mencukupi konsumsi pangan. Jumlah pada tahun 2017 mencapai 240 ton tetapi berkurang karena memberi bantuan ke Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 80 ton.

Penyebab lain akses masih rendah di Provinsi Kalimantan Timur karena sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur ke sentra pertanian. Panjangnya rantai distribusi pangan dari luar daerah maupun ke dalam daerah juga menjadi penyebab. 40% lebih memang pedagang mendatangkan dari luar. Pedagang besar mendatangkan pasokan dari Jawa dan Sulawesi kemudian didistribusikan ke pedagang menengah dan pengecer atau langsung pengecer. Petani langsung ke pedagang pengumpul/menengah dan pengecer/toko kecil.

#### **d. Pertanahan**

Urusan pertanahan merupakan bagian dari urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan pertanahan termasuk urusan yang penting dalam pembangunan daerah, terutama pada unsur aset, legalitas, hingga adanya persoalan konflik pertanahan. Adanya konflik pertanahan yang perlu menjadi perhatian misalnya terkait batas wilayah dan konflik pertanahan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk terkait konflik tenurial.

#### **e. Lingkungan Hidup**

Dalam konteks rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan. IKLH sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup, pencapaiannya dalam lima tahun

terakhir di Provinsi Kalimantan Timur antara lain tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2. 20**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim 2013-2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
IKLH	72,41	75,24	81,97	83,03	82,64

*Sumber: Buku Putih Kajian Awal Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023*

Provinsi Kalimantan Timur memiliki keseriusan dalam meningkatkan IKLH. Persoalan ini dapat ditunjukkan melalui data bahwa pada tahun 2013 IKLH Kalimantan Timur sebesar 72,41; tahun 2015 sebesar 81,97; dan tahun 2016 sebesar 83,03 (target 81,98). Realisasi kenaikan IKLH ini menunjukkan bahwa IKLH Kalimantan Timur memiliki kategori sangat baik. Kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur selain mengedepankan kemajuan sosial dan ekonomi juga berwawasan lingkungan.

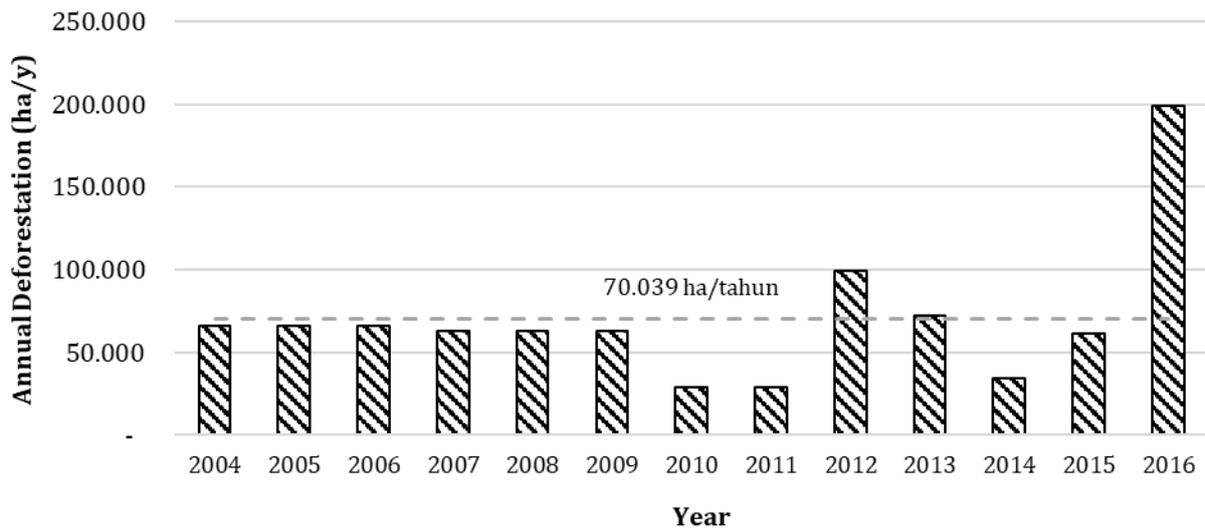
Kualitas lingkungan hidup meningkat pada tahun 2015, yaitu sebesar 81,97 EQI, yang ditandai dengan penurunan pada aspek air dan udara, sedangkan pada indeks tutupan hutan mengalami penurunan pada tahun 2015. Persoalan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingginya alih fungsi hutan dan lahan, tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik, tingginya pencemaran udara, masih tingginya angka emisi GRK dan belum optimalnya penanganan persampahan.

Alih fungsi hutan dan lahan dapat ditandai dengan indikator indeks tutupan hutan dan deforestasi hutan. Indeks tutupan hutan Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2011 hingga 2018. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 hingga 2017 indeks tutupan hutan Kalimantan

Timur mengalami kenaikan. Namun kenaikan ini harus terus dijaga secara berkesinambungan, karena indikator indeks tutupan hutan berpengaruh langsung terhadap komitmen Kalimantan Timur untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Penurunan indeks tutupan hutan sejalan dengan kenaikan semakin tingginya laju deforestasi. Laju deforestasi Kalimantan Timur menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada tahun 2016. Terdapat sekitar 200.000 ha hutan yang mengalami deforestasi. Berikut adalah data tentang luas deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur:

**Gambar 2. 19**  
**Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur**



*Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017.*

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan yang ditandai dengan menurunnya indeks tutupan hutan dan meningkatnya laju deforestasi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: rendahnya pengawasan kawasan lindung, tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha dan rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi. Persoalan ini ditandai dengan masih rendahnya reklamasi lahan tambang di Kalimantan Timur. Berikut adalah data tentang luas lahan yang direklamasi per tahun:

**Tabel 2. 21**  
**Reklamasi Lahan Terganggu per Tahun**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Luas lahan tambang yang direklamasi	38099.98 Ha 96877.12 Ha	38667.322 Ha 98666.27 Ha	41541.58 Ha 103072.80 Ha	48991.69 Ha 103041.64 Ha	50239.88 Ha 103786.40 Ha

*Sumber: Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*

Besarnya emisi gas rumah kaca menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 hingga 2017 emisi GRK menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun saat ini sudah disusun berbagai kebijakan penanganan yang melibatkan multi-pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikut adalah data tentang emisi GRK di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2. 22**  
**Emisi GRK Provinsi Kalimantan Timur (ton CO2 Eq)**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Emisi Gas Rumah Kaca tutupan hutan	10.276.303	23.831.368	31.085.172	19.725.868,92	19.433.145,44

*Sumber: Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*

Masih tingginya emisi GRK di Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah, masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi, masih kurangnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME dan masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%.

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki area cadangan karbon tinggi seluas 53.000 ha, sedangkan area cadangan karbon rendah seluas 1.462.000 Ha. Pada konteks penerapan penggunaan biodiesel, hingga saat ini terdapat 2 perusahaan pertambangan yang menerapkan B20 (Biodiesel 20%) PKB2B yaitu Berau Coal dan KPC.

**Tabel 2. 23**  
**Estimasi Penggunaan Diesel di Provinsi Kalimantan Timur**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
Estimasi penggunaan diesel pada operasi tambang batubara	na	2.664.468	2.942.903	na	Na	(kilo liter)
Penggunaan diesel se-Kaltim	na	4.314.482	3.219.809	na	Na	(kilo liter)
Estimasi persentase penggunaan diesel di operasi tambang	na	62	91	na	Na	persen

*Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2018*

#### **f. Perhubungan**

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini

memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang dan jasa di suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam koridor tersebut, kualitas layanan perhubungan dapat diukur melalui beberapa indikator.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Namun, pemaparan terkait penyelenggaraan perhubungan udara dalam sub-bab ini tetap dibutuhkan dalam rangka memberikan gambaran komprehensif terkait pelayanan perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. 24**  
**Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Angkutan Umum	139.032	139.032	139.054	146.006	146.148	Unit
	Mobil penumpang umum	1.196	1.196	1.266	1.329	1.348	Unit
	Mobil bus	569	569	521	547	547	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.253	Unit
2.	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	10.232.985	Orang
	Jumlah penumpang Bis Tiba	9.268.310	8.820.500	8.959.770	9.859.962	9.227.136	Orang
	Jumlah penumpang Bis Berangkat	8.996.910	9.390.440	8.834.070	9.845.714	8.966.784	Orang
3.	Jumlah Kendaraan Bermotor	2.013.727	2.233.278	2.376.033	2.398.117	2.428.324	Unit

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Akses masyarakat terhadap transportasi umum belum optimal. Hal tersebut dapat terindikasi dari menurunnya jumlah pengguna angkutan umum yang mencapai 15,6% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan

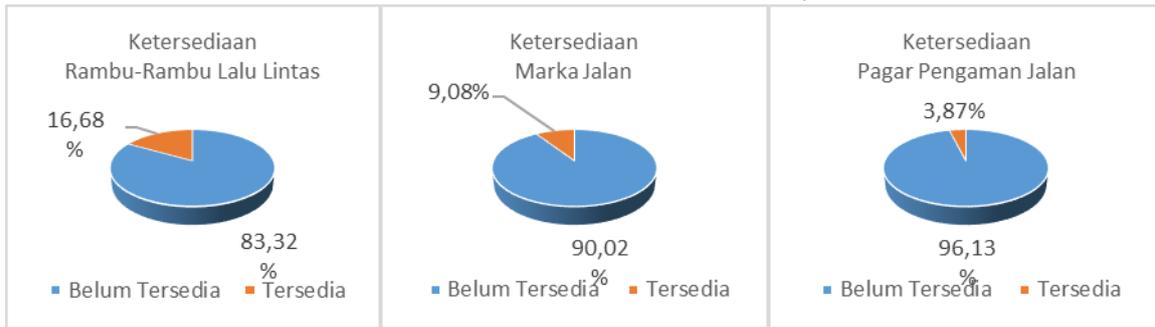
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya peralihan penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor (sebagian besar adalah kendaraan pribadi) cukup signifikan mencapai lebih dari 100.000 unit setiap tahunnya atau meningkat hampir 20% antara tahun 2013-2017. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kenyamanan dalam pelayanan transportasi umum. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Persoalan lain yang juga berpengaruh adalah belum optimalnya ketersediaan moda transportasi. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya peningkatan jumlah angkutan umum yang beroperasi, hanya kurang dari 1% pada tahun 2017.

**Tabel 2. 25**  
**Sarana dan Prasarana Transportasi Darat**

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Terminal	23	23	23	23	23	Unit
	1. Kelas A	2	2	2	2	2	Unit
	2. Kelas B	7	7	7	7	7	Unit
	3. Kelas C	10	10	10	10	10	Unit
	4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1.826.522	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	Orang
2.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit
3.	Jumlah Rambu-rambu yang tersedia	851	1.135	1.549	2.472	2.822	Unit
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	850	284	414	923	350	Unit

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari jumlah terminal tidak mengalami peningkatan pada periode 2013-2017. Sementara itu, upaya peningkatan ketersediaan fasilitas rambu-rambu jalan bahkan mengalami penurunan signifikan sebesar 38% pada tahun 2017.

**Gambar 2. 20**  
**Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan**



*Sumber: Data Bidang LLAJ, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Tingkat keselamatan transportasi sangat minim. Hal tersebut dapat terindikasi dari rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan (2.215.500 km).

Selain itu, ketersediaan pagar pengaman jalan hanya 3,87% (3.428 km) dibandingkan dengan total kebutuhan yang mencapai 88.620 km. Kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian serius mengingat fasilitas merupakan salah satu instrumen penting dalam memperlancar arus lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan.

**Tabel 2. 26**  
**Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No.	Elemen Data	Data Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Ijin Trayek	207	212	217	228	228	Unit
	Izin Trayek antarkota antarprovinsi	55	60	60	65	65	Unit
	Izin Trayek antarkota dalam provinsi	119	119	124	130	130	Unit
	Izin Trayek perkotaan	18	18	18	18	18	Unit
	Izin Trayek perdesaan	15	15	15	15	15	Unit
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	145.670	145.701	145.701	152.564	152.788	Unit
	Mobil penumpang umum	7.834	7.865	7.865	7.865	7.865	Unit
	Mobil bus	569	569	569	569	569	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.354	Unit
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum	1.5	1.425	1.425	1.355	1.426	Unit
4.	Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR	0	0	0	0	0	Unit

No.	Elemen Data	Data Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
5.	Lama Pengujian KIR	3	3	3	3	3	Hari
6.	Biaya Pengujian KIR	75	75	75	75	75	Rupiah

Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

**Tabel 2. 27**  
**Penyelenggaraan Layanan Transportasi Sungai**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Transportasi Sungai	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
- Kapal Ferry	7	8	10	14	17	Unit
- Kendaraan Roda Empat	238.419	258.031	385.009	453.116	563.040	Unit/Tahun
- Jumlah Orang Melalui Dermaga	64.39	77.302	82.673	90.578	122.034	Orang/Tahun

Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

Akses pelayanan transportasi sungai pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut jumlah kendaraan roda empat yang terangkut kapal ferry meningkat 42,3%. Selain itu, jumlah orang melalui angkutan penyeberangan sungai juga mengalami peningkatan lebih dari 17% setiap tahunnya. Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kapal ferry yang beroperasi, mencapai lebih dari 140% pada periode yang sama.

**Tabel 2. 28**  
**Penyelenggaraan Layanan Transportasi Laut**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No.	Transportasi Laut	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	9	9	9	9	9	Unit
2.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Tiba	687.407	456.539	209.854	223.305	256.425	orang
3.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Berangkat	613.991	375.124	193.981	229.755	249.352	orang
4.	Jumlah Barang yang dibongkar	241.782.957	74.390.526	368.562.664	305.323.205	354.236.245	ton

5.	Jumlah Barang yang dimuat	1.475.126.290	751.434.882	2.261.812.201	2.127.509.901	1.968.235.146	ton
----	---------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-----

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*, 2018

Ketersediaan prasarana perhubungan laut sudah cukup baik. Meskipun jumlah pelabuhan laut mengalami stagnasi pada periode 2013-2017, namun upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pembangunan 4 pelabuhan laut baru yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019/2020 yaitu Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Mantaritip. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

**Tabel 2. 29**  
**Penyelenggaraan Layanan Transportasi Udara di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Transportasi Udara</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Satuan</b>
1). Jumlah Pelabuhan Udara	11	11	11	11	13	Unit
- Internasional	1	1	1	1	1	Unit
- Lokal	10	10	10	10	6	Unit
2). Jumlah penumpang Pesawat udara Tiba	3.642.539	3.791.629	3.945.625	4.025.784	4.216.892	orang
3). Jumlah Barang yang dibongkar Melalui Bandara	1.469.234	1.606.160	1.510.462	1.585.985	1.628.354	Ton
4). Jumlah penumpang Pesawat udara Berangkat	3.593.269	3.955.136	288.923	303.369	356.214	orang
5). Jumlah Barang yang dimuat Melalui Bandara	635.89	1.647.089	869.825	913.316	1.021.536	Ton
6). Jumlah Maskapai	7	7	7	7	7	Unit
7). Jumlah Kecamatan yang belum terakses Sarana dan Prasarana Transportasi Udara	3	3	3	1	1	Kecamatan

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*, 2018

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang terletak di Kota Balikpapan. Bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Penyelenggaraan layanan tersebut dioperasionalkan oleh 7 maskapai.

Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% pada periode 2013-2017. Pada periode tersebut, jumlah barang yang dibongkar meningkat lebih dari 10%. Selain itu, jumlah barang yang dimuat melalui bandara meningkat signifikan mencapai lebih dari 100% pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di tiga kecamatan yaitu Data Dawai, Long Apung dan Long Bawan. Meskipun akhirnya dua kecamatan yang disebutkan terakhir menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, rencana pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu telah diselesaikan. Studi kelayakan dan lingkungan untuk pembangunan bandara perintis tersebut telah dilakukan yang kemudian implementasinya akan diteruskan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

#### **g. Komunikasi dan Informatika**

Masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai akses komunikasi dan informatika agar memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

**Tabel 2. 30**  
**Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016**

<b>Sarana Komunikasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Kantor Pos	73	Kantor
Menara Telekomunikasi	3	Unit
Stasiun Radio	178	Stasiun
Website Daerah	73	Unit
Jumlah Sarana Telekomunikasi	268	TV/Radio

*Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017*

Data ini mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dan informatika masih belum memadai di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dasar komunikasi dan informasi yang banyak belum tersedia hingga wilayah pedalaman sehingga membuat penduduk belum dapat mengakses layanan tersebut dan sistem informasi yang belum berjalan lancar.

#### **h. Penanaman Modal**

Penanaman modal merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan PDRB.

Investasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Jika dilihat dari realisasinya yang terus meningkat. Hal yang menjadi perhatian adalah

sektor yang memiliki daya pikat para investor baik dalam negeri dan luar negeri.

**Tabel 2. 31**  
**Realisasi PMDN dan PMA Per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

No	Sektor Usaha	PMDN (Rupiah)			PMA (\$ US)		
		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
<b>I</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>153</b>	<b>7.626.529.600.000</b>	<b>7.817</b>	<b>247</b>	<b>1.069.344.700</b>	<b>13.298</b>
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	90	2.886.876.900.000	6.278	104	159.353.800	4.405
2	Peternakan	1	-	-	7	1.214.000	18
3	Kehutanan	6	25.144.200.000	442	9	8.273.400	1.503
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-
5	Pertambangan	56	4.714.508.500.000	1.097	127	900.503.500	7.372
<b>II</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>94</b>	<b>906.355.300.000</b>	<b>876</b>	<b>144</b>	<b>111.444.700</b>	<b>1.411</b>
1	Industri Makanan	42	551.959.100.000	601	83	72.145.900	1.012
2	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	11	316.482.000.000	34	4	-	-
5	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	-	-	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	19	9.351.900.000	112	15	9.552.500	91
7	Industri Karet & Plastik	2	-	-	8	9.494.000	99
8	Industri Mineral Non Logam	6	748.300.000	-	15	16.586.100	120
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik	2	27.566.000.000	-	7	3.607.700	78
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-
11	Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	5	-	111	9	58.500	11
12	Industri Lainnya	7	248.000.000	18	3	-	-
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>110</b>	<b>2.447.331.500.000</b>	<b>543</b>	<b>175</b>	<b>104.425.800</b>	<b>799</b>
1	Listrik, Gas dan Air	27	2.297.726.200.000	248	36	21.413.400	214
2	Konstruksi	-	-	-	-	-	-

No	Sektor Usaha	PMDN (Rupiah)			PMA (\$ US)		
		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
		5	375.300.000		6		
3	Perdagangan & Reparasi	37	136.787.700.000	175	53	13.289.100	261
4	Hotel & Restoran	10	530.000.000	8	23	704.800	26
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	14	4.322.200.000	9	19	67.399.200	253
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	9	2.850.000.000	5	26	1.115.400	4
7	Jasa Lainnya	8	4.740.100.000	98	12	503.900	41
<b>Total</b>		<b>357</b>	<b>10.980.216.400.000</b>	<b>9.236</b>	<b>566</b>	<b>\$ 1.285.215.200</b>	<b>15.508</b>

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Nilai investasi sektor sekunder dan tersier baik PMDN ataupun PMA belum optimal. Sektor primer merupakan kontributor terbesar. Besaran proporsi nilai investasi sektor sekunder terhadap total nilai investasi sebesar 8,25 % untuk PMDN dan 8,67 % untuk PMA. Sub-sektor industri makanan yang berperan banyak dalam menyumbang nilai investasi di sektor sekunder. Proporsi nilai investasi tersier hanya menyumbang 22,29 % untuk PMDN dan 8,13 % untuk PMA. Sektor listrik, gas, dan air menyumbang nilai PMDN terbesar sedangkan transportasi, gudang, dan komunikasi untuk PMA. Belum optimalnya nilai investasi kedua sektor tersebut dikarenakan masalah promosi investasi pada sektor sekunder dan tersier belum optimal dan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja trampil. Penyebab tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyebab indikatif dibawahnya. Promosi yang kurang dipengaruhi oleh masih kurangnya ketersediaan informasi detail peluang investasi.

Selain permasalahan nilai investasi yang sudah berjalan, pemanfaatan potensi kawasan strategis ekonomi belum digunakan. Oleh karena itu, kawasan strategis ekonomi belum memberikan kontribusi yang signifikan. Terdapat 8 kawasan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kawasan industri manufaktur terdapat di wilayah Kariangau dan Buluminung di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Untuk kawasan industri perdagangan dan jasa berada di Samarinda.

Kawasan industri petrokimia berbasis migas dan kondensat dipusatkan di Bontang dan Kutai Kartanegara. Kawasan industri oleochemical dikembangkan di Maloy Kutai Timur. Kawasan industri pertanian ditumpukan di daerah Paser dan PPU, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan di Mahakam Ulu. Terakhir, kawasan agropolitan regional dipusatkan di Kutai Timur.

Belum optimalnya kontribusi kawasan strategis disebabkan oleh beberapa penyebab indikatif. Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan di beberapa kawasan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung. Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi juga belum dilakukan secara optimal. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : (1) Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih kurang; (2) Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor; (3) Komitmen pemerintah pusat terkait kelanjutan pendanaan; (4) Evaluasi ijin yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan; dan (5) Rendahnya akses infrastruktur menuju pusat industri.

### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari berbagai urusan seperti kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata dan berbagai sektor potensial lain yang berparuh terhadap berbagai indikator makro daerah. Urusan pilihan menjadi sektor pengungkit yang sangat potensial dan menjadi *leading* sektor di beberapa daerah. Berikut adalah beberapa sektor yang masuk kedalam urusan pemerintahan pilihan Provinsi Kalimantan Timur:

#### ***a. Kelautan Dan Perikanan***

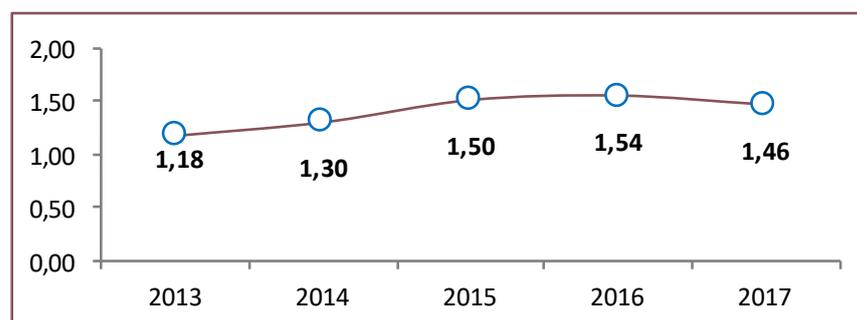
Pada umumnya terdapat dua indikator besar untuk melihat perkembangan kinerja sektor kelautan dan perikanan, yaitu kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan produksi perikanan. Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB berdampak pada peningkatan nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan. Berikut adalah data yang

memuat capaian kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Timur:

### 1) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Data mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB menjadi indikator untuk menilai kemajuan perikanan pada suatu daerah. Indikator ini menjadi indikator makro yang dipengaruhi oleh produksi perikanan dan berbagai faktor determinan lainnya. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2016:

**Gambar 2. 21**  
**Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017*

Kontribusi sub sektor perikanan tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan tren kenaikan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,46%. Beberapa penyebab masalah indikatif yang sering dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani, pembudidaya ikan atau nelayan dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki untuk menangkap serta mengembangbiakan ikan.

### 2) Produksi Perikanan

Produksi perikanan berpengaruh pada capaian kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. Data mengenai produksi digunakan untuk melihat potensi perikanan dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya. Berdasarkan sub-sektor perikanan, produksi dibagi menjadi produksi perikanan laut, darat, umum, tambak, kolam, keramba,

sawah dan budidaya pantai/laut. Berikut adalah data yang memuat produksi perikanan menurut sub-sektor di dalamnya:

**Tabel 2. 32**  
**Produksi Perikanan (ton) Menurut Sub Sektor Perikanan**  
**di Provinsi Kalimantan Timur**

Jenis Sub-Sektor Perikanan	2012	2013	2014	2015	2016
Perikanan Laut	105.392,30	94.679,00	96.850,50	104.622,30	104.622,30
Perikanan Darat					
Perairan umum	105.392,30	94.679,00	96.850,50	40.557,90	41.462,30
Tambak	105.392,30	94.679,00	96.850,50	38.165,50	55.578,90
Kolam	105.392,30	94.679,00	96.850,50	2.694,20	2.859,90
Keramba	696.940,80	667.316,40	712.355,60	802.292,40	35 503,10
Sawah	555,30	203,10	14.463,20	6.441,60	1,50
Budidaya Pantai/ Laut	164.378,70	25.487,00	23.394,60	73.703,10	5 521,60

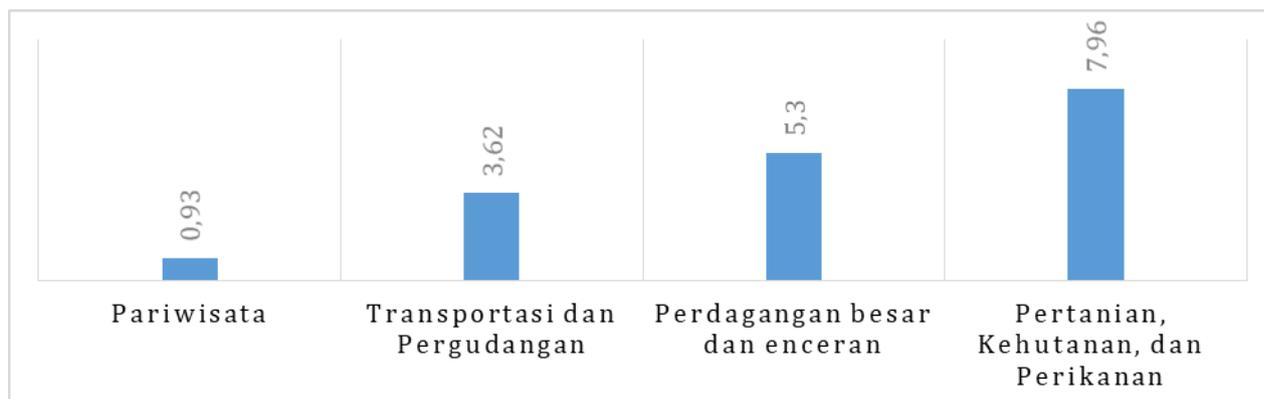
*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, 2016*

Pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah produksi perikanan. Penurunan terbesar terjadi pada sub-sektor budidaya pantai/laut sebesar 84,5% dan perairan umum, tambak dan kolam, masing-masing sebesar 10,2%. Pada tahun 2013 hingga 2013 peningkatan terbesar pada sub-sektor perikanan sawah dan keramba. Periode selanjutnya, yaitu tahun 2014-2015 kenaikan terbesar terjadi pada sub-sektor budidaya pantai yang selanjutnya disusul oleh peningkatan sebesar 45,6% pada sub-sektor perikanan tambak pada tahun 2015 hingga 2016.

#### **b. Pariwisata**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian daerah. Salah satu indikator dalam menilai sejauh mana perkembangan sektor pariwisata atau kontribusinya terhadap perekonomian daerah adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Hal ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2. 22**  
**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2017**



Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya kontribusi sector pariwisata dibandingkan sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah kunjungan wisatawan menjadi penyebab bagi belum optimalnya PDRB sektor pariwisata.

**Tabel 2. 33**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2017 (orang)**

Jenis wisatawan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mancanegara	24.410	29.768	28.273	32.973	53.257	49.285	45.211	58.869
Nusantara	1.174.626	1.564.013	1.667.467	1.926.769	3.914.769	4.320.025	3.324.294	7.185.790

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017 dan <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara cenderung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2010 hingga 2017. Pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan wisatawan sebesar 33,1%. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun selanjutnya, pada tahun 2011-2012 terjadi peningkatan sebesar 6,6%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 hingga 2017, yaitu sebesar 116,15%. Pada sisi lain, kunjungan wisatawan mancanegara terbesar terjadi pada tahun 2013 hingga 2014, yaitu sebesar 61,5%. Penurunan tertajam berada pada tahun 2014-2015 sebesar 7,5%.

### **c. Pertanian**

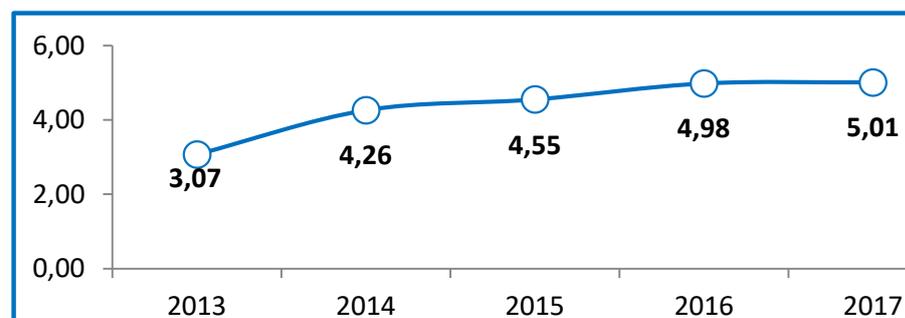
Pertanian tidak hanya terkait peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, namun juga terkait kesejahteraan

petani yang dinilai dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub-sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Masing-masing sub-sektor memiliki indikator yang berbeda untuk menilai kinerja pengembangannya. Berikut adalah kumpulan dari berbagai data terkait pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur:

### 1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kinerja sektor pertanian dapat dinilai menggunakan indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi pertanian, maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanian dapat dibagi menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan sayur-sayuran. Berikut adalah gambaran mengenai kondisi pertanian di Provinsi Kalimantan Timur:

**Gambar 2. 23**  
**Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengalami kenaikan mulai tahun 2013 hingga 2017. Sub sektor perkebunan menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB sehingga kontribusi sektor pertanian meningkat setiap tahunnya.

### 2) Produksi Padi

Salah satu komoditas utama tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi. Saat ini, produksi beras dari dalam (lokal) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah. Oleh karena itu,

swasembada pangan dalam hal ini beras belum terwujud. Berikut adalah rasio pemenuhan beras lokal tahun 2015-2017:

**Tabel 2. 34**  
**Rasio Pemenuhan Beras Lokal Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (%)**

Tahun	2015	2016	2017
Rasio Pemenuhan Beras Lokal	66,87	48,07	61,54

*Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Besaran rasio pemenuhan beras lokal kurang dari 100% menunjukkan produksi beras dalam daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pangan daerah. Guna memenuhi kebutuhan konsumsi beras, diperlukan pasokan beras dari luar daerah seperti Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Swasembada beras belum terjadi disebabkan karena masih rendahnya produksi padi dalam daerah. Berikut adalah data tentang produktivitas padi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2017:

**Tabel 2. 35**  
**Produktivitas Padi (Ton) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2011-2017**

Jenis Produksi	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	42,70	42,55	41,20	38,00	37,79

*Sumber: SIDATA Prov. Kaltim*

Selama tahun 2013-2017 menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya luas tanam padi. Adapun jika dilihat dari daerahnya, penyumbang produksi padi terbesar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan terendah terdapat pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang sudah tidak mengandalkan perekonomiannya pada sektor agraris. Pada umumnya berbagai kota di Kalimantan Timur sudah mulai beralih pada sektor perdagangan dan jasa yang memerlukan pembangunan berbagai pusat perdagangan, sehingga lahan sawah menjadi terbatas. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan

produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur per Kabupaten/Kota tahun 2015 :

**Tabel 2. 36**  
**Konsumsi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2016**  
**(Kg/Kap/Th)**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Konsumsi Beras	86,5	84,1

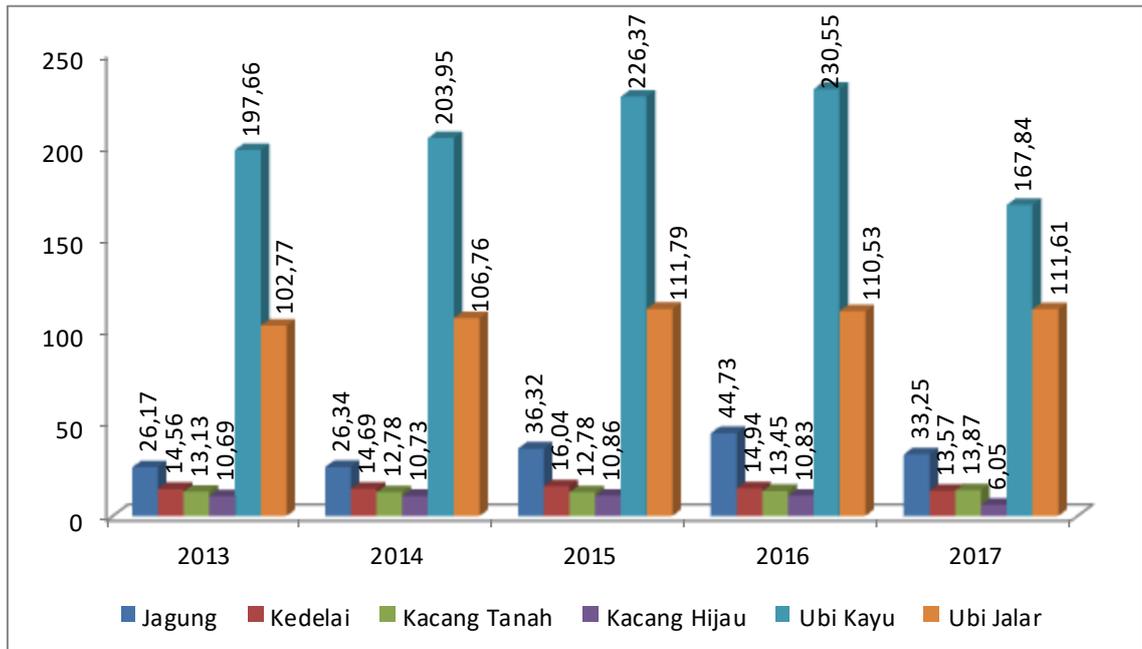
*Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2017*

Konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi walaupun rendah jika dibandingkan nasional sebesar 150 kg/kap/th. Meskipun demikian pasokan produksi beras lokal hanya dikisaran 60%, 40% lainnya didatangkan dari luar. Penyebab indikator diversifikasi pangan belum optimal karena teknologi diversifikasi pangan (beras) yang digunakan masih belum optimal dan pelaksanaan promosi pangan non beras belum optimal.

### **3) Palawija**

Produksi palawija terbesar disumbang oleh komoditas ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan produksi palawija yang terendah terdapat pada kacang hijau. Besarnya produksi ubi kayu berpotensi memberi peningkatan ketahanan pangan dalam daerah, jika optimalkan dengan baik. Pengembangan produksi ubi kayu juga harus diikuti oleh penguatan kapasitas petani, salah satunya adalah perbaikan metode budidaya untuk menjangkau pangsa pasar regional.

**Gambar 2. 24**  
**Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)**



Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id)

#### 4) Perkebunan

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja sub-sektor perkebunan adalah produktivitas hasil perkebunan. Saat ini, produktivitas perkebunan rakyat termasuk dalam kategori rendah. Definisi dari perkebunan rakyat adalah bukan perkebunan plasma dan perkebunan kemitraan melainkan perkebunan tanam mandiri.

**Tabel 2. 37**  
**Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ton/Ha)**

Jenis Tanaman Perkebunan	2017
Sawit	16,6
Karet	1,275
Kakao	0,501
Kelapa Dalam	0,82
Lada	0,985

Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2017

Produktivitas komoditi perkebunan belum optimal karena beberapa penyebab indikatif, seperti masih banyak komoditi tanaman

rusak yang tidak digunakan kembali. Pada tahun 2017 luas lahan komoditi tanaman rusak mencapai 28.260 Ha untuk sawit; 3.659 Ha untuk karet; 996 Ha untuk Kakao; 2.954 Ha untuk kelapa dalam; dan 666 Ha untuk lada. Selain itu banyak lahan yang belum menghasilkan komoditi.

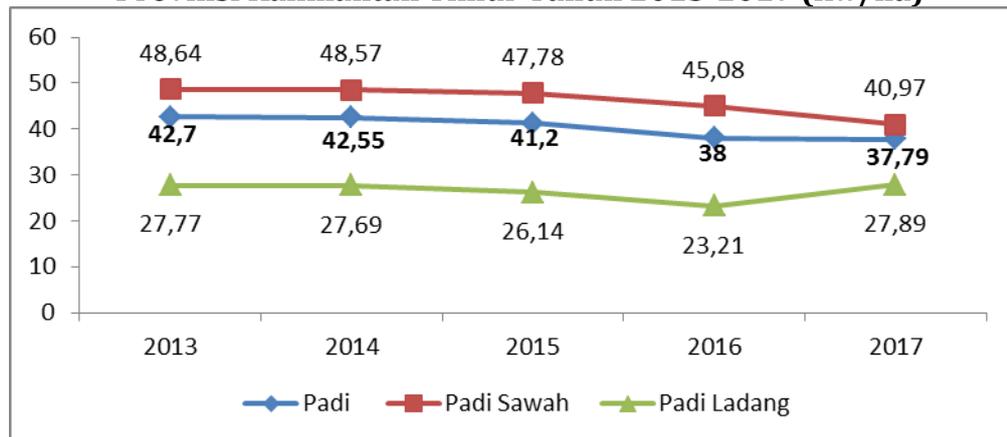
Penyebab produktivitas perkebunan rakyat masih rendah lainnya adalah ketersediaan benih unggul masih kurang. Pada Tahun 2016, UPTD PBP mensertifikasi terdiri 1,67 juta bibit dan 1,39 juta kecambah kelapa sawit, kakao 108 ribu bibit, aren 58 ribu kecambah dan 9.000 bibit, lada 161 ribu bibit lada serta 47 ribu stek. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 19 pengedar benih resmi selainnya benih didatangkan dari luar. Guna memenuhi ketersediaan benih unggul tahun 2018 melalui APBN akan dibangun kebun induk lada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Berau masing-masing luas satu hektar.

Terdapat permasalahan lain pada sektor perkebunan, yaitu belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit). Hal ini menambah biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai.

#### **5) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar**

Produktivitas padi terkait dengan peningkatan produksi padi. Semakin besar produktivitas, maka semakin besar angka produksi padi. Produktivitas padi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi sawah, sedangkan yang terendah adalah padi ladang. Berikut adalah data mengenai produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 hingga 2015:

**Gambar 2. 25**  
**Perkembangan Tingkat Produktivitas Padi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)**



Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id)

Produktivitas padi mengalami tren yang cenderung menurun mulai tahun 2011 hingga 2015. Penurunan terbesar produktivitas padi terdapat pada tahun 2011-2013. Pada periode tersebut, padi sawah mengalami penurunan sebesar 0,2%, sedangkan padi ladang mengalami penurunan sebesar 1,3%. Penurunan produktivitas ini terjadi karena beberapa sebab indikatif, salah satunya adalah alih fungsi lahan yang tinggi di wilayah perkotaan dan rendahnya kualitas pengelolaan padi pada masa tanam.

Pada bidang peternakan terdapat dua indikator utama yang mampu dijadikan pijakan untuk mengukur kinerja pengembangan sektor peternakan. Kedua indikator tersebut adalah populasi ternak dan produksi hasil ternak. Berikut adalah berbagai data mengenai dua jenis indikator tersebut.

## 6) Produksi Hasil Ternak

Produksi daging ternak merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja peternakan. Indikator ini sebenarnya juga berkorelasi dengan cadangan pangan daging dalam daerah. Produksi daging sangat dibutuhkan untuk mencukupi konsumsi nutrisi masyarakat. Di sisi lain, produksi daging juga berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian dan laju inflasi. Semakin tinggi produksi daging maka semakin besar PDRB sektor pertanian dan potensi inflasi di sektor pangan dapat

ditekan. Berikut adalah data mengenai produksi daging ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017:

**Tabel 2. 38**  
**Produksi Daging Ternak (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi Potong	8.737,95	8.606,64	8.811,72	9.129,40	8.043,36	8.241,26
Kerbau	262,31	50,06	63,98	36,98	45,23	58,17
Kambing	569,08	507,09	563,68	441,36	504,23	584,79
Domba	5,04	4,18	2,29	1,42	1,14	0,96
Babi	1.271,94	1.281,05	1.449,35	1.009,38	934,38	831,31

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Sejalan dengan populasi sapi yang besar di Kalimantan Timur, produksi daging sapi potong menjadi yang terbanyak. Walaupun produksi daging tersebut mengalami tren yang fluktuatif. Produksi daging sapi terbesar terdapat pada tahun 2015. Pertumbuhan produksi daging sapi tahun 2014-2015 sebesar 3,6%. Produksi daging babi menjadi komoditas nomor dua setelah sapi. Produksi daging babi terbesar berada pada tahun 2014, dengan laju peningkatan pertumbuhan saat itu mencapai 13,1%. Daging domba menjadi komoditas produksi paling kecil. Hal ini terjadi karena beberapa sebab indikatif, seperti rendahnya populasi domba di Kalimantan Timur.

Selain produksi daging, produksi telur dan susu juga menjadi indikator yang harus diperhatikan. Sama dengan daging, indikator mengenai produksi telur dan susu berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan peternakan. Indikator ini menopang kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Berikut adalah data mengenai produksi telur dan susu di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2. 39**  
**Produksi Telur dan Susu (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

Jenis Produksi Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ayam petelur	9.992,80	11.984,00	5.291,20	7.541,20	6.493,20	6.341,72
Ayam kampung	3.253,00	3.253,00	2.745,90	2.921,60	3.054,20	3.470,28
Itik	866,80	824,40	1.195,60	1.191,30	1.056,90	1.203,12
Susu	-	73,44	117,81	125,46	148.410	163.710

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Produksi telur terbanyak terdapat di ayam petelur. Pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 19,9%. Peningkatan laju produksi tertinggi terdapat pada tahun 2014-2015, setelah terjadi penurunan produksi telur yang sangat signifikan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Ayam kampung dan itik menjadi unggas yang menyumbang produksi telur kedua dan ketiga. Produksi telur masih berpotensi untuk ditingkatkan. Perbaikan metode budidaya diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi telur tersebut.

**Tabel 2. 40**  
**Produksi Daging Unggas (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ayam Kampung	5.222,60	5.637,60	4.758,70	5.042,60	5.271,60	5.989,69
Ayam Petelur	583,20	699,50	308,80	435,90	379,80	n/a
Ayam Pedaging	34.437,50	41.799,40	43.644,20	53.859,80	56.531,60	61.669,1
Itik/ Itik Manila	65,90	62,70	95,10	95,50	79,50	114,12

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Ayam pedaging menjadi penyumbang terbesar bagi produksi daging unggas di Kalimantan Timur. Produksi tertinggi berada pada tahun 2017, sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012. Komoditas kedua yang menyumbang produksi daging unggas terbesar adalah ayam kampung dan ayam petelur. Produksi daging ayam kampung terbesar berada pada tahun 2017, sedangkan ayam petelur berada pada tahun yang sama (2013). Metode budidaya dan jenis bibit ternak unggas menjadi faktor indikatif yang berpengaruh terhadap produksi daging unggas di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **d. Kehutanan**

Potensi hutan lindung di Kalimantan Timur harus dikelola dengan bijaksana, khususnya yang masih dimungkinkan untuk dipertahankan agar

fungsi kesehatan ekosistem hutan dan sebagai penyangga kawasan dapat tetap dipertahankan.

**Tabel 2. 41**  
**Kondisi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur**

Kawasan Hutan	43. kawasan hutan lindung 1,845 juta hektar 44. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 438, 3 ribu hektar 45. hutan produksi (hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi) sebesar 6,061 juta hektar.
Kabupaten Mahakam Ulu memiliki hutan lindung terluas dibandingkan wilayah lainnya diikuti Berau dan Kutai Timur.	
Potensi jasa lingkungan	Harus mulai dikembangkan sebagai salah satu pola pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus mampu menjadi potensi konservasi dan pertahanan daya dukung lingkungan seluruh wilayah provinsi Kalimantan Timur.

*Sumber: Buku putih Provinsi Kalimantan Timur*

Sektor kehutanan memiliki dua indikator besar. Indikator pertama adalah indikator yang berhubungan dengan produksi, sedangkan yang kedua berhubungan dengan konservasi. Pada sisi produksi kehutanan memiliki indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ditopang oleh indikator produksi hasil hutan, baik kayu ataupun non-kayu. Indikator konservasi yang umumnya digunakan berhubungan untuk menekan laju kerusakan hutan. Berikut adalah beberapa data terkait pengembangan kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur:

### **1) Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**

PDRB sektor kehutanan dipengaruhi oleh tingkat produksi hasil hutan. Semakin besar produksi hasil hutan, maka potensi peningkatan PDRB sektor kehutanan dapat tercapai. Pada tahun 2013 hingga 2017 PDRB sektor kehutanan masih menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif. Berikut adalah data yang terkait kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017:

**Tabel 2. 42**  
**Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)**  
**Provinsi Kalimantan Timur 2013-2016**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15

*Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017*

PDRB sektor kehutanan mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2016. Kontribusi PDRB terbesar terdapat pada tahun 2017. Pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan kontribusi PDRB sebesar 0,05%. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan tersebut juga terjadi pada periode 2014-2015 dan 2015-2016, yaitu masing-masing sebesar 0,17% dan 0,01%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 0,19%. Peningkatan kontribusi ini masih mungkin untuk dijalankan, namun tetap berpijak pada aspek pembangunan yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan sektor lain, kontribusi sektor kehutanan relatif lebih rendah. Kondisi ini terjadi karena dua masalah, yaitu:

**a) Kawasan hutan produksi belum dikelola dengan arif dan efisien**

Pengelolaan hutan produksi berpengaruh langsung kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan ini harus dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan agar aspek keberlanjutan pengelolaan hutan terjaga dengan baik. Berikut adalah data yang menunjukkan bahwa hutan produksi belum dikelola secara arif dan efisien:

**Tabel 2. 43**  
**Perbandingan Luas Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola di Provinsi Kalimantan Timur**

Luas Kawasan Hutan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kawasan Hutan Produksi	9.734.653	6.026.857	6.026.857	6.055.793	6.055.793
Luas Kawasan Hutan Produksi yang dikelola (2013 sd 2015 data kaltim-kaltara, 2016 sd 2017 kaltim)	7.544.327,61	7.544.327,61	7.544.327,61	5.039.327,61	5.039.327,61

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2018

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 1.016.465,39 ha, sedangkan pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.016.465,39 ha. Data ini menunjukkan bahwa hutan produksi belum dikelola secara efisien. Namun pernyataan ini masih bisa diperdebatkan karena ada kewajiban dalam sistem pengelolaan hutan produksi termasuk kewajiban sertifikasi dengan berbagai unsur yang mengikutinya. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Selain itu hutan produksi juga harus dikelola secara arif. Hasil hutan selama ini yang terus diharapkan adalah hasil hutan kayu, padahal pemanenan kayu kontradiktif dengan isu perubahan iklim dan *green economic*. Perlu perubahan orientasi terhadap hasil-hasil hutan non-kayu, seperti ekstraktif tumbuhan obat, energi terbarukan, jasa lingkungan dan ekowisata.

Berdasarkan hasil FDG antara Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan mitra strategis dan UGM, kawasan hutan produksi belum dikelola dengan arif dan efisien karena belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. Hingga saat ini jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang menerapkan metode riil-C 7 unit dari jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang ada di Provinsi Kalimantan

Timur, yaitu 65 unit. Persoalan ini diperparah oleh masih rendahnya pengolahan hasil hutan kayu di dalam daerah.

**b) Ekspor bahan mentah masih dijalankan**

Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. Jika dikelola dengan baik, kayu log dapat diolah menjadi industri barang jadi seperti meubeler dan lain sebagainya. Berikut adalah data tentang jumlah ekspor bahan mentah kayu yang mendukung pernyataan tersebut:

**Tabel 2. 44**  
**Jumlah Ekspor Bahan Mentah Kayu (m3)**

Indikator	Tahun	
	2016	2017
Jumlah kayu log bahan mentah yang keluar daerah (m3)	1.718.799,73	1.650.259,86

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2018*

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 1.718.799,73 m<sup>3</sup> kayu log bahan mentah yang diekspor ke luar daerah tanpa pengolahan, sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, sedangkan tahun 2017 jumlahnya menurun menjadi 1.650.259,86 m<sup>3</sup>. Walaupun mengalami penurunan, jumlah tersebut tergolong relatif besar. Berdasarkan hasil FDG, persoalan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur dan belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu.

Saat ini terdapat 131 unit industri pengolahan hasil hutan kayu di Provinsi Kalimantan Timur untuk kapasitas 2.000 m<sup>3</sup> s/d 6.000 m<sup>3</sup>, 65 unit untuk kapasitas < 2.000 m<sup>3</sup> dan 40 unit untuk kapasitas ≥ 6.000 m<sup>3</sup> (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2018). Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar pengolahan hasil hutan kayu lebih optimal, sehingga ekspor bahan hasil industri log kayu dapat ditingkatkan. Namun hingga saat ini regulasi yang berlaku belum bisa

mewajibkan stakeholder untuk mengolah hasil kayunya di Kalimantan Timur.

Pada sisi lain, industri hasil hutan selama ini hanya fokus pada hasil kayu. Padahal banyak sekali hasil hutan bahkan selama ini menjadi limbah, misalnya peluang mengembangkan Eucalyptol (minyak dari daun HTI Eucalyptus) yang selama ini justru hanya menjadi limbah di HTI di Kalimantan Timur (belum dimanfaatkan). HTI Eucalyptus setiap tahunnya dipanen seluas sekitar 15.000 ha.

**c) Akses masyarakat di sekitar kawasan hutan belum memadai dalam mendukung pengelolaan hutan lestari (perhutanan sosial)**

Berdasarkan hasil FGD kurang memadainya akses masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari menjadi penyebab bagi rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah. Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan menjadi akar masalah dari persoalan tersebut. Di sisi lain arela penanganan masing-masing SFM terlalu luas, sehingga diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.

**2) Kerusakan Kawasan Hutan**

Laju deforestasi dan degradasi hutan telah menyebabkan meningkatnya jumlah emisi di Kalimantan Timur. Deforestasi hutan di Kalimantan Timur rata-rata sebesar 70.039 Ha/tahun, dan degradasi hutan sebesar 16.236 Ha/tahun. Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit. Terdapat ijin HGU pada kawasan hutan seluas lebih dari 600.000 ha. Begitu juga ijin pinjam pakai pertambangan. Pemanfaatan hutan tanpa kendali menjadi kawasan perkebunan, pemukiman, infrastruktur, penambangan akan berdampak terhadap penurunan kapasitas penyerapan dan penyimpanan CO<sub>2</sub>, di samping juga akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan lainnya terutama menurunnya fungsi hidroorologis serta punahnya flora dan fauna.

Degradasi yang signifikan di Kalimantan Timur sebagian besar terkait dengan kegiatan penebangan di hutan alam (IUPHHK-HA) dari tahun 2006 sampai 2015, tingkat degradasi rata-rata yang disebabkan oleh penebangan di Kalimantan Timur adalah 65.395 Ha per tahun dengan 3.381 Ha per tahun lebih lanjut terdegradasi dalam perkebunan kelapa sawit. Selain masalah emisi, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penangkap air, sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wilayah tangkapan air. Hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air di berbagai daerah sebagai sumber mata air baku (Buku Putih Provinsi Kalimantan Timur).

**a) Kawasan hutan lindung belum berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan hidup serta memiliki keanekaragaman hayati yang makin tinggi**

Masalah tersebut disebabkan oleh penataan batas kawasan hutan lindung yang belum optimal. Beberapa temuan mengindikasikan bahwa beberapa pengukuran batas hutan lindung belum temu gelang. Penataan batas memang merupakan urusan Pusat, tetapi pengelolaan berada di pemerintah daerah. Usulan pemantapan kawasan berada di pemerintah daerah atau badan pengelola hutan lindung.

Selain itu persoalan kawasan hutan lindung belum berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan hidup disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Berikut adalah data mengenai luas hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2. 45**  
**Luas Hutan Lindung (ha) Tahun 2013 -2017 di Provinsi Kalimantan Timur**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Hutan Lindung (ha) (2013 Kepmenhut 79/2013, 2014 sd 2015 SK. Menhut 718/2014 dan 2016 sd 2017 PERDA 1 2016)	2.751.702	1.792.031	1.792.031	1.844.969	1.844.969

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur*

Luas hutan lindung mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2013 hingga 2017. Penurunan terbesar terdapat pada tahun 2013-2013. Diperlukan penegakan regulasi yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara efektif.

**b) Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar belum dapat ditangani dengan lebih sistematis**

Berdasarkan hasil FGD, belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian dan pengawasan hutan.

Jumlah kasus *illegal logging* mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017. Kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2016 hingga 2017. Merespon persoalan tersebut, kasus ini sudah mendapat tindak lanjut dengan dibentuknya Balai Penegakan Hukum (Balai Gakum) yang terpisah dari BKSDA.

**c) Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan belum tertangani melalui program reboisasi terus menerus**

Permasalahan belum tertanganinya kerusakan tanah pasca penebangan hutan melalui program reboisasi disebabkan oleh belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan. Berikut adalah data mengenai luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2. 46**  
**Luas Lahan Kritis (ha) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas lahan kritis	7.777.136,44	7.777.136,44	7.777.136,44	7.777.136,44	7.777.136,44

Sumber : PDAS & HL ,2018 untuk lahan kritis pengolahan data 5 tahun sekali

Luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur tergolong besar. Program reboisasi ini dijalankan melalui dana DBH DR. Terdapat berbagai skema rehabilitasi hutan dan lahan. Salah satunya dari

program Rehab DAS yang dilakukan oleh pemilik ijin pinjam pakai dan beberapa program rehabilitasi dalam skema perubahan iklim.

**d) Partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan belum maksimal mendukung pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari**

Berdasarkan hasil FGD, Persoalan belum maksimalnya partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mendukung pembentukan dan pengelolaan hutan lestari disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

**Tabel 2. 47**  
**Jumlah Perhutanan Lestari yang Sudah Dibentuk (unit)**

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah perhutanan lestari yang sudah dibentuk	-	-	-	5 HD, 1 HKm, 6 HTR, 3 Kemitraan	12 HD, 1 HKm, 2 HTR, 2 Kemitraan, 1 Hutan Adat	HD 19 ijin, HKm 2 ijin, HTR 8 ijin, Kemitraan 3 ijin dan Hutan Adat 1

*Sumber : Dinas Kehutanan, 2018*

Jumlah perhutanan lestari yang dibentuk menunjukkan tren yang semakin baik. Namun tetap diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat secara maksimal untuk menurunkan kerusakan kawasan hutan yang semakin besar.

**e. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang cukup besar di bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, penggambaran kinerja bidang urusan ESDM akan merefleksikan beberapa ukuran yang variatif. Beberapa bidang yang menjadi acuan meliputi dalam RPJMD periode ini adalah bidang ketenagalistrikan, pertambangan dan sumber daya mineral.

**1) Ketenagalistrikan**

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri.

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Hasil suvey lapangan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan bahwa akses ketenagalistrikan belum memadai. Pada tahun 2015, sebagian besar masyarakat mengakses listrik non-PLN, mencapai 64% dari total keluarga. Hanya 12,16% keluarga yang telah mengakses listrik PLN dan 13,84% belum memiliki akses listrik. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,07%. Capaian tersebut belum optimal mengingat capaian nasional mencapai 92,75% pada tahun yang sama.

**Tabel 2. 48**  
**Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio elektrifikasi	75,06	75,9	76,59	79,67	84,07
Rasio desa berlistrik	90,22	93,9	96,6	96,82	97,01

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Kualitas instalasi listrik non-PLN yang terpasang belum optimal karena belum sesuai dengan standar kenyamanan. Rata-rata listrik non-PLN hanya beroperasi selama 6 jam setiap harinya. Daya listrik non-PLN yang dialirkan berasal dari PLTS, PLTD, PLTU dan PLTG. Hal tersebut berarti cakupan layanan ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut disebabkan oleh penyediaan listrik di wilayah 3T belum maksimal dan belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

## **2) Pertambangan**

Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Namun sektor ini tidak

menjadi perhatian utama, karena konsep pembangunan yang diusung dalam RPJMD adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor non-tambang. Berikut adalah kondisi sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2. 49**  
**Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertambangan						
1. Bahan Tambang						
A. Total Produksi Minyak Bumi	39.001.739	35.205.350	36.605.800	34.323.800	29.754.180	Barel
B. Total Produksi Gas Alam	711.516.656	605.579.007	609.744.520	568.588.800	449.579.200	MMBTU
C. Batubara						
1. Produksi	256.910.421,87	253.227.752,56	236.613.732,47	218.196.784,74	247.302.813,65	Ton
a. PKP2B	172.437.475,66	171.972.467,95	162.078.297,31	145.095.068,28	161.961.153,28	Ton
b. KP/IUP	82.936.745,16	81.215.397,09	75.000.990,56	72.052.946,99	86.101.658,68	Ton
2. Jumlah Perusahaan	1.223	1.223	1.107	1.172	1.417	Izin
2. Industri						
1. Total Produksi LNG	23.904.326	22.244.537	n/a	n/a	n/a	M3
2. Total Produksi Propane	419.744	368.23	n/a	n/a	n/a	M3
3. Total Produksi Butane	393.264	364.29	n/a	n/a	n/a	M3
3. Reklamasi Lahan Tambang						
1. Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	39,29	42,90	45,03	40,85	47,19	%
4. Reklamasi Batu Bara	43.097,97	47.057,85	49.394,29	44.809,17	98.702,47	Ha
5. Pertambangan Tanpa Izin						
1). Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	0	0	0	0	30,20	Ha
2). Luas area penambangan yang liar	0	0	0	0	37,97	Ha

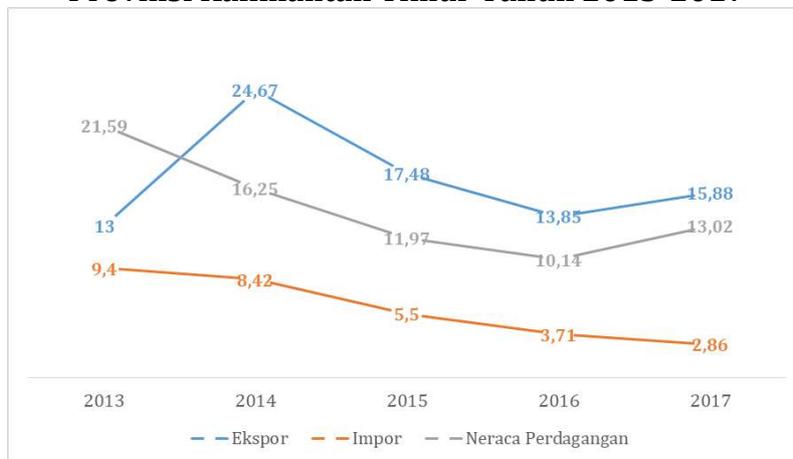
Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

Geliat industri ekstraktif di Provinsi Kalimantan Timur mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat terindikasi dari penurunan tingkat produksi beberapa sektor pertambangan. Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama pertambangan mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga pasar dunia beberapa produk pertambangan sehingga berakibat pada lesunya aktivitas pertambangan di daerah.

**f. Perdagangan**

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Besaran indikator tersebut didapat dari perbedaan antara nilai ekspor dan impor di suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai neraca bersifat positif jika terjadi surplus perdagangan yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Nilai neraca bersifat negatif jika terjadi defisit perdagangan yaitu nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor.

**Gambar 2. 26**  
**Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

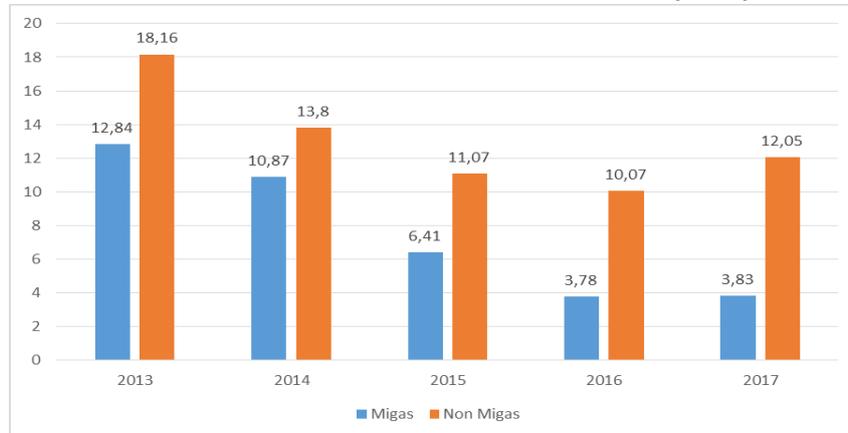


Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017; BPS, 2017

Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai

impor. Sementara dilihat dari tern pertumbuhan mengalami surplus perdagangan. Kenaikan nilai surplus perdagangan dikarenakan adanya peningkatan pada nilai ekspor dan penurunan nilai impor.

**Gambar 2. 27**  
**Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (US \$)**



*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar 1.98 persen. Peningkatan nilai ekspor ini disebabkan karena terjadi peningkatan nilai ekspor migas maupun non migas. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari golongan produk mineral.

**Gambar 2. 28**  
**Nilai Impor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (US \$)**

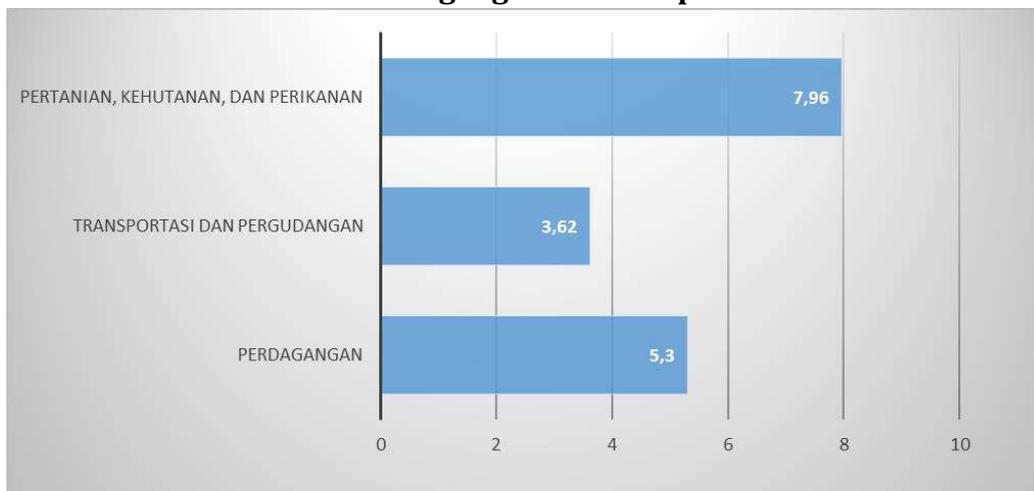


*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu lebih besar dari non migas.

Indikator lain untuk melihat perkembangan sector perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Berikut ini data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2017.

**Gambar 2. 29**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2017**



*Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih kecil dibandingkan dengan sektor lain seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun demikian, kontribusi sektor perdagangan masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

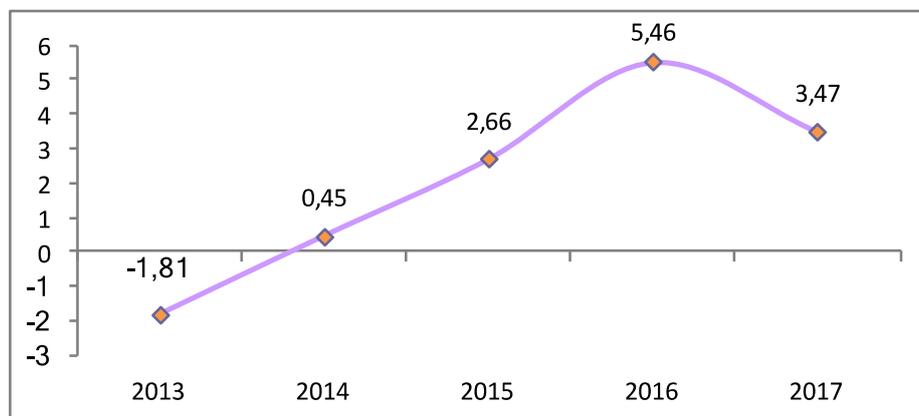
Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk, sehingga masih perlu ditingkatkan dan masih terbatasnya pasar produk (pasar tradisional dan pasar non tradisional). Hal ini dapat dilihat dari

data capaian kinerja sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang diwakili dua program dengan tiga indikator, yaitu nilai transaksi kerjasama pemasaran (Rp), jumlah pelaku usaha dalam kerjasama pemasaran (unit UKM), nilai ekspor produk olahan non-migas dan non-batubara (milyar US \$), masih mempunyai capaian di bawah 50% dan termasuk kriteria *off-track* pada tahun 2018 (Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018). Persoalan ini mengindikasikan bahwa daya saing produk dan terbatasnya pasar produk membuat capaian di sector perdagangan belum berjalan optimal. Penyebab daya saing produk belum optimal karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal. Sementara persoalan keterbatasan pasar produk disebabkan karena belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

#### ***g. Perindustrian***

Sektor industri merupakan sektor kedua penyumbang terbesar dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Sektor tersebut potensial untuk dikembangkan dalam rangka menunjang perekonomian daerah dari sektor non-tambang. Berikut ini Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.

**Gambar 2. 30**  
**Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**  
**Berdasarkan Harga Konstan (Seri 2010) Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

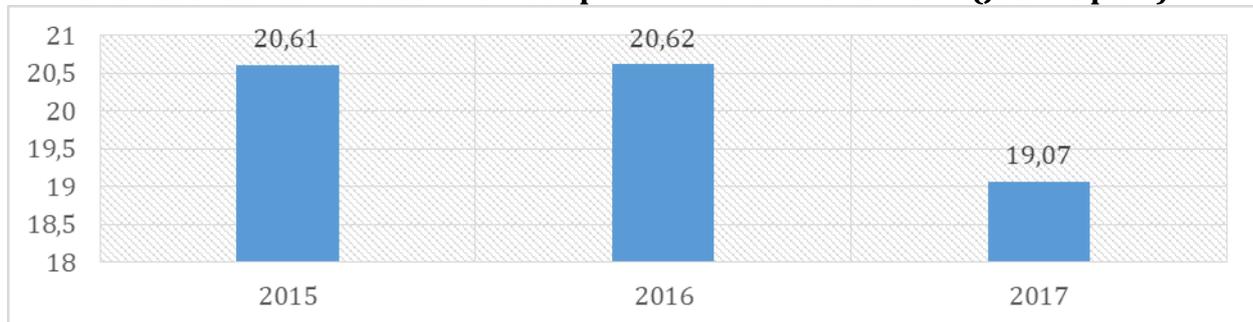


*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

Pertumbuhan sektor perindustrian menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata pertumbuhan sektor tersebut selama tahun 2013-2017 adalah 2,85

persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan masih dapat dikembangkan. Meskipun demikian, masih ada persoalan pada sector ini yaitu terkait dengan kontribusinya terhadap PDRB yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2. 31**  
**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)**



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Kurun waktu 3 (tiga) tahun (2015-2017), kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan tersebut sebesar 1.55 persen dari sebelumnya sebesar 20.62 persen menjadi 19.07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan menengah.

**Tabel 2. 50**  
**Jumlah IKM yang Berorientasi Industri dan Volume Usaha Kawasan Industri Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Unit)**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	3	7	20	1	15
Volume Usaha Kawasan Industri	1.60	127.97	93.00	93.00	Tidak dijalankan

Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/365>; Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Jumlah IKM yang berorientasi ekspor mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jumlah IKM yang berorientasi ekspor terbanyak terdapat pada

tahun 2015 yaitu sebanyak 20 unit, kemudian menurun secara drastis. Tinggal 1 unit IKM yang berorientasi ekspor pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yaitu menjadi 15 unit. Meskipun demikian jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Sementara volume usaha Kawasan industri mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung stagnan bahkan tidak dijalankan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan menengah belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu lambatnya pertumbuhan investasi IKM, belum terkoneksinya lulusan SMA/SMK dengan industri, dan integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum optimal. Guna meningkatkan kontribusi sektor industri terutama industri menengah dan kecil maka ada beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Berikut ini beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan.

**Tabel 2. 51**  
**Komoditas Produk Unggulan Industri Menengah Besar Kalimantan Timur**

No.	Komoditas	Lokasi
1.	Kayu Lapis ( plywood ), Mdf	Samarinda, Balikpapan, PPU, Kukar
2.	Udang Beku	Balikpapan, Kukar
3.	Ind. Pengolahan kayu/sawmill	Samarinda, Balikpapan, Kukar, Berau, Paser, Kutim
4.	Crude Palm Oil	Kutai, Paser, Kutim
5.	Galangan Kapal	Kukar, Paser, Samarinda, Balikpapan
6.	Pupuk urea & Amoniak	Bontang
7.	Moulding	Samarinda, Balikpapan, Kukar
8.	Gas Methanol	Bulungan
9.	Methanol	Bontang
10.	Hexamethylene Tetramine	Bontang
11.	Melamine	Bontang
12.	Ind. Lem	Samarinda, Bontang
13.	Ind. Minyak Kelapa	Penajam Paser Utara
14.	Pulp	Berau
15.	Bengkel Service	Samarinda, Balikpapan, Kubar, Kukar
16.	Ind. Pengolahan Rotan	Paser, Balikpapan
17.	Kulit Buaya	Balikpapan
18.	Kain Tenun Ulap Doyo	Kutai Kartanegara
19.	Garmen	Balikpapan

*Sumber: Dinas Indakop Provinsi Kalimantan Timur, 2018.*

Berbagai komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu komoditas unggulan dan komoditas.

Komoditas unggulan yang mendominasi di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit. Selanjutnya komoditas fokus adalah komoditas yang dijadikan sebagai kandidat pengembangan berdasarkan penilaian yang dilakukan pada sub-kriteria dengan mempertimbangkan aspek keunggulan. Perbandingan tingkat kepentingan, penggabungan nilai keunggulan dan perbandingan berpasangan. Lima komoditas utama yang dapat dikembangkan secara prospektif dan potensial, yaitu Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.

**Tabel 2. 52**  
**Jumlah Unit Industri, Tenaga Kerja, Investasi Berdasarkan Jenis Industri**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2015**

Tahun	Total Industri			Industri Besar			Industri Kecil Menengah		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Juta Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Juta Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Juta Rp)
2013	9.427	120.106	8.846.061	136	63.181	6.504.213	9.291	56.925	2.341.848
2014	9.606	122.388	9.014.136	137	63.590	6.680.915	9.469	58.798	2.333.221
*2015	8.410	45.722	12.532.260	98	23.679	8.364.041	8.314	22.033	4.168.219

*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

Selama periode 2013-2015, pertumbuhan unit usaha industri menunjukkan penurunan. Investasi di sektor industri lebih besar diperoleh industri besar sebesar 8.364 miliar rupiah pada tahun 2015. Komoditas Utama pada industri besar mencakup industri karet, minyak, industri kayu, batu bara, dan kelapa sawit. Sentra industri kecil menengah tercatat hingga tahun 2015 terdapat 8.314 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 22.033 orang. Keadaan sentra industri kecil menengah ini masih didominasi oleh industri pangan.

### **2.3.3 Fokus Urusan Penunjang**

#### *2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan*

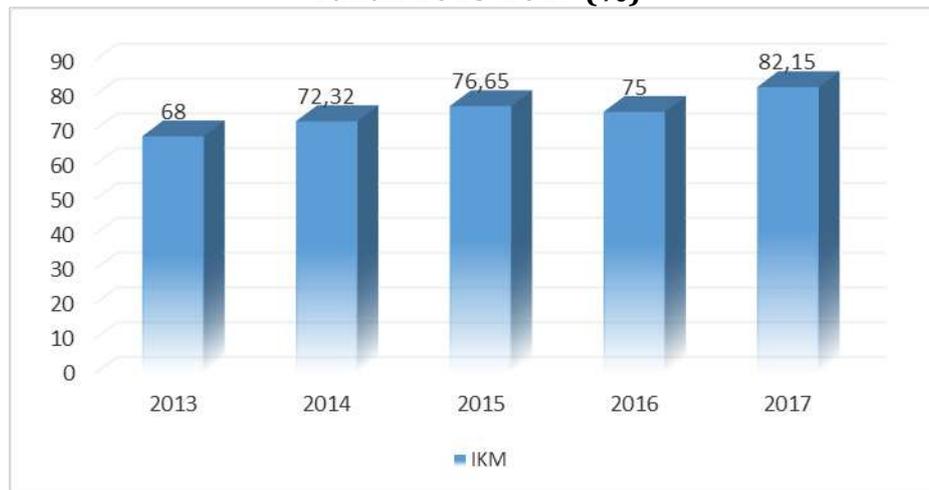
Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat melalui prestasi daerah dalam Anugerah Pangripta Nusantara (APN). APN merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan. Pemberian APN dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat terbaik kedua dalam APN untuk kategori provinsi.

Akan tetapi, pada tahun 2016 dan 2017, Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi menduduki peringkat kedua terbaik dalam APN, di mana hanya masuk dalam nominasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan mengalami penurunan. Hasil diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa persoalan ini disebabkan oleh adanya indikator perencanaan perangkat daerah yang belum konsisten terutama di tingkat kegiatan dan sub kegiatan.

### 2.3.3.2 Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Capaian IKM Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui Gambar di bawah ini:

**Gambar 2. 32**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (%)**



Sumber: RKPD 2016; Kinerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018.

IKM Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2013 hingga 2017 mengalami perkembangan yang cukup baik. Meskipun sempat terjadi penurunan angka IKM pada tahun 2016, IKM Provinsi Kalimantan Timur kembali meningkat pada tahun 2017. Artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Meskipun demikian, masih ada persoalan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan

kontrol terhadap kegiatan survai IKM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Saat ini, kontrol terhadap survai IKM belum berjalan optimal. Persoalan ini diindikasikan dengan masih adanya hasil survai yang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada OPD pengampu yaitu Bagian Organisasi Sekartariat Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum berjalannya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 (Sembilan) SPM, sementara di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 15 (lima belas) SPM. Namun, total SPM tersebut belum dijalankan secara optimal atau dengan kata lain SPM tersebut belum terealisasi. Persoalan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait SPM secara jelas dan menyeluruh. Selain itu, komitmen aparatur daerah untuk menjalankannya juga masih rendah. Namun, terkait dengan peraturan, saat ini telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum yang mengatur secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan pelaksanaan SPM. Oleh karena itu, kedepan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih mudah untuk menerapkan SPM di masing-masing daerah kabupaten/kota maupun internal instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### 2.3.3.3 Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 53**  
**Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2014-2017**

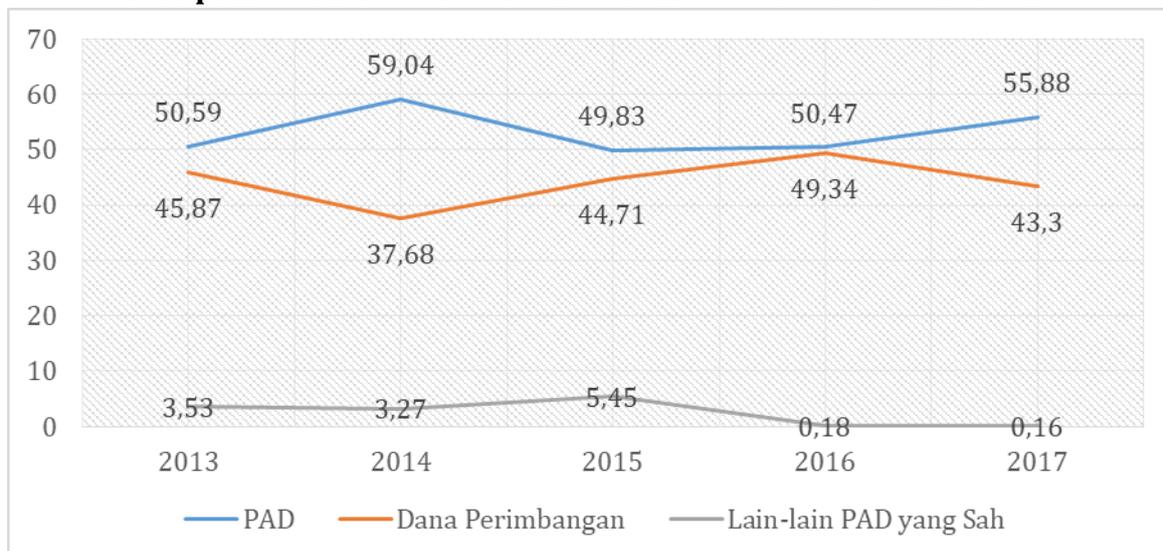
No	Tahun	Indeks	Kategori
1	2014	4,81	Sangat Tinggi
2	2015	3,66	Sangat Tinggi
3	2016	3,44	Sangat Tinggi
4	2017	1,63	Tinggi

Sumber: PMK 2014-2017

Indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan. Penurunan indeks yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Kondisi ini terjadi karena adanya metode perubahan perhitungan dalam penentuan indeks kapasitas fiskal. Selain itu, penurunan ini juga disebabkan oleh adanya fluaktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena sebagian besar berasal dari sumber daya alam seperti batu bara di mana harganya mengikuti mekanisme pasar.

Dilihat dari sisi kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lain. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2. 33**  
**Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: RKPD 2018*

Dari tahun 2013 hingga 2017, PAD memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2015, dari 59,04% menjadi 49,83 % pada tahun 2015. Berbeda halnya pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 50,47 persen dan 55,88 persen. Kontribusi sumber pendapatan daerah setelah PAD adalah dana perimbangan. Rata-rata kontribusi dana perimbangan dari tahun 2013 hingga

2017 mencapai 44,40%. Sementara sumber pendapatan daerah yang kontribusinya paling rendah adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2015 sebesar 5,45 persen menjadi 0,18 persen pada tahun 2016 dan menurun lagi menjadi 0,16 persen pada tahun 2017. Dilihat dari sisi kemandirian daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik karena PAD memiliki kontribusi yang sangat tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar sumber-sumber PAD berasal dari sumber daya alamnya. Di satu sisi hal ini sebagai bentuk pemanfaatan potensi daerah, namun di sisi lain sumber pendapatan yang berasal SDA akan mengalami penurunan karena SDA semakin banyak digunakan akan semakin menurun. Dalam konteks ini, perlu adanya transformasi sumber-sumber PAD dari SDA ke non SDA secara bertahap, yaitu berupa upaya-upaya untuk menggali sumber pendapatan melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan perlu dilakukan agar ketergantungan daerah pada hasil pajak pemanfaatan sumber daya alam dapat dikurangi dan digantikan/ditambah dengan hasil pajak investasi dan nilai tambah industri berbasis sumberdaya alam terbarukan seperti bidang pariwisata serta potensi ekonomi lainnya.

#### 2.3.3.4 Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah. Perkembangan opini BPK di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2. 54**  
**Opini BPK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peringkat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017; Laporan Kinerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018*

Laporan keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi, kondisi tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2015 hingga 2017 menjadi Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Status tersebut harus dipertahankan karena menjadi salah satu cerminan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, perlu adanya perhatian terhadap manajemen keuangan terutama terkait dengan kapasitas PAD dan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang akibat diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK yang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 55**  
**Persentase Perkembangan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini WTP**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	29	60	80	80	80

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id*

Tabel di atas menunjukkan perkembangan opini BPK tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan cenderung stagnan selama tiga tahun (2015-2017). Hal ini disebabkan karena dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini WDP, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa opini BPK di tingkat Kabupaten/Kota belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga dapat dijadikan sebagai salah satu cerminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah.

**Tabel 2. 56**  
**Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan Timur se-Indonesia Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	2011	9	2,5085	Tinggi
2	2012	7	2,5914	Tinggi
3	2013	7	2,6718	Tinggi
4	2014	4	2,9055	Tinggi
5	2015	3	3,1469	Sangat Tinggi

*Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri No.120-10421 Tahun 2016, Nomor 800-35 Tahun 2016, No. 120-4761 Tahun 2014, No.120-251 Tahun 2014, No. 120-2818 Tahun 2013*

Peringkat atau nomor EKPPD Provinsi Kalimantan selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 status skor EKPPD Provinsi Kalimantan Timur adalah sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Namun, pada tahun 2016 peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat ke tiga menjadi peringkat ke tujuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah belum optimal baik dari sisi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.

Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

**Tabel 2. 57**  
**Peringkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Nilai	
		Skor	Predikat
1	2013	70,75	B plus
2	2014	70,97	B plus
3	2015	75,14	BB
4	2016	77,37	BB
5	2017	77,49	BB

*Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018*

Capaian skor dan predikat AKIP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 dan 2014, predikat AKIP mencapai B plus. Predikat tersebut meningkat menjadi BB pada tahun 2015

hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Meskipun demikian, ada 2 (dua) hal yang perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan terutama di kegiatan dan sub kegiatan dan meningkatkan integrasi perangkat daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja yang belum optimal. Dengan memperbaiki kedua hal tersebut, diharapkan kedepan SAKIP Provinsi Kalimantan Timur meningkat.

#### 2.3.3.5 Keterbukaan informasi publik

Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip *governance*. Salah satu indikator untuk mengukur transparansi daerah adalah keterbukaan informasi publik. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 58**  
**Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Se-Indonesia**  
**Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Peringkat	Nilai
1	2013	5	62,88
2	2014	3	91
3	2015	3	81,18
4	2016	3	88,17
5	2017	8	-

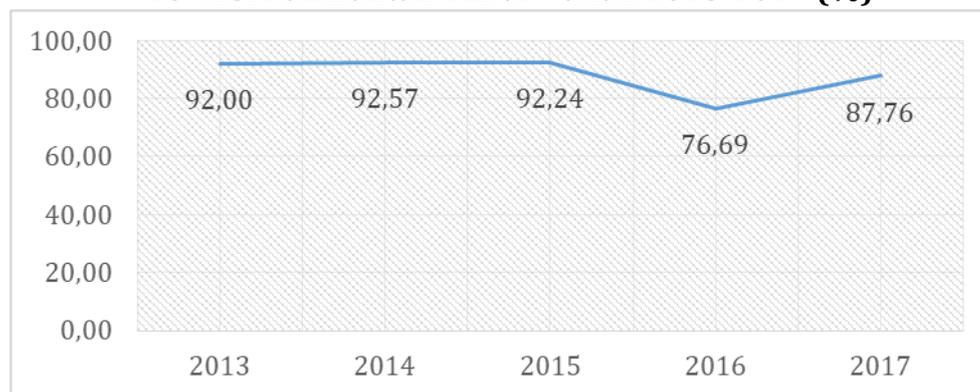
*Sumber: Laporan Tahunan KIP 2012-2016*

Data di atas menunjukkan bahwa indeks keterbukaan informasi publik mengalami penurunan peringkat dari peringkat ke 3 menjadi peringkat ke 8 nasional. Permasalahan tersebut terjadi karena belum optimalnya kelembagaan informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP). Persoalan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu tindak lanjut sengketa informasi belum optimal, pengembangan PPID belum optimal, dan penyusunan dokumen terkait keterbukaan informasi belum optimal. Sementara akses terhadap informasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan baik yang diindikasikan dengan mudahnya mendapatkan data atau informasi capaian pembangunan daerah di website pemerintah seperti sidata.com, BPS, dan sebagainya.

### 2.3.3.6 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM aparatur. Adapun data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2. 34**  
**Persentase Pembinaan PNS dan Peningkatan Kualitas SDM**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)**



Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Persentase pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 sudah cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 90%. Akan tetapi, pada tahun 2016 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 76,69. Namun pada tahun 2017, terjadi peningkatan menjadi 87,76 persen. Meskipun demikian, pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur daerah masih meninggalkan persoalan karena capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 hingga 2015. Kondisi ini penting untuk ditingkatkan karena pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah sangat berperan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ASN. Berikut ini persentase ASN yang mengikuti diklat.

**Tabel 2. 59**  
**Persentase ASN yang Mengikuti Diklat**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.9	1.7	1.5	1.8	0.6	0.3
2	Persentasi pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	99	80	40	70	33	19

*Sumber: BPSDM 2013-2018*

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan ASN yang mengikuti Diklat baik diklat formal maupun diklat struktural mengalami penurunan. Persentase ASN yang mengikuti diklat formal menurun dari 0.6 persen menjadi 0,3 persen pada tahun 2018. Sementara persentase ASN yang mengikuti diklat struktural menurun sebesar 14 persen pada tahun 2018. Dengan demikian, maka diperlukan adanya kebijakan peningkatan diklat pegawai melalui beberapa hal; Pertama, optimalisasi penerapan standar kompetensi melalui implementasi hasil pengukuran kompetensi; kedua, peningkatan sistem administrasi kepegawaian melalui melengkapi data-data kepegawaian; ketiga, optimalisasi kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia melalui identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing instansi; dan keempat, optimalisasi pelaksanaan lembaga sertifikasi dan optimalisasi dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat.

#### *2.3.3.7 Penelitian dan pengembangan*

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini menyediakan instrumen perumusan kebijakan daerah melalui aktivitas ilmiah. Adapun indikator untuk mengukur urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 60**  
**Uraian Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

No	Uraian	Capaian
1.	Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
2.	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	87%
3.	Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %
4.	Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	100 %

*Sumber: BAPPEDA 2018*

Tabel di atas menunjukkan bahwa urusan penelitian dan pengembangan sudah berjalan optimal karena perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai 100 persen. Sementara kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan baru 87 persen. Hasil ini didapatkan dari target capaian sebesar 70 persen pada tahun 2018 sementara yang terealisasi hanya 61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

#### *2.3.3.8 Pengawasan*

Urusan pengawasan merupakan urusan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran internal instansi pemerintah. Untuk melihat kinerja pengawasan, dapat dilihat berdasarkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur.

**Gambar 2. 35**  
**Indeks Persepsi Korupsi (IPK)**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018; LKIP 2016*

IPK provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Turunnya nilai IPK menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah belum berjalan optimal karena cukup banyak masyarakat menganggap masih ada praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, IPK ini belum diterapkan di seluruh OPD, dimana baru diterapkan pada pelayanan perizinan berusaha. Artinya, pelayanan perizinan belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP. Berikut ini capaian TLHP BPK dan APIP di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. 61**  
**Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	49	93	80	13	13,97
2014	19	47	38	9	19,14
2015	48	112	86	26	23,21
2016	41	118	60	58	49,15
2017	31	85	26	59	69,41
2018	11	29	8	21	72,41

*Sumber: inspektorat 2013-2018*

**Tabel 2. 62**  
**Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	106	160	160	0	Selesai
2014	251	393	391	2	0,50
2015	203	309	308	1	0,32
2016	211	374	330	43	11,49
2017	282	421	209	212	50,35

Sumber: Inspektorat 2013-2017

Persoalan lain juga berkaitan dengan penetapan zona integritas di internal instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini jumlah OPD yang sudah menerapkan zona integritas.

**Tabel 2. 63**  
**Jumlah SKPD yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Jumlah SKPD
1	2013	0
2	2014	1
3	2015	2
4	2016	2
5	2017	1

Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Saat ini, terdapat 2 (dua) OPD yang sudah ditetapkan sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penetapan ini penting karena mencerminkan komitmen instansi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan yang optimal.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

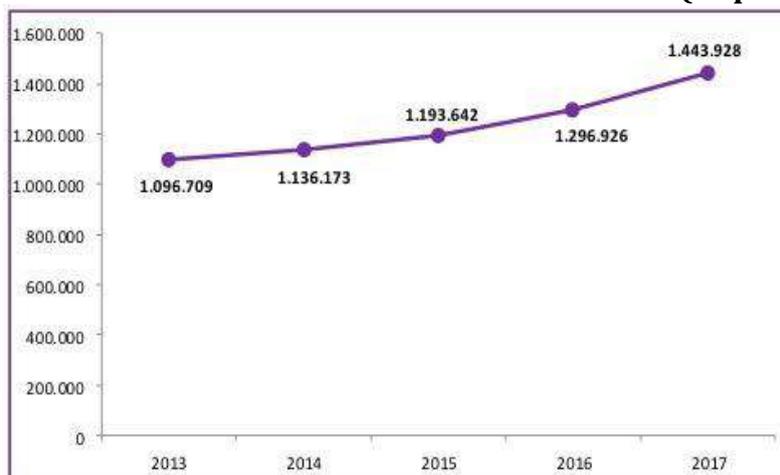
### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per

kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

**Gambar 2. 36**  
**Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan (Rp / %)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2017 (Rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

## 2) Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

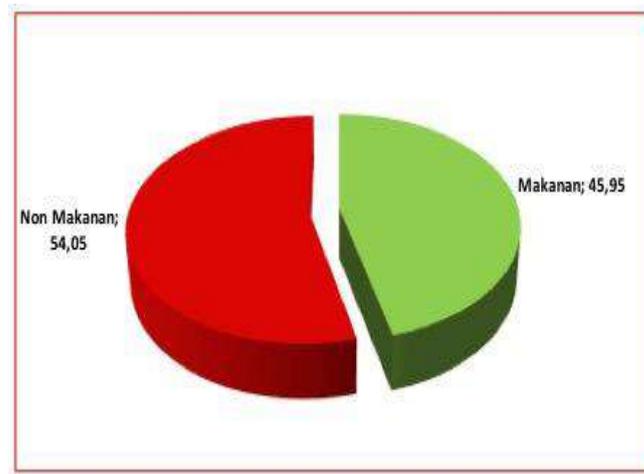
**Tabel 2. 64**  
**Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928
3	Persentase Pengeluaran	53,62	55,22	53,98	54,67	54,05

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Konsumsi Non Makanan (%)					

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

**Gambar 2. 37**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

### 3) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

**Tabel 2. 65**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**  
**(2012=100)**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	130,69	111,58	117,00	120,03	121,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	137,14	111,66	118,66	122,30	125,53
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 103,88 pada tahun 2017 turun jika dibandingkan tahun sebelumnya (104,78). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 92,45 dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (92,03).

**Tabel 2. 66**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Subsektor Tahun 2016-2017 (2012=100)**

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2016	2017	
<b>NTP Gabungan</b>		<b>98,14</b>	<b>97,60</b>	<b>-0,55</b>
1.	Tanaman Pangan	96,61	95,18	-1,48
2.	Hortikultura	92,03	92,45	0,46
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	99,01	96,29	-2,75
4.	Peternakan	104,78	103,88	-0,86
5.	Perikanan	99,89	101,37	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 1) Luas Wilayah Produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari

instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 67**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)**  
**terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
<b>J u m l a h</b>		<b>2.234.602</b>	<b>3.982.325</b>	<b>56,11</b>

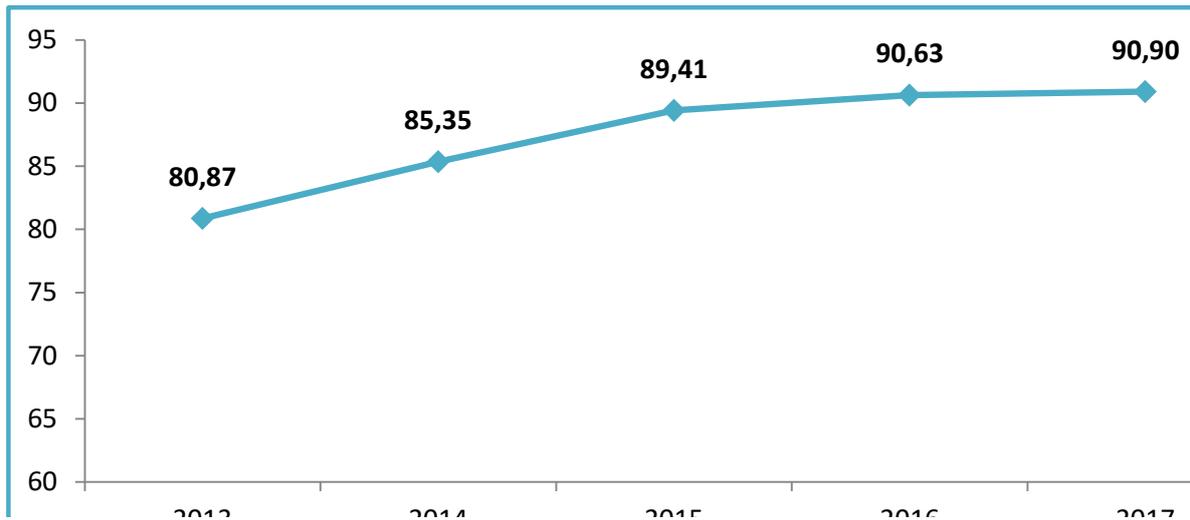
Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

## 2) Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai 90,90 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.

**Gambar 2. 38**  
**Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

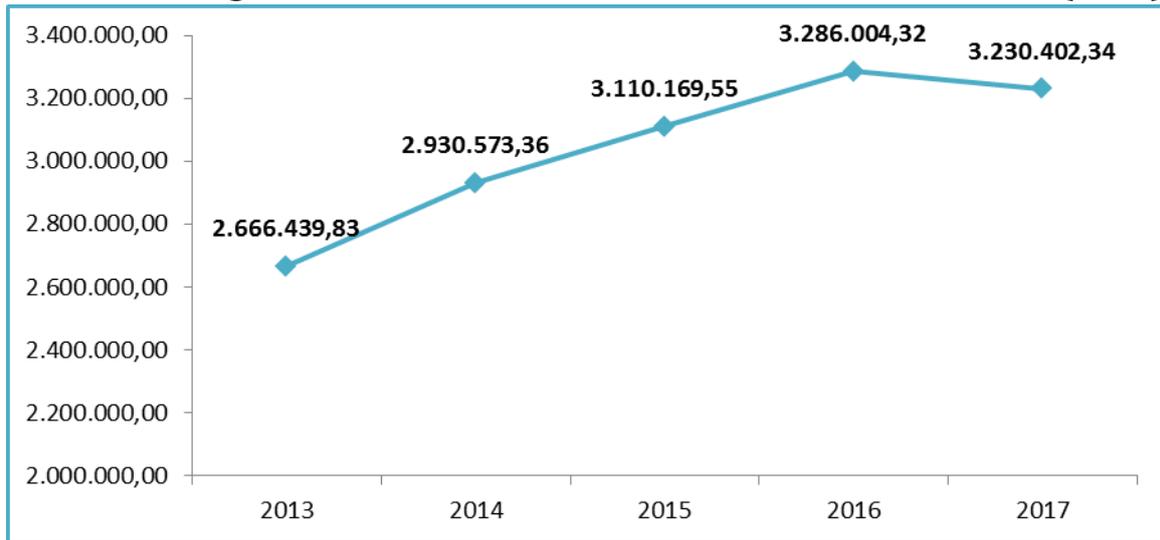
**Tabel 2. 68**  
**Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015**

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14	14	14	14
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.549	7.083	7.264	7.938
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	5.710	5.980	6.751	7.181
4.	Efektivitas Produksi (%)	92,09	84,43	92,94	90,46

Sumber: Data Pembangunan Kaltim, 2016

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

**Gambar 2. 39**  
**Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)**



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

**Tabel 2. 69**  
**Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	606.548	676.291	727.328	774.995	832.528
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.462.629.178	1.625.175.234	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat dilihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan. Konektivitas jalan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.

3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 147,30 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum untuk karakteristik infrastruktur perhubungan yakni jalan, baik yang berstatus Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 70**  
**Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>STATUS</b>	<b>ASPAL</b>	<b>KERIKIL</b>	<b>TANAH</b>	<b>LAINNYA</b>
1	Nasional	1.490,49	0,00	4,30	216,11
2	Provinsi	831,03	106,30	52,53	191,59
3	Kabupaten/Kota*)	2.161,93	3.284,47	3.505,80	747,38
<b>TOTAL</b>		<b>4.483,45</b>	<b>3.390,77</b>	<b>3.562,63</b>	<b>1.155,08</b>

Catatan : \*) Data tahun 2016 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

**Tabel 2. 71**  
**Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017**

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	81,59	1.529,65	65,41	34,26
2	Provinsi	521,59	41,90	288,71	246,14
3	Kabupaten/Kota*)	3.875,80	2.004,36	2.054,91	1.805,59
<b>TOTAL</b>		<b>4.478,98</b>	<b>3.575,91</b>	<b>2.409,03</b>	<b>2.085,99</b>

*Catatan : \*) Data tahun 2016 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur*

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

#### 1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2017 terjadi 28-29 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 35,07 persen. "Pekerjaan Rumah" inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. 72**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

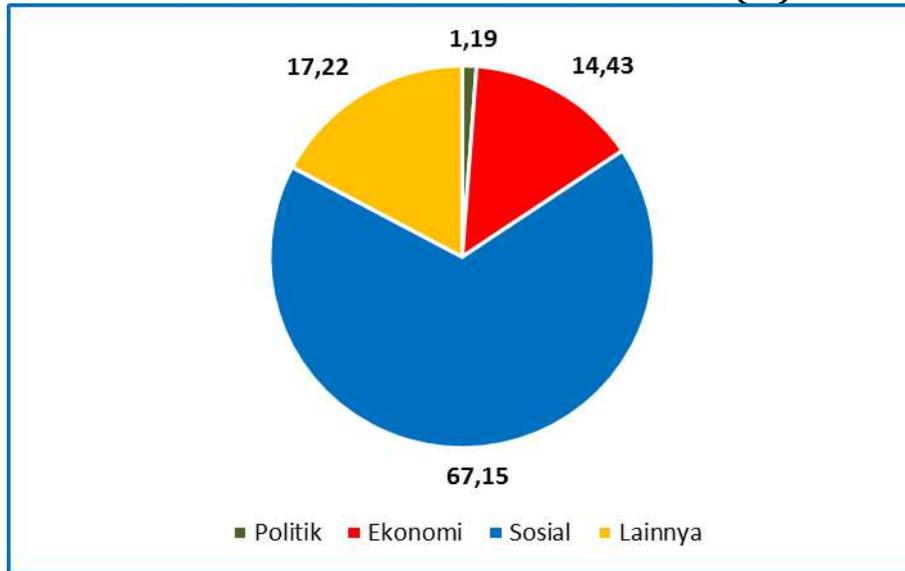
<b>Tahun</b>	<b>Dilaporkan</b>	<b>Tertunggak</b>	<b>Diselesaikan</b>	<b>% Tindak Kejahatan Diselesaikan</b>	<b>Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk</b>
2012	9.950	3.545	5.405	54,37	31,10
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87
2017	11.705	1.591	4.105	35,07	28,81

*Sumber: Polda Kaltim 2017*

## **2) Demonstrasi**

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

**Gambar 2. 40**  
**Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)**



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

**Tabel 2. 73**  
**Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016**

Tahun	Jenis Demo				Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	Lainnya	
2011	3	110	220	333	666
2012	3	149	254	406	812
2013	5	182	136	323	646
2014	19	224	189	432	864
2015	14	141	197	95	352
2016	9	109	507	130	755

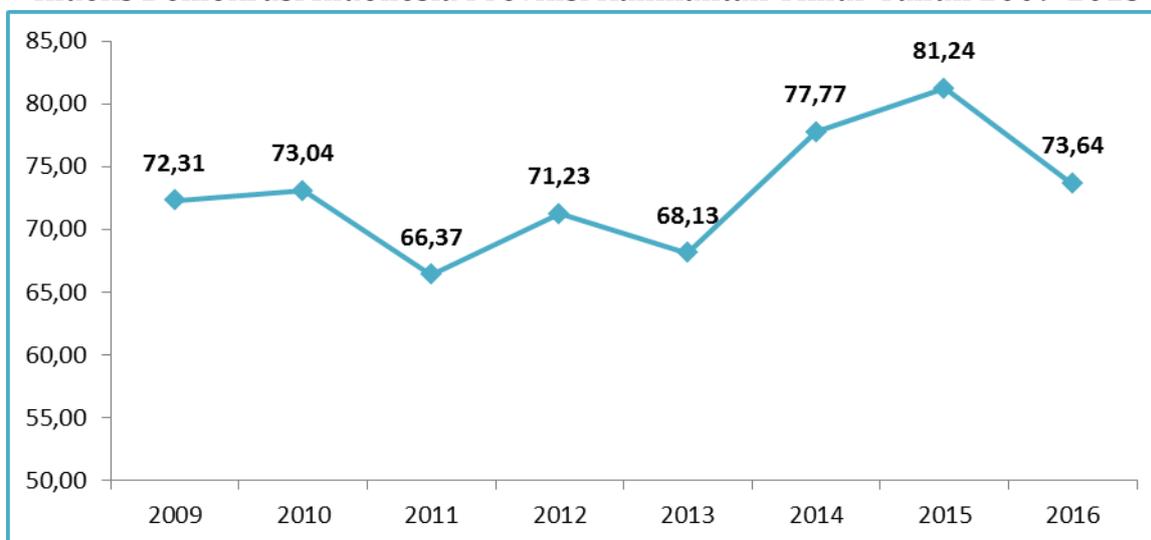
Sumber: Polda Kaltim, 2017

### 3) Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 81,24 pada tahun 2015. Meskipun begitu, angka

indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

**Gambar 2. 41**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

#### 4) Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 238 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 9,96 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.793 orang. Sedangkan pada penanaman modal oleh pihak asing terdapat 397 proyek sebesar 0,97 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.335 orang.

**Tabel 2. 74**  
**Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017**

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2010	49	7.881.289,78	6.049	56	988.710,14	17.132
2011	56	16.196.330,39	12.227	172	1.348.060,81	9.001
2012	44	7.709.270,00	50.240	167	2.529.900,00	35.579
2013	103	18.441.377,30	36.552	331	1.324.197,42	65.706
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204
2017	238	9.955.629,80	5.793	397	970.414,70	13.335

Sumber: DPMPTSP, 2018

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

##### 1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

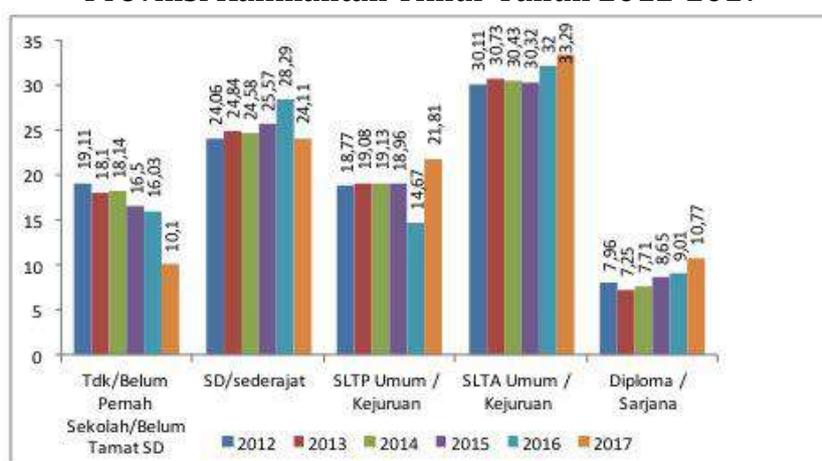
Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,01 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan

SD (28,29%). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen.

Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

**Gambar 2. 42**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut**  
**Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**



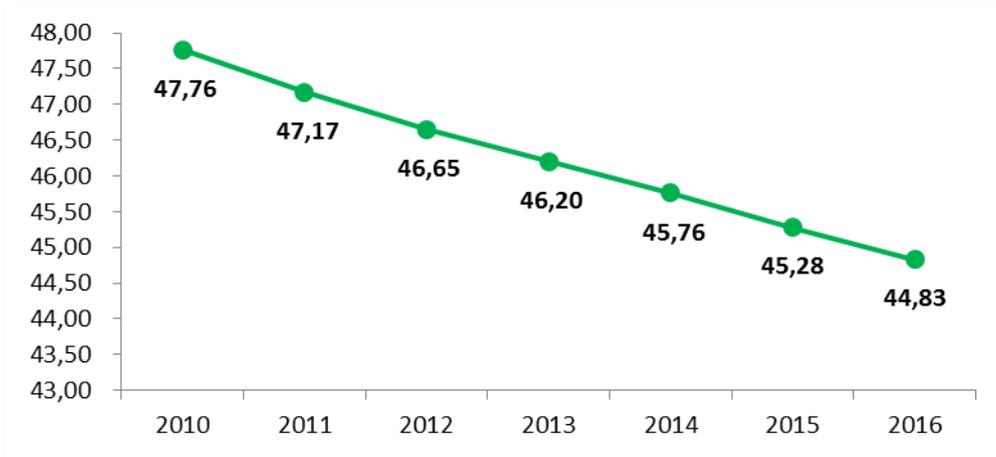
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

## 2) Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif

semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

**Gambar 2. 43**  
**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

## **BAB III**

### **Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan mengenai kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan periode sebelumnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Analisis di dalam bab tiga ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan salah satu dasar pengalokasian anggaran dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah.

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan data APBD selama 5 (lima) tahun. Metode analisis yang digunakan dengan membuat perbandingan mencakup teknik analisis rasio, analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan satu/kumpulan akun dengan satu/kumpulan akun lain di laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan kinerja keuangan suatu daerah. Analisis horizontal dengan membandingkan satu/kumpulan akun pada periode tertentu dengan satu/kumpulan akun yang sama pada periode-periode lain. Analisis vertikal dengan membandingkan berbagai jenis akun yang terdapat di laporan keuangan pada 1(satu) periode yang sama.

Salah satu indikator untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). Indikator DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Kemandirian pembiayaan menggambarkan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa depan.

**Tabel 3.1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2013-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2013	5.885.262.003.582,88	11.631.697.051.829,90	50,60%
2014	6.664.586.023.490,97	11.287.300.941.021,00	59,04%
2015	4.950.160.613.906,01	9.464.926.705.876,01	52,30%
2016	4.031.514.706.408,00	7.987.877.780.773,00	50,46%
2017	4.588.752.896.230,47	8.154.749.005.918,47	56,25%
<b>Rata-rata</b>	<b>5.224.055.248.723,67</b>	<b>9.705.310.297.083,67</b>	<b>53,73%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Besaran nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini berarti kemandirian pemerintah tinggi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui PAD. Kondisi tersebut berarti keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bergantung kepada dana yang diberikan oleh pusat.

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD terdiri dari analisis terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah analisis terhadap ketiga komponen pelaksanaan APBD tersebut:

#### 3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, maupun bersumber dari dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang

menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

**Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Rencana Pendapatan (Rupiah)</b>	<b>Realisasi Pendapatan (Rupiah)</b>	<b>% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan</b>
<b>2013</b>	11.940.096.024.641	11.631.697.051.830	97,42%
<b>2014</b>	11.192.326.880.287	11.287.300.941.021	100,85%
<b>2015</b>	10.497.631.453.406	9.464.926.705.876	90,16%
<b>2016</b>	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
<b>2017</b>	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap rencana pendapatan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan selama periode tersebut mengalami tren fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan. Lebih rinci, berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013-2017 yang diklasifikasikan menurut sumbernya.

**Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Proporsi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.885.262.003.583	6.664.586.023.491	4.950.160.613.906	4.031.514.706.408	4.588.752.896.230	-4,30%	53,74%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433	3.505.578.072.171	-6,33%	42,46%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	16.659.010.037	-10,31%	0,21%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	291.684.072.010	310.199.925.478	230.116.057.795	167.385.377.651	208.807.497.552	-5,50%	2,47%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	630.109.625.674	909.765.846.475	951.602.831.867	717.442.609.764	857.708.316.470	10,98%	8,61%
1.2	DANA PERIMBANGAN	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.024.025.055.410	3.941.626.961.365	3.533.009.585.813	-9,52%	43,75%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-23,71%	35,86%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000	714.906.576.000	230,79%	2,15%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	1.016.403.394.952	1.107.407.922.992	5313,23%	5,74%
1.2.4	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	14.736.113.000	32.986.523.875	12,41%	2,52%
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-8,72%	0,13%
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	5.000.000.000	7.500.000.000	-5,92%	2,35%

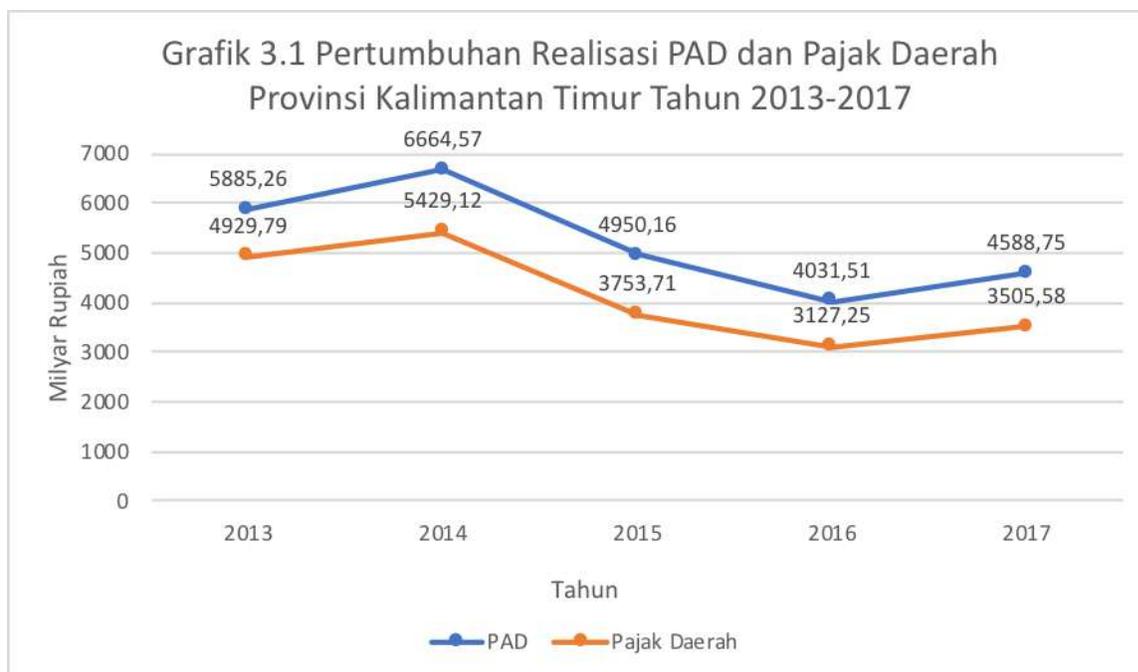
No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata- rata Proporsi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	15.048.587.875	0	0,04%
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN		11.631.697.051.830	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	7.987.877.780.773	8.154.749.005.918	-8,16%	

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Provinsi Kalimantan Timur termasuk ke dalam daerah dengan kemandirian tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut ditunjukkan ketika PAD menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. Kemandirian daerah tersebut terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 42,46 persen. Meskipun demikian, besaran pendapatan pajak daerah tiap tahunnya mengalami fluktuasi pertumbuhan cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,33 persen. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut.

#### 3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun selama periode tahun 2013-2017. Rata-rata pertumbuhan sebesar -4,30 persen per tahun. Penurunan sebesar -25,71 persen terjadi pada tahun 2015. Kondisi PAD juga mengalami penurunan pada tahun 2016 yang turun sebesar -18,60 persen dari tahun 2015. Pertumbuhan PAD per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

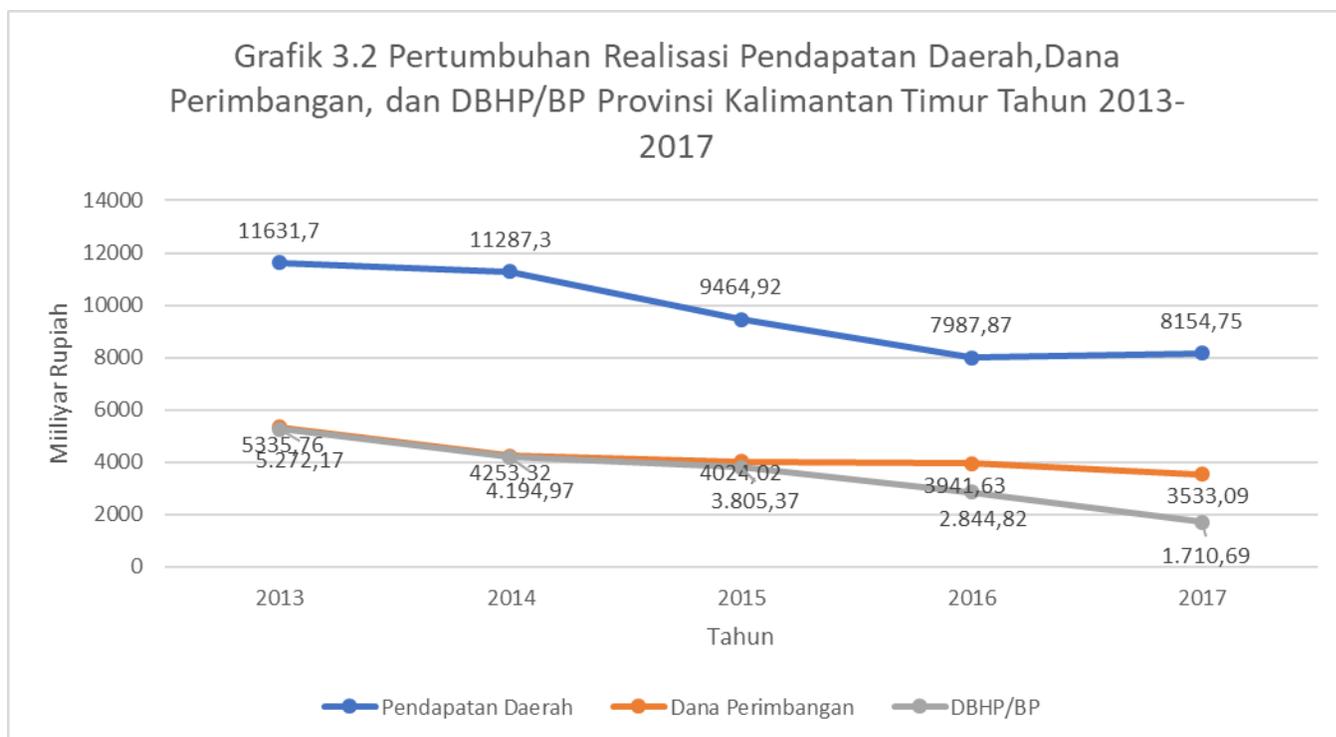


Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen paling besar penyumbang PAD berasal dari pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah menuupakan juga penyumbang terbesar terhadap total pendapatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Besaran komponen ini terbesar dari pendapatan pajak berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pertumbuhan pajak daerah cenderung turun selama periode tahun 2013-2017. Penurunan terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya penurunan dari pajak kendaraan bermotor. Penyebab turunya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

### 3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen pendapatan terbesar kedua dengan rata-rata proporsi sebesar 43,75 persen. Selama periode tahun 2013-2017, dana perimbangan rata-rata pertumbuh sebesar -9,52 persen per tahun dengan tren fluktuatif cenderung turun. Pertumbuhan dana perimbangan per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



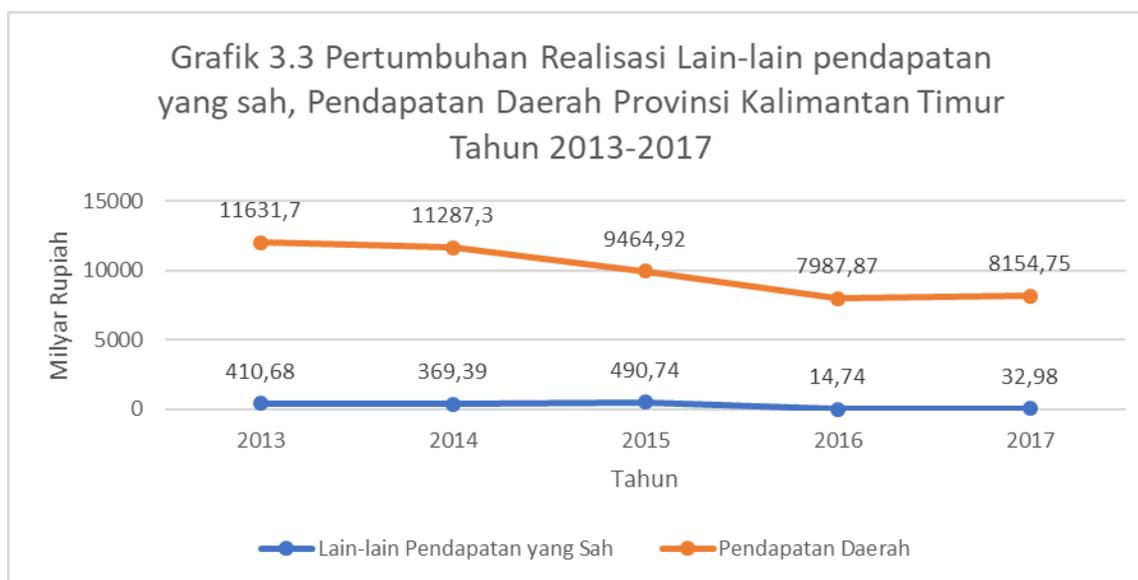
Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBHP/BP) merupakan penyumbang paling terbesar untuk dana perimbangan. Besaran DBHP/BP Provinsi Kalimantan Timur berasal dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat terkait pendapatan dari sektor sumber daya alam. Rata-rata proporsi DBHP/BP selama periode tahun 2013-2017 sebesar 35,86 persen. Meskipun demikian, tren pertumbuhan DBHP/BP menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun sama seperti tren pertumbuhan pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan adalah -23,71 persen. Penurunan pendapatan dari komponen ini disebabkan oleh volatilitas anggaran. Faktor yang menyebabkan terjadinya volatilitas anggaran di Provinsi Kalimantan Timur adalah menurunnya harga jual minyak dan batubara dan tingkat produktifitas sektor minyak dan batubara.

### 3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata tumbuh 2,52 persen per tahun. Tren yang dimiliki komponen ini menunjukkan fluktuasi cenderung

menurun sama dengan tren pertumbuhan Pendapatan Daerahnya. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen lain yaitu, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan m daerah kecil hanya sebesar 2,53 persen.

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan masa lalu salah satunya dengan melihat komponen Belanja Daerah. Definisi dari Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang ditentukan. Tujuan dari analisis Belanja Daerah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.4. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2013	15.139.000.000.000	13.780.244.907.476	91,02%
2014	12.217.683.000.000	11.274.631.837.034	92,28%
2015	11.484.260.000.000	10.205.342.292.212	88,86%
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%
2017	7.674.720.042.209	8.239.379.709.093	107,36%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas. Selama periode tersebut menunjukkan pada tingkat efektif meskipun besaran kurang dari 100 persen. Telaah pertumbuhan belanja lebih detail diperlukan untuk melihat proporsi belanja selama tahun 2013-2017.

**Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93,59%	97,22%	88,71%	96,35%	93,10%	93,79%
2.1.1	Belanja Pegawai	83,53%	90,52%	91,36%	88,19%	85,54%	87,83%
2.1.2	Belanja Subsidi						
2.1.3	Belanja Hibah	96,90%	96,03%	98,90%	99,48%	91,51%	96,56%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	71,64%	77,26%	80,35%	89,40%	83,58%	80,45%
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	97,60%	99,47%	84,90%	97,82%	98,50%	95,66%
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	91,36%	98,75%	88,42%	101,53%	98,34%	95,68%
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0,00%	15,00%	19,08%	9,62%	0,27%	8,79%

2.2	BELANJA LANGSUNG	88,44%	86,49%	89,07%	94,14%	145,10%	100,65%
2.2.1	Belanja Pegawai	93,19%	100,88%	102,10%	133,21%	90,72%	104,02%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89,44%	89,07%	89,83%	96,91%	94,62%	91,97%
2.2.3	Belanja Modal	87,10%	81,58%	85,50%	84,59%	92,06%	86,17%
	BELANJA	91,02%	92,28%	88,86%	95,30%	107,36%	94,96%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rincian realisasi Belanja Daerah tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,79 persen sedangkan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 100,65 persen. Realisasi belanja tidak langsung selama periode tersebut mengalami tren yang fluktuatif sedangkan belanja langsung mengalami tren yang meningkat. Meskipun demikian, rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung.

### 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Uraian Pembiayaan		Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (Persen)
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penerimaan Pembiayaan	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55	5,75%
2	Pengeluaran Pembiayaan	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	0,00%
<b>Pembiayaan Netto (1-2)</b>			3.198.903.975.359,34	1.025.356.119.713,24	986.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55	5,21%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2013 hingga 2017 bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. *Kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pembiayaan daerah hanya bergantung pada SiLPA yang mempunyai rata-rata pertumbuhan dengan tren fluktuatif sebesar 5,75 persen. Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan di atas, bisa menjadi potensi penting bagi pembiayaan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SiLPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang diambil oleh pemerintah daerah karena kondisi keuangan daerah yang memungkinkan tidak stabil. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.6. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumb (%)
<b>1</b>	Aset						
<b>1.1.</b>	Aset lancar	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
<b>1.2.</b>	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
<b>1.3.</b>	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
<b>1.4.</b>	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
<b>2</b>	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
<b>3</b>	Ekuitas dana	27,012,640,462,523.70	29,175,908,927,637.40	22,959,811,800,431.10	22,397,025,432,041.10	27,190,804,766,923.90	1.41
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya antara terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset yang paling pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan. Adanya pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, karena aset tetap daerah terkait kebutuhan pembangunan, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41persen.

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.7 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumb. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828. 78	1,997,096,484,129. 34	2,057,431,888,726. 55	2,204,883,737,445. 40	2,513,224,064,671. 43	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Tabel 3.8 Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan

rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

**Tabel 3.10. Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumb. (%)
Piutang	709,122,636,012.55	883,288,619,506.39	671,448,413,308.87	755,022,737,028.12	634,847,129,148.19	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

**Tabel 3.11. Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28.14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata

umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336.57 atau hampir selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

**Tabel 3.12. Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Prosentase (a) / (b) x 100%
1	2013	1.347.618.824.617,36	13.780.244.907.476,00	9,78%
2	2014	1.425.146.092.811,10	11.299.631.837.034,30	12,61%
3	2015	1.467.682.098.123,30	10.255.342.292.212,00	14,31%
4	2016	1.329.010.912.560,17	7.601.242.338.859,40	17,48%
5	2017	1.674.309.092.675,44	8.239.379.709.093,14	20,32%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus

disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber deficit riil dan analisis SiLPA. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

#### **3.2.2.1 Analisis Sumber Defisit Riil**

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
<b>1</b>	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829,90	11.287.300.941.021,00	9.464.926.705.876,01	7.987.877.780.773,00	8.154.749.005.918,47
	Dikurangi realisasi:					
<b>2</b>	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10.205.342.292.212,00	7.601.242.338.859,40	8.239.379.709.093,14
<b>3</b>	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
<b>A</b>	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790.415.586.335,99	386.635.441.913,60	-84.630.703.174,67
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
<b>4</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
<b>B</b>	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
<b>A- B</b>	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.050.356.119.713,24	1.038.025.223.699,89	246.212.960.258,02	613.319.986.802,44	526.487.421.571,88

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

### 3.2.2.2 Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017:

**Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	1.050.356.119.713	100,00%	1.038.025.223.700	100,00%	246.212.960.258	100,00%	600.319.986.801	100,00%	-	100,00%
										1.123.738.108.106	
1	Pelampauan penerimaan PAD	341.645.425.583	32,53%	893.384.197.741	86,07%	-144.985.366.695	-58,89%	110.149.838.331	18,35%	-68.981.768.802	6,14%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-637.827.016.894	-60,72%	-800.677.641.912	-77,13%	-894.874.751.295	-	128.499.421.929	21,41%	-491.637.254.661	43,75%
							363,46%				
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-12217381500	-1,16%	2.267.504.905	0,22%	7.155.370.460	2,91%	-13.445.934.600	-2,24%	1.492.106.708	-0,13%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.358.755.092.524	129,36%	943.051.162.966	90,85%	1.278.917.707.788	519,44%	375.116.661.141	62,49%	-564.659.666.884	50,25%
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	48.475.533	0,00%

Perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya dalam penganggaran belanja daerah.

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut :

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

### 3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut:

#### 3.3.1.1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
  - c. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan
  - d. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis
- Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.

- b. Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu
- Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian

### 3.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui:

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan

kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

- a. Prioritas I : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk

- melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran infrastuktur dan peningkatan sumber daya manusia.
- b. Prioritas II : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap OPD
  - c. Prioritas III : merupakan belanja operasi daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS
  - d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
  - e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah

### **3.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun

### **3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>9.269.338.134.000</b>	<b>9.136.092.641.000</b>	<b>9.612.985.144.000</b>	<b>9.959.301.641.000</b>	<b>10.262.274.361.000</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.393.011.979.500</b>	<b>5.681.155.000.000</b>	<b>6.056.844.503.000</b>	<b>6.368.640.000.000</b>	<b>6.622.088.720.000</b>
<b>1.1.1</b>	Pendapatan Pajak Daerah	4.360.000000000	4.634.500.000.000	4.891.135.000.000	5.124.312.050.000	5.328.820.209.500
<b>1.1.2</b>	Hasil Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.620.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704.	31.209.722.618
<b>1.1.3</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	224.523.866.374	227.111.004.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434
<b>1.1.4</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	779.871.388.126	785.923.810.602	795.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>3.854.170.762.500</b>	<b>3.442.517.641.000</b>	<b>3.543.533.641.000</b>		
<b>1.2.1</b>	Bagi Hasil Pajak	637.329.276.400	708.500.000.000	717.700.000.000	727.000.000.000	737.000.000.000
<b>1.2.2</b>	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.401.147.845.100	1.918.324.000.000	2.010.140.000.000	2.035.170.000.000	2.074.500.000.000
<b>1.2.3</b>	Dana Perimbangan Lainnya	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>22.155.392.000</b>	<b>12.420.000.000</b>	<b>12.607.000.000</b>	<b>12.798.000.000</b>	<b>12.992.000.000</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.900.542.523.430</b>	<b>7.756.766.021.144</b>	<b>7.629.231.405.042</b>	<b>7.517.351.516.783</b>	<b>7.420.578.827.885</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.652.175.257.980</b>	<b>4.406.075.186.833</b>	<b>4.172.993.809.449</b>	<b>3.952.242.436.929</b>	<b>3.743.168.812.016</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	1.303.461.781.283	1.234.508.653.053	1.169.203.145.307	1.107.352.298.920	1.048.773.362.307
<b>2.1.2</b>	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
<b>2.1.3</b>	Belanja Hibah	849.899.475.885	804.939.793.610	762.358.478.528	722.029.715.014	683.834.343.090
<b>2.1.4</b>	Belanja Bantuan Sosial	3.756.180.842	3.557.478.875	3.369.288.243	3.191.052.895	3.022.246.197
<b>2.1.5</b>	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.858.916.562.356	1.760.579.876.207	1.667.445.200.756	1.579.237.349.636	1.495.695.693.840

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	636.126.075.557	602.475.006.161	570.604.078.335	540.419.122.591	511.830.951.006
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	15.182.057	14.378.926	13.618.281	12.897.874	12.215.576
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.248.367.265.450	3.350.690.834.312	3.456.237.595.592	3.565.109.079.853	3.677.410.015.869
2.2.1	Belanja Pegawai	235.325.152.002	242.737.894.290	250.384.137.960	258.271.238.306	266.406.782.313
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.660.536.164	2.078.122.343.053	2.143.583.196.859	2.211.106.067.560	2.280.755.908.688
2.2.3	Belanja Modal	998.381.577.284	1.029.830.596.968	1.062.270.260.773	1.095.731.773.987	1.130.247.324.868
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.368.795.610.570	1.379.326.619.856	1.983.753.738.958	2.441.950.124.217	2.841.695.533.115
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(1.368.795.610.570)	(1.379.326.619.856)	(1.983.753.738.958)	(2.441.950.124.217)	(2.841.695.533.115)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.318.795.610.570	1.329.326.619.856	1.933.753.738.958	2.391.950.124.217	2.791.695.533.115
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 1,79 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Perhitungan proyeksi tidak mencakup komponen pendapatan daerah yang tidak lagi menjadi wewenang provinsi seperti Dana Alokasi Khusus. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi. Komponen belanja daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar -1,55 persen. Proyeksi tersebut diharapkan kebijakan belanja didasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah.

Tren realisasi pendapatan dan belanja dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kondisi defisit sedangkan pada tahun 2023 mulai mengalami kondisi surplus. Hal ini di satu sisi menunjukkan kondisi pendapatan yang tidak dapat membiayai belanja. Kondisi defisit memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan daerah. Olehkarena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari sisi penerimaan pembiayaan.

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi permasalahan tingkat daerah dan per-urusan pemerintahan. Permasalahan tingkat daerah terkait dengan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan, sedangkan permasalahan per-urusan adalah persoalan yang dihadapi oleh satu atau beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi.

##### **4.1.1. Permasalahan Tingkat Daerah**

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, diketahui terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, masih belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia, belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta belum tercapainya pelayanan publik yang optimal. Kelima permasalahan utama tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

## **1. Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia,**

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kaltim dari sisi SDM tentunya masih menyisakan tantangan yang harus segera diatasi. Aspek daya saing seringkali diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kaltim sudah lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kaltim, maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kaltim secara keseluruhan belum optimal.

Belum optimalnya daya saing SDM Kaltim disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Di samping itu, Provinsi Kaltim masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kaltim lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat.

Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang tepat guna. **Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja.**

Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

## **2. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun LPE meningkat 1,25 poin pada tahun 2013, namun tren tersebut kemudian menurun signifikan hingga berada pada angka -1,21 pada tahun 2015. Akan tetapi, capaian pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 83 poin dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih berada pada capaian minus

yaitu -0,38. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara). Harga batu bara di level internasional mengalami penurunan. Hal ini berimbas kepada penurunan LPE Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dan 2016.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur masih rendah. Sektor Kehutanan masih belum mengoptimalkan produktivitas Kawasan. Pada produksi hutan alam, produktivitas setiap tahun berada pada angka 30 m<sup>3</sup>/tahun dengan total produksi 2,0-2,6 juta meter kubik per tahun. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta hektare peruntukan perkebunan dalam RTRW Kaltim, dengan luasan tertanam 1,35 juta hektare, termasuk 1,1 juta hektare kelapa sawit. Produksi CPO Kalimantan Timur mencapai 2,89 juta ton dengan hasil tandan buah segar sebanyak 13,1 juta ton. Masih terdapat areal di dalam perijinan perkebunan yang belum ditanami.

Industri hilir pertanian dalam arti luas juga belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, sebagian besar dijual sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi crude palm oil (CPO), walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Pembangunan juga belum berjalan merata, di mana masih tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Indeks ketimpangan regional terus menunjukkan tren penurunan selama 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014-2015 indeks Williamson mengalami penurunan sebesar 0,03. Angka ini tetap hingga tahun 2015. Berdasarkan analisis terhadap data "PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 Berdasarkan Kabupaten/Kota", indeks

ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara.

### **3. Belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke sentra produksi**

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun, seperti transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih dan ketenagalistrikan. Dari sisi transportasi dapat dilihat dari belum optimalnya ketersediaan jaringan jalan dalam menghubungkan kawasan-kawasan strategis provinsi. Selain itu, sebagian besar jaringan jalan terbangun berada dalam kondisi rusak dan rusak berat yang mencapai 48,3%. Hal tersebut diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sangat minim. Terlebih lagi, kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang ada belum memadai.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Masih terdapat 10 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikan dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya.

Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Pada tahun 2017, 7,75% Rumah Tangga (RT) tidak mampu mengakses air bersih. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi telah mencapai 84,7%.

Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peruntukannya yang bertujuan sebagai penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang sehat dan pengendalian emisi gas rumah kaca perlu diangkat menjadi persoalan

pembangunan yang diberi perhatian lebih Kalimantan Timur dalam jangka panjang.

#### **4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup,**

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman. Informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di

mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO<sub>2</sub> atau sekitar 12,5 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun. Sementara itu, emisi GRK dari sektor energi terus mengalami penurunan kecuali tahun 2014 yang sedikit meningkat dibanding 2013.

#### **5. Belum tercapainya pelayanan publik yang optimal**

Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan

akuntabilitas keuangan. Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2017 adalah “BB”, sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status “Sangat Tinggi”. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Meskipun demikian, masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang.

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016

Pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah diharapkan semakin terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan. Gagasan One Map One Data serta Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan bagian yang perlu diperkuat. Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah. Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi public. Capaian indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3

pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Adapun indeks persepsi korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017. Standar layanan informasi publik perlu semakin dikuatkan, agar interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin bisa didekatkan.

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah. Capaian pembangunan pada prinsip partisipasi dapat dilihat dari indeks demokrasi. Indeks yang bersifat komposit tersebut menilai capaian kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,64 pada 2016.

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparatur pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan merentang dari berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan penunjang.

#### **4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Per-Urusan**

Permasalahan pembangunan per-urusan menjadi basis utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)** dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan per-urusan juga dipetakan berbasis

pada sinergitas RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbasis pada logika tersebut, maka pemetaan masalah per-urusan disusun berdasarkan pedekatan *vision based* (merujuk pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur) dan *problem based* (merujuk pada hasil analisis BAB II).

### 1. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

**Tabel 4.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah**  
**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Pendidikan</b>	Kualitas pendidikan masyarakat belum optimal	Masih tingginya disparitas pelayanan pendidikan	Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Belum meratanya dan belum terpenuhinya kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			Masih belum terfasilitasinya peserta didik dari keluarga miskin, disabilitas dan pekerja anak
			Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
			Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan kejuruan (alat-alat lab, jaringan wifi, komputer, listrik)
		Masih Rendahnya minat baca	Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan Kab/Kota Kebudayaan
<b>Kesehatan</b>	Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata
			Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan
			Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Pusat-pusat produksi, pengolahan dan pemasaran belum terhubung jalur darat secara baik	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Konstruksi jalan dan jembatan tidak sesuai standar
			Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan strategis provinsi	Belum terhubungnya ibukota Kabupaten Mahulu dengan jaringan jalan
			Belum optimalnya konektivitas ke kawasan strategis provinsi
		Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal	Belum optimalnya pengawasan batas muatan
Rendahnya kualitas bangunan	Belum optimalnya sistem pengawasan konstruksi bangunan	Belum terpenuhinya SDM tenaga ahli dan terampil	

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
	Adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkan Perda terkait RRTR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
	Masih rendahnya luas lahan pertanian beririgasi teknis	belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi	Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur bendungan
			Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
			Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
	Ketersediaan jaringan irigasi tidak sesuai dengan lokasi lahan pertanian strategis	Belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting dan ketersediaan jaringan irigasi, terutama data spasial	Belum tersedianya infrastruktur SPAM regional
			Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur air baku
	Belum optimalnya akses air bersih masyarakat	Kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan	Rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai
		Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih	
	Tingginya kejadian banjir di Samarinda, Balikpapan dan Bontang	Infrastruktur pengendali banjir belum memadai	

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	
			Belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase	
			Banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai	
		Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi resiko banjir	Perlu ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan resiko banjir	
		Tingginya resiko abrasi	Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai
		Tingginya volume sampah	Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum tersedianya TPA Regional
<b>Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Belum optimalnya akses rumah layak huni	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	
		Rendahnya kualitas lingkungan kawasan pemukiman	Kurangnya ketersediaan drainase	
			Kurangnya ketersediaan sanitasi layak	
			Ketersediaan jalan lingkungan belum memadai	
			Belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait peningkatan kawasan kumuh perkotaan	
			Belum optimalnya sarana dan	

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
			<p>prasarana pemadam kebakaran dan persampahan di kawasan kumuh</p> <p>Belum optimalnya upaya relokasi kawasan pemukiman di sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Rapak Dalam</p>
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	Belum optimalnya kualitas demokrasi daerah	Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat	Masih perlunya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat
			Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas
			Belum optimalnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, hukum, dan agama
		Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat
	Masih tingginya tingkat kebencanaan	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana	Masih rendahnya kapasitas aparaturnya dalam menanggulangi bencana
			Masih rendahnya infrastruktur kebencanaan
			Belum optimalnya sistem penanggulangan kebencanaan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan
<b>Sosial</b>	Tingginya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan	Rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial
			Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan panti sosial
			Rendahnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial

## 2. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

**Tabel 4.2.**  
**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah**  
**Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar**

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	Rendahnya akses penduduk yang mendapat layanan kependudukan	Belum optimalnya akses jaringan dan tenaga pendukung akses catatan sipil	Belum optimalnya akses jaringan internet
			Belum optimalnya penyediaan bank data kependudukan
			Belum optimalnya kuantitas dan kompetensi SDM

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
			administrator data base kependudukan (ADB)
		Belum optimalnya pemahaman penduduk tentang pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan yang lengkap	Belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya adm penduduk
<b>Kebudayaan</b>	Lemahnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Berkurangnya kesadaran masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang penting pelestarian dan pengamalan kebudayaan lokal
			Belum optimalnya peran sekolah terhadap pendidikan kebudayaan
			Belum optimalnya penguatan lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal
		Belum optimalnya mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat	Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya ruang kreatif bagi pemuda
			Masih belum optimalnya penghargaan bagi atlet berprestasi

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarutamaan gender belum optimal	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender
			Masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya kelembagaan unit layanan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
			Belum berkembangnya layanan publik ramah anak
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB	Belum optimalnya pembinaan pada kelompok penyuluh lapangan program KB (PLKB)	Rendahnya kuantitas dan kualitas PLKB
		Belum optimalnya pembinaan pada kelompok binaan program KB	Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha ekonomi pada kelompok binaan program KB
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>	Belum optimalnya pengembangan desa mandiri	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping desa di daerah pedalaman
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
			Belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes
			Masih rendahnya koordinasi lintas sektor terhadap pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi aparatur desa
			Belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan aparatur pemerintah desa
<b>Perhubungan</b>	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi
			Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam keselamatan berlalu lintas dan ketentuan muatan maksimal
			Belum memadainya sarana dan prasarana terminal
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan laut, sungai,	Terbatasnya fasilitas keselamatan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
		danau dan penyeberangan	Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar Kondisi dermaga yang belum sesuai standar
		Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi, terpadu dan memadai	Belum tersedianya moda transportasi yang terintegrasi melalui pemadu moda
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Belum optimalnya kualitas kelembagaan keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya penyelesaian sengketa informasi publik	Masih perlunya peningkatan sinergi antara perangkat daerah dengan komisi informasi publik
		Belum optimalnya pelaksanaan layanan informasi publik	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya PPID Belum terintegrasinya aplikasi layanan informasi publik
<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Minimnya kompetensi kewirausahaan Kurangnya inovasi produk UMKM yang mampu berdaya saing secara nasional dan internasional Kapasitas mengakses permodalan yang masih kurang Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tumbuhnya inkubasi bisnis
			Masih terbatasnya koperasi produksi (koperasi yang beranggotakan IKM produksi)
<b>Ketahanan Pangan</b>	Belum optimalnya ketahanan pangan (beras), dimana hampir semua komoditas pangan dalam keadaan deficit setiap tahunnya	Rendahnya akses pangan dan produktivitas lahan penghasil pangan	Cadangan pangan daerah yang belum optimal
			Pangan utama masih tergantung pada beras (padi)
			Panjangnya rantai distribusi pangan (dari luar daerah maupun ke dalam daerah)
			Sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah karena rendahnya kualitas infrastruktur jalan
			Belum optimalnya perlindungan lahan pangan
	Produksi daging (sapi) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya populasi ternak sapi	Masih kurang penjaminan pemacek yang ada
			Bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak masih belum dilakukan secara mandiri
			Rendahnya kompetensi peternak
			Terjadinya beberapa penyakit hewan
			Usaha peternakan masih berskala rakyat. Belum ada usaha peternakan besar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kecilnya jumlah penambahan peternak (Jumlah peternak sapi sekitar 20.000 peternak. Jumlah peternak total: 130.000)
<b>Penanaman Modal</b>	Belum optimalnya nilai investasi sektor sekunder dan tersier	Promosi investasi pada sektor sekunder dan tersier belum optimal	Masih kurangnya ketersediaan informasi detail peluang investasi
		Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil	Kurangnya kesesuaian keterampilan tenaga dengan permintaan pasar
	Kawasan strategis ekonomi belum memberikan kontribusi yang signifikan	Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan	Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor
			Evaluasi ijin yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan
			Belum optimalnya "Satu Peta Satu Data"
		Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi belum optimal	Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih kurang
		Ketersediaan infrastruktur pendukung	Rendahnya akses infrastruktur menuju pusat industri
<b>Tenaga Kerja</b>	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja
			Rendahnya kualitas tenaga kerja
			Belum optimalnya kapasitas pelatihan oleh BLK

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>Lingkungan Hidup</b>	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Tingginya Alih fungsi hutan dan lahan	Terbatasnya pengawasan kawasan lindung
			Rendahnya kualitas penghijauan dan reboisasi
			Belum tuntasnya tata batas kawasan
		Tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik	Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran di daerah tangkapan sumber air baku
			Rendahnya pengelolaan air limbah dan industri
			Belum tersedianya pengelolaan limbah domestik (IPAL)
			Tingginya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai
		Tingginya Pencemaran Udara	Polusi Kendaraan bermotor di wilayah perkotaan
			Tingginya kebakaran hutan
			Tingginya aktivitas industri dalam bahan bakat diesel
		Masih tingginya angka emisi GRK	Masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			Masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah
			Masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi
			Masih kurangnya Jumlah perusahaan yang

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			memanfaatkan limbah POME
			Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%
		Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum adanya TPA regional
			Rendahnya kesadaran masyarakat
<b>Kearsipan Daerah</b>	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Belum terintegrasinya sistem arsip daerah	Belum optimalnya kapasitas tenaga SDM kearsipan perangkat daerah
			Belum optimalnya sistem informasi kearsipan
<b>Statistik</b>	Belum optimalnya transparansi dan pemanfaatan data pembangunan daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik daerah	Belum optimalnya dokumentasi capaian pembangunan daerah
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data statistik sektoral
			Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan PPID

### 3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan,

kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral.

**Tabel 4.3.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah Urusan Pilihan**

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Pertanian</b>	Pertanian dalam arti luas belum menjadi tumpuan	Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan
			Ketersediaan benih unggul masih kurang
		Belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit)	Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai
	Produksi beras belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya produksi padi	Luas tanam belum memadai
			Produktivitas masih belum optimal (bibit bersertifikat, pupuk, sarana produksi pertanian)
			Jumlah keluarga petani semakin menurun
		Alih fungsi lahan pertanian masih terjadi	
Diversifikasi pangan belum optimal	Teknologi diversifikasi pangan (beras) masih belum optimal		
	Promosi pangan non beras belum optimal		
<b>Kelautan dan Perikanan</b>	Pertanian dalam arti luas belum menjadi tumpuan	Rendahnya produksi sektor perikanan	Benur udang windu masih didatangkan dari pulau Jawa sedangkan sumber induk berasal dari perairan Balikpapan)
			Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional
			Masih rendahnya pengembangan budidaya perikanan darat
			Belum optimalnya Kawasan perlindungan perikanan
			Belum tersedianya terminal ikan secara merata
<b>Kehutanan</b>	Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan	Kawasan hutan produksi belum dikelola dengan arif	Belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	terhadap PDRB	dan efisien	Masih rendahnya produktivitas kawasan
			Masih rendah pengolahan hasil hutan kayu
			Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan selain kayu
		Ekspor bahan mentah masih dilakukan, pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. (level kebijakan nasional)	Belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur
			Belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu
		Belum optimalnya kelembagaan KPH	Terbatasnya kapasitas kelembagaan KPH
			Belum selesainya perencanaan kawasan KPH
			Belum tersedianya mekanisme pendanaan bisnis KPH
		Akses masyarakat disekitar kawasan hutan belum memadai	Belum terselesaikannya konflik tenurial masyarakat
			Lambannya proses persetujuan perijinan perhutanan sosial
<b>Pariwisata</b>	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai	Minimnya SDM spesialisasi keahlian bidang pariwisata
			Inovasi pengemasan destinasi pariwisata masih rendah
			Sarana dan prasarana pendukung pariwisata belum terbangun secara optimal
			Akses menuju destinasi belum memadai
<b>Perdagangan</b>	Sektor perdagangan belum optimal	Daya saing produk masih perlu ditingkatkan	Rendahnya kualitas produk
			Belum optimalnya kuantitas dan kontinuitas produk
		Masih terbatasnya pasar produk (pasar tradisional dan pasar non-tradisional)	Belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan
<b>Perindustrian</b>	Sektor industri pengolahan belum menjadi penyumbang	Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan	Lambatnya pertumbuhan investasi IKM
			Belum terkoneksi lulusan SMA/SMK dengan industri

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	terbesar PDRB	mengengah	Integrasi proses hulu-hilir dan antar sektor belum optimal
<b>Energi Sumber Daya Mineral</b>	Belum memadainya cakupan layanan ketenagalistrikan	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T	Belum optimalnya ketersediaan jaringan kelistrikan
			Masih terbatasnya daya listrik yang tersedia
			Keterjangkauan pembangkit listrik besar terbatas terhadap wilayah 3T
			Belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

#### 4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Pelaksanaan fungsi penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan  
Pengembangan**

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan</b>	Masih perlunya peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penetapan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur perencana
		Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan	Masih adanya tumpang tindih terkait fungsi pengendalian realisasi target

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
			perencanaan
		Masih perlunya tindak lanjut hasil penelitian	Perlu ditingkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan
<b>Keuangan</b>	Masih perlu ditingkatkannya tata kelola keuangan dari sisi pengelolaan pendapatan dan pelaporan	Pengelolaan anggaran yang defisit dan fluktuasi pendapatan	Fluktuasi anggaran dari DBH sumberdaya alam
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pusat
			Belum stabilnya kapasitas PAD
			Belum optimalnya kapasitas BUMD
		Belum optimalnya legalisasi aset daerah	Belum optimalnya kapasitas untuk mengidentifikasi aset daerah hasil pelimpahan kewenangan
Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah		
	Belum proporsionalnya tenaga auditor dengan obyek pengawasan		
<b>Pengawasan</b>	Masih perlunya penegakan integritas lembaga dan aparatur pemerintahan	Belum optimalnya upaya penerapan zona integritas pada perangkat daerah	Belum optimalnya komitmen aparatur dalam penerapan zona integritas
		Belum optimalnya kontrol atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Belum optimalnya penerapan survei indeks persepsi korupsi. Survei IPK hanya pada unit layanan perijinan
<b>Kepegawaian</b>	Masih perlunya peningkatan profesionalitas	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang

<b>Urusan</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
	aparatur		belum diimplementasikan secara optimal
		Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian	Data kepegawaian yang belum lengkap
		Belum optimalnya kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan lembaga sertifikasi profesi
			Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	Masih perlunya peningkatan profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
		Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian	Data kepegawaian yang belum lengkap
		Belum optimalnya kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan lembaga sertifikasi profesi
		Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat	
<b>Kesekretariatan</b>	Masih perlunya peningkatan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi dalam	Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda	Belum optimalnya fasilitasi legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat
		Belum optimalnya akuntabilitas	Integrasi perangkat daerah dalam sistem

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	kinerja pemerintah provinsi	akuntabilitas kinerja yang belum optimal
		Belum optimalnya kontrol atas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Pelaksanaan SPM yang belum dikendalikan dengan baik
			Belum optimalnya penyelenggaraan survei IKM pada berbagai unit pelayanan
		Belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Masih perlunya peningkatan pembinaan pada kabupaten/kota terutama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja

## 4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan.

### 4.2.1 Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

#### **A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

## **B. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri 4.0. Dengan ketersediaan

teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk mendukung partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

### **C. Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)**

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Ekonomi hijau mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan ekologi dan sosial-budaya masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi hijau tersebut menjadi pedoman perubahan paradigma pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus didukung keberlanjutan ekologi. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Misalnya pada sektor perkebunan, dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Pada sektor perikanan dilakukan dengan mendorong budidaya perikanan darat yang tidak membuka seluas-luasnya Kawasan berhutan, namun dilakukan dengan integrasi perikanan dan hutan (aquasilviculture), serta menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan bagi perbenihan biota air di alam (*reservat*).

#### **D. Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (Paris Agreement)**

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa.

#### **4.2.2 Isu Nasional**

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

*NAWA CITA* ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

**Tabel 4.68.**  
**Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025**

RPJMN I (2005-2009)	<b>Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang</b> Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	<b>Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang</b> Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	<b>Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang</b> Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	<b>Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur</b> Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

*Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.*

#### **4.3 Rumusan Isu Strategis**

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa aspek pertimbangan, seperti sinergitas dengan RPJPD, isu internasional, kesepatakan regional-global dan perumusan masalah per-urusan yang disusun berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah di BAB II. Berikut adalah isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur :

##### **1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia**

Peningkatan daya saing sumber daya manusia dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas, berikut tenaga bagi industri hilir pertanian dalam arti luas. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan kemahalan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

**2. Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal**

Mengingat semakin langkanya dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan tanam tahunan, baik pertanian, perkebunan, maupun perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah. Pengembangan sentra perikanan modern pada Kawasan danau Mahakam, dan sepanjang pesisir timur, menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, isu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

**3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada pusat-pusat produksi**

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam RTRW Kaltim, dikuatkan oleh infrastruktur yang optimal, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

**4. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Hidup**

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang tersisa, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah industri pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola bencana, diantaranya melalui Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman

Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, peringatan dini dan pemulihan pasca bencana.

**5. Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel**

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, misalnya terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja secara administratif maupun sosial. Indikator akuntabilitas yang bersifat administrative dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Provinsi Kalimantan Timur mencapai nilai SAKIP “BB” pada 2017 dan status “Sangat Tinggi” dengan menduduki peringkat 8 pada penilaian EKPPD. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Sementara indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016. Dari sisi transparansi terkait dengan tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi publik, dimana Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat 3 secara nasional pada tahun 2016 menurun menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Dari sisi partisipasi masyarakat juga belum

optimal yang dapat dilihat dari kualitas demokrasi daerah. Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, yakni dari tahun 2015 sebesar 81,14 menjadi 73,64 pada 2016. Ketiga aspek Indeks demokrasi yakni kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah (zona bebas korupsi).

Dengan melihat berbagai persoalan di atas, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting dan harus segera diselesaikan.

## **BAB 5**

### **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada setiap tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut adalah penekanan 5 tahunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 5.1**

**Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur**

<b>Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)</b>	<b>Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)</b>	<b>Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)</b>	<b>Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)</b>
<p>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</p>	<p>Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</p>	<p>Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</p>	<p>Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.</p> <p><b>Keyword:</b> Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</p>

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ke-4 memiliki penekanan pembangunan yaitu: “Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan

efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Penekanan tersebut mengharapkan pemerintah daerah maupun masyarakat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna mengoptimalkan potensi daerah.

#### A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 5.2.  
Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan  
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang <b>Berdaulat</b> , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur yang <b>Berdaulat</b>

Berikut adalah penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023:

**Tabel 5.3.**  
**Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki <b>kemantapan</b> dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan <b>kemandirian</b> dalam ekonomi kerakyatan dan kecukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan <b>kemandirian</b> dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki <b>daya saing</b>

## **B. Misi Daerah**

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan layanan alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas SDM di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang harus dapat dituntaskan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas kawasan menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien, serta berdampak rendah terhadap lingkungan hidup. Dalam upaya mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, **pendidikan vokasi**, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, **untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur**. SDM yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama dan **integrasi budaya local** penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

## **Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di

suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, **serta mengoptimalkan produksi** perikanan dan kelautan, peternakan, **perkebunan dan kehutanan**.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan.

Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, **serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan**. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. **Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat**.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif melainkan pada paradigma pondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, **kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi**, usaha pertanian rakyat, serta peran **BUMDES dan koperasi** sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

### **Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas

akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada transformasi dari sektor primer ke struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi, memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan serta mewujudkan ketahanan energi.

**Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

**Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar

*good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, membenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan membenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berupaya untuk meningkatkan keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas dan kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

### C. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD**  
**Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat**

No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
		Sasaran 1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
		Sasaran 2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		Sasaran 3. Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8	73,8
		Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91	5,42	5,1	5	4,75	4,5	4,5
		Sasaran 4. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56,7	56,71	56,72	56,73	56,75	56,75
		Sasaran 5. Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		Sasaran 6. Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55
		2	BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Tujuan 3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,19	6,00	5,94	5,87	5,78
Sasaran 7. Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)			12,18	12,83	12,87	12,92	12,98	13,53	13,53
Sasaran 8. Meningkatkan keberdayaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat			518	503	478	448	413	368	368

No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Masyarakat Perdesaan	tertinggal (desa)							
		Sasaran 9. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
		Tujuan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
			Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	5,24 (TW3)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
		Sasaran 10. Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	20	20	20	21	21	21
		Sasaran 11. Meningkatkan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25,53	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29
		Sasaran 12. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
			Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,82	62,46	67,41	72,69	78,40	84,53	84,53
		Sasaran 13. Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Sasaran 14. Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
		Sasaran 15. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,48	1,5	1,55	1,6	1,65	1,65
		Sasaran 16. Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan	1,15	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2

No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
3	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	terhadap ekonomi daerah	terhadap PDRB (%)							
		Sasaran 17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8,16	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
		Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326	0,326
		Sasaran 18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000	12.050.000
			Jumlah barang (ton)	325.051.663	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000	376.900.000
		Sasaran 19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2	3	3	3	6	6
		Sasaran 20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	73,33	74,83	76,33	77,83	79,33	79,33
			Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	5,25	5,64	6,44	7,19	7,89	8,557	8,557
			Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	664,2	575	505	435	365	365
		Sasaran 21. Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	364,45	260,5	175	100	50	0	0
		Sasaran 22. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09	83,09
Sasaran 23. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00	95,00		
4	BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	Tujuan 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,65	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	76,15
		Sasaran 24. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7,2	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33	29,33
		Sasaran 25. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0	145	140	135	130	125	125

No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
5	BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	Tujuan 7. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,93)	B (69,50)	B (70,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)	B (74,50)
		Sasaran 26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
		Sasaran 27. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81	81,50	82	82,50	83	83
		Sasaran 28. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

**Bab V disesuaikan dengan kertas kerja terakhir (pake file tabel bab 2 86 vs tpb merger bappeda, 19 Januari 2019 Balikpapan)**

## BAB 6

### Strategi dan Arah Kebijakan

#### A. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan harus memiliki kesesuaian dengan masalah dan akar masalah yang menyebabkan munculnya isu-isu strategis daerah. Kondisi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan utama yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi. Berikut adalah uraiannya:

**Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Timur**

#### Visi : Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
<b>MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS</b>				
Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat	Penguatan ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	Pilar IV. Hukum dan Tata Kelola  Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Pengembangan Demokrasi di Daerah  Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pilar I: Sosial  Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana), <b>dengan prioritas Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara</b>

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
				<p>Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School), utamanya pada wilayah 3T</p> <p>Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan, dengan prioritas wilayah 3T</p> <p>Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS, terutama bagi yang berasal dari wilayah 3T</p> <p>Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh</p> <p>Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak</p> <p>Meningkatkan pengembangan perpustakaan digital pada tingkat kabupaten/kota</p>
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pilar Sosial  Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
				Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit, di Berau, Paser, dan Kutai Barat
				Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada wilayah 3T
				Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Pilar I: Sosial  Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan Tujuan 5. Kesetaraan Gender	Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat
				Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
				Meningkatkan akses dan keterampilan pemuda perempuan, dan penyandang disabilitas dalam berwirausaha
	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda berwirausaha	Pilar I: Sosial  Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
<b>MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN</b>				
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pilar 1. Sosial  Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan  Pilar II: Ekonomi  Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis
				Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
				UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan
	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	Pilar 1. Sosial Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan  Pilar II: Ekonomi  Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa di wilayah 3T Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan	Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan pariwisata Kaltim Optimalisasi peran Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Koordinasi antar sektor dalam rangka integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor
	Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 8. Pekerja Layak dan	Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
			Pertumbuhan Ekonomi	efektivitas pengendalian rencana investasi
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan	Pilar I: Sosial  Tujuan 2. Tanpa Kelaparan  Pilar II: Ekonomi  Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	Pengembangan padi lahan kering/padi ladang dan padi sawah dengan prioritas di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara
Penyediaan Alat dan mesin pertanian serta Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)				
Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan				
Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor hortikultura		Pengembangan kawasan hortikultura pola pekarangan		
		Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura		
		Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi hortikultura		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Hortikultura		
	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Pengembangan Kawasan Pertanian (Zona Pengembangan Peternakan)	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	Pembangunan Miniranch sapi
Penyediaan Informasi Peternakan				
Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak				
Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB				
		Peningkatan populasi dan produktivitas ternak		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak
	Meningkatnya kontribusi sektor	Peningkatan produksi dan nilai	Pilar II: Ekonomi	Peningkatan produktivitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
	perkebunan terhadap ekonomi daerah	tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan  Pilar III. Lingkungan  Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim Kebijakan  Tujuan 15. Ekosistem Daratan	komoditi perkebunan unggulan dengan prioritas di Kabupaten Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan, dengan prioritas Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau dan Paser Meningkatkan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir Meningkatkan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani Mengelola areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi Meningkatkan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan, prioritas di kabuapten Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan di seluruh perijinan
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan  Pilar III. Lingkungan  Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim Kebijakan Tujuan 14. Ekosistem Lautan	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan, di Kabuapten Paser, PPU, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan, di Berau, Kutai Kartanegara, PPU Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan di Kawasan Mahakam Tengah dan pesisir Kaltim
	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	Pilar II: Ekonomi Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan di seluruh perijinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
			Pertumbuhan Ekonom Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kawasan hutan lindung
			Pilar III. Lingkungan Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	Memulihkan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi pada lahan sangat kritis dan kritis
			Kebijakan Tujuan 15. Ekosistem Daratan	Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan, pada areal indikatif perhutanan social
	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pilar II: Ekonomi Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom	Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam
<b>MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN</b>				
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayanan
				Penegakan aturan dan pengawasan penggunaan sarana perhubungan
				Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat
	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas daerah	Pilar II: Ekonomi  Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan
				Menghubungkan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah
	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air	Pilar III: Pembangunan Lingkungan Tujuan 6. Air	Peningkatan infrastruktur air baku
Peningkatan infrastruktur layanan				

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
		bersih	Bersih dan Sanitasi Layak	air minum
	Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pilar III: Pembangunan Lingkungan Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Pilar I. Sosial Pilar II. Ekonomi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Pilar II. Pembangunan Ekonomi Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkauan	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
<b>MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN</b>				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pilar III: Pembangunan Lingkungan  Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
				Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan pertumbuhan daerah
	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Pilar III: Pembangunan Lingkungan  Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
<b>MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>				
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	Pilar III. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola  TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
				Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	TPB	Arah Kebijakan
publik	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/ teknologi informasi	Kelembagaan yang Tangguh	Peningkatan tatakelola pemerintah yang baik
				Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah		Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah
				Meningkatnya kapabilitas APIP

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

- ~~1. Uraian tentang strategi yang mengakomodir tujuan dan strategi pembangunan berkelanjutan (SDG's) sesuai dengan kondisi dan permasalahan di daerah~~
2. uraian arah kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dan pentahapan pembangunan tematik tahunan (tema pertahun yang dibuat pak sony, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota)
- ~~3. Uraian tentang fokus lokasi dalam program yang direncanakan (d disesuaikan dengan uraian analisis kewilayahan pada Bab II)~~

~~4. Substansi strategi dan arah kebijakan disesuaikan dengan kertas kerja (pake file tabel bab 2 86 vs tpb merger bappeda\_sore, 19 Januari 2019 Balikpapan)~~

5. pembiayaan untuk program unggulan dan prioritas pakai perhitungan pake file tabel bab 2 86 vs tpb merger bappeda\_sore , 19 Januari 2019 Balikpapan.

6.

Kesembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Tematik pembangunan setiap tahun diprioritaskan, dengan tidak meninggalkan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang telah termuat pada tabel 6.1, meliputi:

<b>Tahun</b>	<b>Arahan Tematik Tahunan</b>
2019	Pembenahan Regulasi Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah untuk Memperkuat Daya Saing Daerah dalam rangka optimalisasi produksi dan hilirisasi industri
2020	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi

<b>Tahun</b>	<b>Arahan Tematik Tahunan</b>
2021	Menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan
2022	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas
2023	Penguatan pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi Kalimantan Timur

**B. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (*Dedicated Program*)**

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah

14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan

34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh SKPD terkait. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif**

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggunjawa b	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
<b>MISI 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas</b>																	
		Program Pengembang an Nilai Budaya	Persentase budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan (orang)		125	990,000,000	150	1,039,500,000	175	1,091,475,000	200	1,146,048,750	250	1,203,351,188	300	5,470,374,938	Disdikbud
		Sasaran 2: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,70 (2017)													
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan (Rumah Sakit)		4	1,891,720,000	4	1,900,000,000	4	2,090,000,000	4	2,299,000,000	4	2,528,900,000	4	10,709,620,000	Dinas Kesehatan
		Program standarisasi Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi (Puskesmas)		180	7,645,480,932	180	7,645,480,932	180	7,645,480,932	180	7,645,480,932	180	7,645,480,932	900	38,227,404,660	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan	Persentase tenaga		6	1,800,000,000	6	1,800,000,000	6	1,800,000,000	6	1,800,000,000	6	1,800,000,000	30	9,000,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Daerah 3T	kesehatan promotif dan preventif di puskesmas yang ditempatkan di daerah 3T sesuai standar kesehatan (Rumah)														
		Sasaran 3: Meningkatkan dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36 (2017)													
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49 (2017)													
		Program peningkatan pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (Orang)	40.000	40.000	23,234,000,000	40.000	23,466,340,000	40.000	23,701,003,400	40.000	23,938,013,434	40.000	24,177,393,568	98%	118,516,750,402	Disdikbud
		Pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem	Meningkatnya kualitas pendidikan melalui sistem	0	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	50	7,500,000,000	Disdikbud

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangu n Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawa b	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		pendidikan jarak jauh (Distance Learning System)	pendidikan jarak jauh (Distance Learning System) berbasis internet (%)														
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (%)	95	100	11,400,000,000	100	11,514,000,000	100	11,629,140,000	100	11,745,431,400	100	11,862,885,714	100	58,151,457,114	Disdikbud
		Program pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	68,23 (APM 2017) 99,51 (APK 2017)	85%	102,391,425,333	87%	104,439,253,839.66	89%	106,528,038,916.45	91%	108,658,599,694.78	93%	110,831,771,688.68	95%	532,849,089,473	Disdikbud
		Program pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	68,23 (APM 2017) 99,51 (APK 2017)	95%	122,531,730,333	95%	123,757,047,636	96%	124,994,618,113	96%	126,244,564,294	97%	127,507,009,937	97%	625,034,970,313	Disdikbud
		Sasaran 4: Meningkatkan pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	85,62 (2017)													

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		85.65	452,255,000	88	497,500,000	90	547,250,000	94	601,975,000	97	662,172,500	97	2,761,152,500	DKP3A
		Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan bagi perempuan		50 Orang	124,000,000	450 Orang	1,000,000,000	2000 Orang	4,124,000,000	DKP3A						
		Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Kepemudaan	56,33 (2017)													
		Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase Masyarakat berolahraga	0	3%	1,341,400,000	5%	1,408,470,000	7%	1,478,893,500	9%	1,552,838,175	11%	1,630,480,084	13%	7,412,081,759	DISPORA
		Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda yang mandiri	0	450 orang	1,780,850,000	500 orang	1,869,892,500	550 orang	1,963,387,125	600 orang	2,061,556,481	650 orang	2,164,634,305	700 orang	9,840,320,412	DISPORA
		Program Pemberdayaan Kepemudaan	Persentase Pemuda yang berwirausaha	0	450 orang	1,405,050,000	500 orang	1,475,302,500	550 orang	1,549,067,625	600 orang	1,626,521,006	650 orang	1,707,847,057	700 orang	7,763,788,188	DISPORA
		Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga berprestasi	0	5%	3,745,600,000	7%	3,932,880,000	9%	4,129,524,000	11%	4,336,000,200	13%	4,552,800,210	15%	20,696,804,410	DISPORA
		Sasaran 6: Meningkatnya perlindungan anak	Pemenuhan kebutuhan hak anak														
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya akses sapras anak berkebutuhan	2222 orang	2222 orang	3,000,000,000	2222 orang	15,000,000,000	Disdikbud								

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangu n Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawa b
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Anak Berkebutuhan khusus	khusus														
	Program pendidikan Anak Putus sekolah	Persentase anak putus sekolah yang bersekolah	23%	22%	500,000,000	21%	500,000,000	20%	500,000,000	19%	500,000,000	18%	500,000,000	18%	2,500,000,000	
	Program Perlindungan Pekerja Anak	Menurunnya jumlah pekerja anak		1 Cluster	154,000,000	1 Cluster	169,400,000	1 Cluster	186,340,000	1 Cluster	204,974,000	1 Cluster	225,471,400	5 Cluster	940,185,400	DKP3A
	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina (anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kecacatan, balita)		60 Orang	877,050,000	60 Orang	900,000,000	60 Orang	990,000,000	60 Orang	1,089,000,000	60 Orang	1,197,900,000	300	5,053,950,000	Dinsos
<b>MISI 2: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan</b>																
	<b>Tujuan:</b> Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini														
		Inflasi	3,61 (TWI)	3,5 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		
	<b>Sasaran:</b> Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)														
	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan		6.150 orang	970.950.000	6.750 orang	1.065.676.500	6.500 Orang	1.026.207.000	2000 orang	315.756.000	1000 orang	157.878.000	23.000 Orang	4.562.674.500	DINAS SOSIAL

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kebutuhan Dasar													
				Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran													
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (tenaga kerja bersertifikat)	500 Orang	11.071.100.000	500 Orang	11.000.000.000	500 Orang	11.000.000.000	500 Orang	11.000.000.000	500 Orang	11.000.000.000	2.500 Orang	55.071.100.000	DISNAKERTRANS
				Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	200	750.000.000	200	800.000.000	200	850.000.000	200	900.000.000	200	950.000.000	1000	4.250.000.000	DISPERINDAGKOP
				Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1000	750.000.000	1000	800.000.000	1000	850.000.000	1000	900.000.000	1000	950.000.000	5000	4.250.000.000	DISPERINDAGKOP
				Program penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	5.000	2,125 M	45.526	10,625 M	DPUPR								
				Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Pangan	96	98,20	98,75		99,00		99,5		100		100		
03	46			Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang	80%	1.575.690.400	81%	1.733.259.440	82%	1.906.585.384	83%	2.097.243.922	84%	2.306.968.314	84%	9.619.747.461	DINAS PANGAN TPH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			bersertifikat														
03	51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	385.544 Ton	510.000 Ton	9.374.580.000	522.750 Ton	10.312.038.000	535.819 Ton	11.343.241.800	549.214 Ton	12.477.565.980	562.945 Ton	13.725.322.578	562.945	57.232.748.358	DINAS PANGAN TPH
03	25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah kecamatan rawan pangan														DINAS PANGAN TPH
			Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	96 Poin	98,20 Poin	1.100.000.000	98,75 Poin	1.210.000.000	99,0 Poin	1.331.000.000	99,5 Poin	1.464.100.000	100 Poin	1.610.510.000	100 Poin	6.715.610.000	
03	34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)		118	5.800.000.000	118,5	7.000.000.000	118,5	7.200.000.000	119	7.400.000.000	119	7.600.000.000	118	35.000.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Miniranch	0	5		35		40		35		35		150		
03	90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi		19%	6.025.000.000	19%	6.025.000.000	19%	6.025.000.000	19%	6.025.000.000	19%	6.025.000.000	19%	30.125.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
03	46		Calving Interval (Bulan)		18		18		18		18		18		18		
		Program pengelolaan sumber daya air	Luas lahan pertanian beririgasi pada DI kewenangan provinsi	5.247 Ha (2017)	700 Ha	30 M	800 Ha	40 M	750 Ha	35 M	700 Ha	30 M	667 Ha	25 M	9.064 Ha	160 M	DPUPR
		Tujuan: Mewujudkan	Laju Pertumbuhan	3,13	2,3 ± 1		2,8 ± 1										

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		struktur ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan	Ekonomi (%)	(2017)													
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya realisasi nilai investasi sektor sekunder dan tersier	Nilai investasi sektor sekunder dan tersier (triliun Rupiah)	28.202 (2017)	30		35		40		45		50		50		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri)	0	7	1.245.000.000	10	1.369.500.000	10	1.369.500.000	10	1.369.500.000	10	1.369.500.000	47	6.723.000.000	DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal (MoU)		2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	10	5.750.000.000	DPMPTSP
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	73,18 % (2017)	66,71%	10 M	73,46%	10 M	81,04%	10 M	84,14%	10 M	86,19%	10 M	86,19%	50 M	DPUPR
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa (%)	25 (2017)	26		27		28		29		30		30		
		Program Peningkatan dan Pengembangan	Pertumbuhan industri olahan (%)	3,47	5,6	1.025.000.000	5,7	1.100.000.000	6,2	1.150.000.000	6,5	1.200.000.000	7,00	1.250.000.000	7,00	5.725.000.000	DISPERINDAGKOP

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangu n Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggunjawa b	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		n Industri															
		Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri)	0	7	1.245.000.000	10	1.369.500.000	10	1.369.500.000	10	1.369.500.000	10	1.369.500.000	47	6.723.000.000	DPMPTSP
		Program Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Milyar Rupiah)		1,3	-	1,43	139.000.000	1,57	146.000.000	1,72	153.000.000	1,89	161.000.000	1,89	599.000.000	DISPERINDAGKOP
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3,5	4	894.500.000	4,5	939.200.000	5	986.130.000	5,5	1.035.420.000	6	1.087.200.000	6	4.942.450.000	DISPERINDAGKOP
		Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembanga nya	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	5	10.000.000.000	DISPAR
		Program pengembanga n pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.000.000.000	DISPAR
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kontribusi lapangan	Kontribusi lapangan usaha pertanian (%)	8,08													

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu an Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangu an Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawa b	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		usaha pertanian															
		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	63.510	70533 Ton	15.885.275.000	74.060	19.064.550.000	77.763	23.560.545.000	81.651	30.639.970.500	90.000	40.199.447.325	90.000	127.829.012.825	DINAS PERKEBUNAN
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	13.164.310	1519750 4 ton		16.717.254		17.036.402		18.020.894		18.197.504		18.197.504		
			Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	2.435	3006 ton		3.307		3.771		4.368		5.000		5.000		
			Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	6.057	5317 ton		5.849		6.434		7.077		8.517		8.517		
			Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	13.647	12105 Ton		12.468		12.479		12.368		12.500		12.500		
		Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115.000	1.646.000	1.471.188.000	1.727.000	1.618.306.800	2.227.000	1.780.137.480	2.227.000	1.958.151.228	2.253.000	2.153.966.350	10.080.000	8.981.749.858	DINAS PERKEBUNAN
		Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih (USULAN PRIORITYAS BARU)	Jumlah peredaran benih yang unggul dan bermutu (benih)	4.003.296	2.000.000	1.023.450.000	2.000.000	1.154.462.500	2.000.000	1.327.631.875	2.000.000	1.526.776.656	2.000.000	1.755.793.154	10.000.000	6.788.114.185	DINAS PERKEBUNAN
		Program Pengembang	Jumlah Produksi		118.580	4.450.000.000	121.188	4.895.000.000	123.854	5.384.500.000	126.332	5.922.950.000	128.858	6.515.245.000	128.858		DINAS KELAUTAN

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		n Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap		Ton		Ton		Ton		Ton		Ton		Ton		DAN PERIKANAN
		Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi		3000.00 0.000 Benur	10.486.425.000	3000.00 0.000 Benur	11.535.067.500	3000.00 0.000 Benur	12.688.574.250	3000.00 0.000 Benur	13.957.431.675	3000.00 0.000 Benur	15.353.174.843	3000.00 0.000 Benur		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Dihilangkan		65000 Ekor	421.000.000	65000 Ekor	463.100.000	65000 Ekor	509.410.000	65000 Ekor	560.351.000	65000 Ekor	616.386.100	65000 Ekor	2.570.247.100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengolahan Produksi Hasil Perikanan	63.573 (2017)	32.600		34.200		35.900		37.400		40.100		180.200		
<b>MISI 3: Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan</b>																	
		Tujuan 1: Meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Infrastruktur Dasar	Kinerja pelayanan infrastruktur dasar (%)	65	65		69		73		77		85		85		
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan energi untuk pemenuhan kebutuhan daerah	Rasio elektrifikasi (%)	88,88													
		Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan jaringan TIK yang andal bagi seluruh masyarakat dan	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi telekomunikasi dan														

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangu n Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggunjawa b	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		menjangkau seluruh wilayah															
		Sasaran 3: Meningkatkan sistem layanan air minum dan sanitasi	Persentase populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (%)	82.75	84.20	85.65		87.10		88.55		90		90			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.672 (2017)	500	-	400	56.000.000.000	300	160.000.000.000	262	800.000.000.000	-	-	9.104	1.016.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
		Program Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan Air Minum Perpipaian (%)	60,23 (2017)	65.23	50.000.000.000	70	50.000.000.000	75	50.000.000.000	80	50.000.000.000	85	50.000.000.000	85	250.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
		Sasaran 4: Mengurangi luas genangan banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir (%)	4.40	4.40		7.12		11.23		27.67		52.33		52.33		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Genangan Banjir (Ha)	730 (2017)	-	-	710	80.000.000.000	680	100.000.000.000	560	125.000.000.000	380	200.000.000.000	380	505.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
		Sasaran 5: Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi (%)	0.00	3.77		12.87		28.53		41.41		55.21		55.21		
		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	5.940	5.000	62.500.000.000	5.000	62.500.000.000	5.000	62.500.000.000	5.000	62.500.000.000	5.000	62.500.000.000	30.940	312.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang &

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Permukiman	(unit)														Perumahan Rakyat
		Tujuan 2: Mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada kawasan strategis provinsi														Setda
		Sasaran 1: Meningkatnya konektifitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3			
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	51,51 (2017)	60	2.100.000.000.000	65	2.100.000.000.000	70	2.800.000.000.000	75	2.800.000.000.000	80	2.800.000.000.000	80	12.600.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
		Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah prasarana perhubungan laut dan SDP yang melayani pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman	10 Derma ga SDP; 13 Pelabu han Laut	2 Dermaga SDP	20.000.000.000	2 Dermag a SDP	20.000.000.000	1 Dermag a SDP	10.000.000.000	1 Dermag a SDP	10.000.000.000	1 Pelabu han Laut	20.000.000.000	16 Dermag a SDP; 14 Pelabu han Laut	80.000.000.000	Dinas Perhubungan
<b>MISI 4: Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan</b>																	
		<b>Tujuan:</b> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	IKLH	82,64 (2017)													

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Sasaran: Menurunnya emisi GRK	Emisi GRK(ton Co2/%)	1.515 (2017)													
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	5 Dokumen	-	-	89,1	1.900.000.000	89,2	2.000.000.000	89,3	2.200.000.000	89,3	2.400.000.000	89,3	8.500.000.000	DLH
			Indeks Kualitas Air		-		74,5		75		75,5		76		76		
			Indeks Pencemaran		-		ringan (1-5)		ringan (1-5)		ringan (1-5)		ringan (1-5)		ringan (1-5)		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-		70,19		71,59		73,02		74,48		74,48		
			Penurunan Beban Pencemaran		-		80%		85%		85%		90%		90%		
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	75	1.805.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.805.100.000	DLH
		Program Tata Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	57,33 Juta Ton CO2eq	-	-	26,9%	2.500.000.000	27,75%	2.500.000.000	28,5%	2.700.000.000	29,33%	4.700.000.000			DLH
		Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	57,33 Juta Ton CO2eq	26,30%	1.072.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072.000.000	DLH
		Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Hutan dan	Menurunnya Presentase Luas Kebakaran Hutan dan	676 Ha	2%	45.249.174	2%	45.249.174	2%	45.249.174	2%	45.249.174	2%	45.249.174			Dishut

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangu n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawa b
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Lahan (DBH DR)	Lahan													
		Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan	6	≤ 2 %	6.500.000	≤ 1,75 %	7.150.000	≤ 1,5 %	7.865.000	≤ 1,25 %	8.651.000	≤ 1 %	9.516.000		Dishut
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Prosentase peningkatan luas penanaman	50 Ha	1%	18.062.535	1%	18.062.535	1%	18.062.535	1%	18.062.535	1%	18.062.535		Dishut
		Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan	7.475 Ha	4,60%	26.300.000	4,60%	26.300.000	4,60%	26.300.000	4,60%	26.300.000	4,60%	26.300.000		Dishut
		Program Pengelolaan Tahura	Meningkatnya Luas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi karbon	-	100 Ha	5.000.000	150 Ha	8.750.000	200 Ha	12.500.000	250 Ha	16.250.000	300 Ha	20.000.000		Dishut
		Program Penyuluhan, Pemberdayaa n Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Permohonan Perhutanan Sosial (Bertambahny a Luasan Permohonan Perhutanan Sosial)	5 KTH	50.000 Ha	3.649.320	50.000 Ha	3.104.820	50.000 Ha	3.104.820	50.000 Ha	3.104.820	50.000 Ha	3.104.820		Dishut
		Program Pengelolaan KPHP	Meningkatnya unit usaha Produktif kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan	10%	32	76.400.000	32	96.000.000	32	118.850.000	32	138.700.000	32	143.950.000		Dishut

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Hutan Lestari															
		Menurunnya Kerusakan hutan pada Kawasan Hutan	-	20	6.500.000.000	20	6.500.000.000	20	6.500.000.000	20	6.500.000.000	20	6.500.000.000				Dishut
		Program Mitigasi emisi Gas Rumah Kaca Bidang Perkebunan		4785 Juta ton CO2eq	850.000.000		977.500.000		1.124.125.000		1.292.743.750		1.486.655.312		5.731.024.062		DINAS PERKEBUNAN
		Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	25	25		25		25		25		25		25			DINAS PERKEBUNAN
		Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	187	187	878.975.000	187	1.010.821.250	187	1.162.444.437	187	1.336.811.103	187	1.537.332.768	187	5.926.384.559		DINAS PERKEBUNAN
		Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	25	200 Ha	1.133.182.200	200	1.303.159.530	200	1.498.633.459	200	1.723.428.478	200	1.981.942.750	800	7.640.346.418		DINAS PERKEBUNAN
		Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada daerah dan berkelanjutan															

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Sasaran : Pendapatan daerah dari sektor sumber daya alam	Nilai Pendapatan Daerah (Triliun Rupiah)														
		Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	100%	2.832.280.000	100%	3.114.408.000	100%	3.425.848.800	100%	3.768.433.680	100%	4.145.277.048	100%	17.286.247.528	BAPENDA
		Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%	100%	1.045.400.000	100%	1.151.040.000	100%	1.266.144.000	100%	1.392.758.400	100%	1.532.034.240	100%	6.387.376.640	BAPENDA
		Sasaran : Pemanfaatan kawasan hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat															
		Program Pengelolaan KPHP	Meningkatnya unit usaha Produktif kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Lestari	10%	32	16,000,000,000	32	19,200,000,000	32	26,000,000,000	32	26,000,000,000	32	34,000,000,000	32	121.200.000.000	DISHUT
			Menurunnya Kerusakan hutan pada Kawasan Hutan (%)	5.413.2 15,49 Ha	20%	65,000,000,000	20%	69,800,000,000	20%	77,600,000,000	20%	77,600,000,000	20%	70,400,000,000	20%	360.400.000.000	DISHUT

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
<b>MISI 5: Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>																	
		<b>Tujuan:</b> Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (2017)													
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	Nilai SAKIP														
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKjIP sesuai aturan		80	153.900.000	85	190.900.000	90	200.000.000	95	220.000.000	95	240.000.000	95	1.004.800.000	BIRO ORGANISASI
		<b>Sasaran:</b> Penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah	Porsi tugas/fungsi perangkat daerah yang tumpang tindih														
		<b>Sasaran:</b> Penataan tata laksana															
		<b>Sasaran:</b> Penataan peraturan perundang-undangan															
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56 (2017)													
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat		85	950.200.000	88	995.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	95	4.945.200.000	BIRO ORGANISASI

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018 )	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas pegawai														
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya harmonisasi antar pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota)	Proporsi kebijakan pembangunan provinsi yang diakomodir dalam kebijakan pembangunan kab/kota														
		<b>Tujuan:</b> Menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN															
		<b>Sasaran:</b> Meningkatnya peran aktif birokrasi dalam penegakan hukum demi terwujudnya keadilan sosial	Indeks Persepsi Korupsi/Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	5,56 (2017)													
		Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas		10	108.000.000	15	120.000.000	25	150.000.000	30	200.000.000	42	250.000.000	42	828.000.000	Inspektorat
		Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN		4 kegiatan	657.000.000		700.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	4 kegiatan	657.000.000	Inspektorat





## BAB 7

### Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

#### 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian sebagai berikut :

**Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Kode	KAPASITAS RIIL /BELANJA	Proyeksi							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	8.566.250.000.000	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000		
II	BELANJA	8.566.250.000.000	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000		
II	1	Belanja Tidak Langsung	5.193.673.675.886	4.568.665.185.244	4.560.047.696.919	4.656.747.548.408	4.855.192.561.147	4.984.864.345.131	
II	1	1	Belanja Pegawai	1.672.792.329.286	1.794.383.956.483	1.884.103.154.307	1.978.308.312.023	2.077.223.727.624	2.181.084.914.005
II	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
II	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	1	4	Belanja Hibah	1.055.451.599.600	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405
II	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
II	1	6	Belanja Bagi Hasil	1.890.570.835.000	1.858.916.562.356	1.760.579.876.207	1.763.074.569.980	1.862.604.167.118	1.888.414.764.721
II	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	551.858.912.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
II	1	8	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
II	2	Belanja Langsung	3.372.576.324.114	4.700.672.948.756	4.576.044.944.081	4.956.237.595.592	5.104.109.079.853	5.277.410.015.869	
II	2	1	Belanja Pegawai	215.026.293.328	292.679.854.329	342.737.894.290	350.384.137.960	358.271.238.306	366.406.782.313
II	2	2	Belanja Modal	1.527.763.510.934	2.014.660.536.164	2.078.122.343.053	2.243.583.196.859	2.250.106.067.560	2.280.755.908.688
II	2	3	Belanja Barang dan Jasa	1.629.786.519.852	2.393.332.558.263	2.155.184.706.738	2.362.270.260.773	2.495.731.773.987	2.630.247.324.868

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5(lima) tahun kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  6. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

**Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		<b>Urusan Wajib</b>															
		<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>															
1	0 1	<b>Pendidikan</b>															
1	0 1	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12,00%	185.000.000.000	185.000.000.000		185.000.000.000	185.000.000.000		185.000.000.000	185.000.000.000		925.000.000.000	Disdikbud
1	0 1	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		200 Unit	510.000.000	510.000.000		510.000.000	510.000.000		510.000.000	510.000.000		2.550.000.000	
1	0 1	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95 Orang	2.750.000.000	2.750.000.000		3.025.000.000	3.327.500.000		3.660.250.000	3.660.250.000		15.512.750.000	
1	0 1	1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Tahunan		12 Laporan	1.000.000.000	1.650.000.000		1.815.000.000	1.996.500.000		2.196.150.000	2.196.150.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1 0 1 1 9	Program Pendidikan Luar Biasa	Proporsi penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus yang menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA/SMK			29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209				
1 0 1 2 0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi			30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000			150.000.000.000	
1 0 1 2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			3.295.000.000,00		4.670.000.000,00		5.137.000.000,00		5.650.700.000,00		6.215.770.000,00			24.968.470.000,00	
1 0 1 2 3	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Proporsi siswa SMA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi penerima beasiswa prestasi yang berhasil menamatkan pendidikan			50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00			250.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 1 8	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Proporsi Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang berhasil menamat-kan pendidikannya			20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		22.000.000.000,00		24.200.000.000,00		33.275.000.000,00		88.335.500.000,00	
1 0 1 9	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		85%	102.391.425.333,00		82.123.092.000,00		90.335.401.200,00		99.368.941.320,00		109.305.835.451,50		483.524.695.305,00	
1 0 1 0	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK		95%	122.531.730.333,00		95.262.797.000,00		104.789.076.700,00		115.267.984.370,00		126.794.782.807,00		564.646.371.210,00	
	Program Pengembangan Kurikulum Kejuruan	Proporsi siswa SMA/SMK yang memiliki sertifikat keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja			20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		100.000.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pendidikan jarak jauh (Distance Learning System)	SMA/SMK di daerah 3 T yang terakses jaringan teknologi informasi penyelenggara pendidikan jarak jauh		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		100.000.000.000,00		
		Program pendidikan Anak Putus sekolah	Proporsi anak putus sekolah yang memperoleh pendidikan ketrampilan		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		50.000.000.000,00		
		Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Prevalensi Penyalahgunaan Napza usia 10-59 tahun		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		50.000.000.000,00		
1	02	<b>Kesehatan</b>															
1	027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 28.011.500.000		Dinkes
1	028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		85% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 24.243.895.000		Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 2 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95%	2.414.884.200	100%	1.710.000.000	100%	1.881.000.000	100%	2.069.100.000	100%	2.276.010.000	100%	10.350.994.200	
1 0 2 1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Predikat Nilai SAKIP PD		100%	547.750.000	100%	385.250.000	100%	423.775.000	100%	466.152.500	100%	512.767.750	100%	2.335.695.250	
1 0 2 1 5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial		95%	2.851.838.868	95%	3.510.000.000	95%	3.861.000.000	95%	4.247.100.000	95%	4.671.810.000	95%	19.141.748.868	
1 0 2 1 6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Rasio Analis Kesehatan per 100.000 penduduk			6.600.000.000		6.600.000.000		7.260.000.000		7.986.000.000		8.784.600.000		37.230.600.000	
1 0 2 1 7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan		Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan			10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		50.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 2 9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang mensosialisasikan kampanye gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat			100%	1.053.650.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.694.650.000	
1 0 2 2	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pravelensi penyakit menular				1.344.663.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		5.985.663.000	Dinkes
1 0 2 3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi			180	50.000.000.000	180	48.891.052.470	180	50.000.000.000	180	50.000.000.000	180	25.000.000.000	900	223.891.052.470	
1 0 2 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar			90%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.630.000.000	100%	3.993.000.000	100%	16.923.000.000	Dinkes
1 0 2 7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar			90%	3.000.000.000	100%	750.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	998.250.000	100%	10.748.250.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		mata															
1	0256	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)		80%	10.000.000.000	95%	10.000.000.000	95%	11.000.000.000	95%	12.100.000.000	95%	13.310.000.000	100%	56.410.000.000	
1	0259	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pandu PTM		30%	1.500.000.000	40%	500.000.000	50%	1.950.000.000	60%	2.145.000.000	70%	500.000.000	80%	6.595.000.000	
1	0247	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase layanan laboratorium sesuai standar		100%	4.600.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		20.600.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)
1	0207	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	40.000.000.000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	0207	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	3.260.000.000	RSUD AW. Syahrane
1	0226	Program Pengadaan,	Akreditasi Rumah Sakit			100.000.		75.000.000.		75.000.000.		75.000.000.		49.714.579.390		374.714.57	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit			000.000		000		000		000				9.390		
1	027	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik		25.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	33.000.000.000	100%	36.300.000.000	100%	134.300.000.000		
		Program kemitraan pelayanan kesehatan rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		55.000.000.000		
1	047	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan dasar masyarakat		454.000.000.000	100%	461.000.000.000	100%	507.100.000.000	100%	557.810.000.000	100%	613.591.000.000	100%	2.593.501.000.000		RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)
1	026	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		-		300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	1.392.300.000		
1	026	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	Akreditasi Rumah Sakit		75.000.000.000		75.000.000.000		75.000.000.000		75.000.000.000		75.000.000.000		375.000.000.000		RSUD Kanujoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		rumah sakit mata															
1	0227	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit		-	100%	2.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	2.662.000.000	100%	15.162.000.000		
1	0247	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat		100%	208.100.000.000	100%	210.000.000.000	100%	231.000.000.000	100%	254.100.000.000	100%	279.510.000.000	100%	1.182.710.000.000	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)
1	0207	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Adminstrasi Perkantoran		100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	38.196.463.000	
1	0208	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan		80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	100%	1.108.532.000	RSJD Atma Husada
1	0219	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)		95%	2.000.000.000	95%	1.120.000.000	95%	1.500.000.000	95%	1.800.000.000	95%	1.159.720.000	100%	7.579.720.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 2 2 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Akreditasi Rumah Sakit		100%	4.236.801.000	100%	4.200.000.000	100%	5.720.000.000	100%	6.292.000.000	100%	5.921.200.000	100%	26.370.001.000	
1 0 2 2 7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik		3 Jenis	4.000.000.000	3 Jenis	4.200.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		4.266.200.000		21.966.200.000	
	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	prevalensi penduduk yang mengalami gangguan jiwa, mental dan depresi			14.000.000.000		10.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		10.000.000.000		62.000.000.000	
1 0 2 4 7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat		95%	18.000.000.000		19.000.000.000		20.900.000.000		22.990.000.000		25.289.000.000		106.179.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	0	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja Internal OPD Terlayani Administrasi		4 Unit Kerja	8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		40.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
1	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kerja Internal OPD yang tercukupi Sarana dan Prasarana		4 Unit Kerja	9.260.057.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		37.260.057.000	
1	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	4.308.000.000		3.400.000.000		3.740.000.000		4.114.000.000		4.525.400.000		20.087.400.000	
1	0	0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (Target Dari Nilai LKJLP)		75,00%	982.000.000		950.000.000		1.045.000.000		1.149.500.000		1.264.450.000		5.390.950.000	
1	0	0	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	51,51% (2017)	60%	2.000.000.000	65%	2.200.000.000	70%	2.420.000.000	75%	2.662.000.000	80%	2.928.200.000	80%	12.210.200.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1 0 3 6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas lahan pertanian beririgasi pada DI kewenangan provinsi	5.247 Ha (2017)	700 Ha	88.000.000.000	800 Ha	88.000.000.000	750 Ha	88.000.000.000	700 Ha	88.000.000.000	667 Ha	88.000.000.000	9.064 Ha	160.000.000.000		
1 0 3 7	Program Infrastruktur Keciptakarya	Cakupan Air Minum Perpipaan	60,23% (2017)	65,23%	50.000.000.000	70%	50.000.000.000	75%	50.000.000.000	80%	50.000.000.000	85%	50.000.000.000	85%	250.000.000.000		
1 0 3 8	Program penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	jumlah tenaga kerja yang bersertifikat	20.526 orang (2018)	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	45.526	10.625.000.000		
1 0 3 9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah I		100,00 %	63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		315.000.000.000		
1 0 3 0	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Terpeliharanya sarana dan prasarana daerah irigasi, jalan dan jembatan serta terjaganya umur teknis dan ekonomis daerah irigasi, jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD PIPU Wilayah II		100,00 %	62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		312.500.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	031	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah III		100,00 %	50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		250.000.000.000	
1	030	Program penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	73,18 % (2017)	66,71%	5.000.000.000	73,46%	5.000.000.000	81,04%	5.000.000.000	84,14%	5.000.000.000	86,19%	5.000.000.000	86,19%	25.000.000.000	
		Program Pengelolaan Kawasan Danau	Kawasan Danau Kritis yang dikelola secara terpadu			40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		200.000.000.000	
		Program peningkatan prasarana dan sarana air bersih	Kapasitas Air Baku	7.672 L/detik (2017)	500 L/detik	80.000.000.000	400 L/detik	80.000.000.000	300 L/detik	80.000.000.000	262 L/detik	80.000.000.000	0	80.000.000.000	9.104 L/detik	1.016.000.000.000	
		Program penanggulangan Banjir	Luas Genangan Banjir		-	100.000.000.000	710 Ha	100.000.000.000	680 Ha	100.000.000.000	560 Ha	125.000.000.000	380 Ha	200.000.000.000	380 Ha	505.000.000.000	
1	04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>															
1	045	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perbaikan rumah keluarga pra sejahtera tidak layak huni	5.940 Unit	5.000 Unit	25.000.000.000	5.000 Unit	25.000.000.000	5.000 Unit	30.000.000.000	5.000 Unit	30.000.000.000	5.000 Unit	30.000.000.000	30.940 Unit	312.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
1057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran			100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	17.523.311.000	Satpol PP	
1058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			100%	1.781.566.000		720.808.500		1.781.566.000		1.781.566.000		720.808.500		6.786.315.000		
1059	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah			100%	1.148.692.500		420.900.000		1.148.692.500		1.148.692.500		500.000.000		4.366.977.500		
10510	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah			75%	500.000.000		250.000.000		450.000.000		455.000.000		185.000.000		1.840.000.000		
10560	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			85%	1.095.204.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.127.000.000		130.000.000		4.552.204.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1053	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertiban masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli		80%	1.057.411.800		650.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		700.000.000		4.907.411.800	
1054	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat		80%	753.975.500		770.000.000		790.000.000		800.000.000		820.000.000		3.933.975.500	
1055	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran		90%	626.163.000		640.000.000		660.000.000		670.000.000		685.000.000		3.281.163.000	
1057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%	573.186.000		573.186.000		573.186.000		573.186.000		573.186.000		2.865.930.000	Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	0	0	0	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana		12 Bulan	200.000.000	188.214.000	250.000.000	200.000.000	188.214.000	1.026.428.000			
1	0	0	0	9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	680.000.000	590.000.000	700.000.000	720.000.000	650.000.000	3.340.000.000			
1	0	1	1	0	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah		62%	100.000.000	145.000.000	150.000.000	200.000.000	155.000.000	750.000.000			
1	0	1	1	5	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik		104 Konflik	800.000.000	720.000.000	850.000.000	900.000.000	820.000.000	4.090.000.000			
1	0	1	1	7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa		100%	600.000.000	630.000.000	660.000.000	680.000.000	700.000.000	3.270.000.000			
1	0	2	2	1	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada		77,50%	2.492.300.000	1.150.000.000	2.200.000.000	2.250.000.000	1.300.000.000	9.392.300.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 5 2	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas		Meningkatnya Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas		1 Tahun	700.000.000		730.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		3.740.000.000	
1 0 5 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		8.441.750.000	
1 0 5 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	207.252.400		207.252.400		207.252.400		207.252.400		207.252.400		1.036.262.000	
1 0 5 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		85 Persen	477.277.600		700.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.427.277.600	
1 0 5 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Persen	117.500.000		400.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		2.117.500.000	
1 0 5 9	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		Jumlah penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana		85 Kali	355.020.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		2.605.020.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1051	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk		6 Desa/Kelurahan	750.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000			4.100.000.000	
1055	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		5 Persen	600.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000			3.250.000.000	
106	<b>Sosial</b>																
1067	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran		12 Bulan	4.779.987.500	12 Bulan	4.779.987.500	12 Bulan	6.779.987.500	12 Bulan	6.779.987.500	12 Bulan	4.779.987.500	100%	27.899.937.500		
1068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial		12 Bulan	1.781.704.000	12 Bulan	781.704.000	12 Bulan	2.781.704.000	12 Bulan	3.781.704.000	12 Bulan	781.704.000	100%	9.908.520.000		
1069	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		12 Bulan	1.880.873.500	12 Bulan	3.400.000.000	12 Bulan	3.740.000.000	12 Bulan	4.114.000.000	12 Bulan	4.525.400.000	100%	17.660.273.500		Dinas Sosial
1060	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan		55 Dokumen	261.100.000	55 Dokumen	400.000.000	55 Dokumen	440.000.000	55 Dokumen	484.000.000	55 Dokumen	532.400.000	100%	2.117.500.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Penyelenggaraan Pemerintahan															
1	0616	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		75 orang 353.300.000	200 orang 850.000.000,00		250 orang 935.000.000,00		300 orang 1.028.500.000,00		400 orang 1.131.350.000,00		1.225 4.298.150.000,00			
1	0617	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		60 orang 877.050.000	60 orang 900.000.000		60 orang 1.990.000.000		60 orang 2.089.000.000		60 orang 1.197.900.000		300 orang 7.053.950.000			
1	0618	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan		160 orang 247.900.000	160 orang 627.500.000		160 orang 690.250.000		160 orang 759.275.000		160 orang 835.202.500		100% 3.160.127.500			
1	0619	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo		15 panti 7.850.250.000	15 panti 6.090.000.000		15 panti 6.699.000.000		15 panti 7.368.900.000		15 panti 8.105.790.000		15 panti 36.113.940.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	060	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial ( Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, anak terlantar dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		225 orang	14.000.000.000	225 orang	14.000.000.000	225 orang	15.400.000.000	225 orang	16.940.000.000	225 orang	18.634.000.000	100%	78.974.000.000	
1	061	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga sosial dan ekonomi yang diberdayakan		20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	100 Lembaga	14.077.133.500	
1	063	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Proporsi lansia, Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial		6.150 orang	10.000.000.000	6.750 orang	10.000.000.000	6.500 Orang	10.000.000.000	2000 orang	10.000.000.000	1000 orang	10.000.000.000	23.000 Orang	60.000.000.000	
		<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	0	1															
			<b>Tenaga Kerja</b>														
2	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	48.416.355.300
2	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	3.775.369.240
2	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		1	640.500.000	1	768.600.000	1	845.460.000	1	930.006.000	1	1.023.006.600	1	4.207.572.600
2	0	0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	7.925.600.000
2	0	0	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang tersertifikasi		75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	100,00%	25.573.002.950.000
2	0	0	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase angkatan kerja baru yang mendapat Penempatan Tenaga Kerja		31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	75,00%	2.229.880.700

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	0	1	7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL		1	800.000.000	1	800.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	798.600.000	1	3.057.310.000	
2	0	1	4	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja		20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	100,00%	1.848.140.000	
2	0	1	7	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi		190 Perusahaan	1.087.740.000	250 Perusahaan	1.275.000.000	250 Perusahaan	1.402.500.000	250 Perusahaan	1.542.750.000	250 Perusahaan	1.697.025.000	250 Perusahaan	1.866.727.500	
2	0	1	9	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya		80,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	366.025.000	
2	0	1	0	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih dan terserap di pasar kerja (penempatan tenaga kerja)		45,00%	7.253.500.000	50,00%	3.000.000.000	50,00%	3.300.000.000	50,00%	3.630.000.000	50,00%	3.993.000.000	100,00%	4.392.300.000	
2	0	2		<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															
2	0	2	7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	6.130.500.000	DKP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20208	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya fungsi sarana dan prasarana		100%	1.357.002.500	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	2.757.002.500	
20209	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas aparatur		100%	518.500.000	100%	511.500.000	100%	562.650.000	100%	618.915.000	100%	680.806.500	100%	2.892.371.500	
20210	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya capaian kinerja		100%	518.500.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	982.600.000	
20215	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	
20216	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan		100%	5.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	14.282.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
20217	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) yang mendapat penanganan		90%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	820.150.000	
20218	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	
20220	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif		100%	1.000.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	665.500.000	100%	3.320.500.000	
20221	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	memenuhi kebutuhan hak anak		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.210.000.000	1 Dokumen	1.331.000.000	5 Dokumen	1.331.000.000	5 Dokumen	5.641.000.000	
20222	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2023	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nila-nilai luhur		1 Kebijakan	1.000.000.000	1 Kebijakan	1.000.000.000	1 Kebijakan	1.100.000.000	1 Kebijakan	1.210.000.000	1 Kebijakan	1.331.000.000	5 Kebijakan	5.641.000.000	
2026	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	
203	<b>Pangan</b>															
2037	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	34.501.783.000	
2038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	10.525.750.000	
2039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.231.000.000	100%	2.454.100.000	100%	2.699.510.000	100%	2.969.461.000	100%	3.266.407.100	100%	13.620.478.100	DPTPH
2030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%	80%	937.000.000	80%	1.030.700.000	80%	1.133.770.000	80%	1.247.147.000	80%	1.371.861.700		5.720.478.700	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Penyelenggaraan Pemerintahan															
2035	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan	569 Orang	725 Orang	4.750.000.000	725 Orang	5.225.000.000	725 Orang	5.747.500.000	725 Orang	6.322.250.000	725 Orang	6.954.475.000		28.999.225.000		
2035	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	96 Poin	98,20 Poin	1.100.000.000	98,75 Poin	1.210.000.000	99,0 Poin	1.331.000.000	99,5 Poin	1.464.100.000	100 Poin	1.610.510.000		6.715.610.000		
2037	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,50 Poin	86.7 Poin	1.100.000.000	87.9 Poin	1.210.000.000	89.1 Poin	1.331.000.000	90.3 Poin	1.464.100.000	91.5 Poin	1.610.510.000		6.715.610.000		
204	<b>Pertanahan</b>																
204	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Kebijakan Pertanahan dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur		100%	541.800.000	100%	600.000.000	100%	630.000.000	100%	645.000.000	100%	660.000.000	100%	3.076.800.000		Biro PPOD (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	0	5	Lingkungan Hidup														
2	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00		16.426.050.000
2	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja Internal	100%	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00		4.248.200.000
2	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tingkat disiplin pegawai	100%	100%	1.210.000.000,00	100%	1.225.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	1.275.000.000,00	100%	1.300.000.000,00		6.260.000.000
2	0	0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	1.205.000.000,00	100%	1.164.500.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.200.000.000,00		5.569.500.000
2	0	0	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan		ringan (1-5)	1.805.100.000,00	ringan (1-5)	1.900.000.000,00	ringan (1-5)	2.000.000.000,00	ringan (1-5)	2.200.000.000,00	ringan (1-5)	2.400.000.000,00	ringan (1-5)	10.305.100.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20527	Program Penyusunan Kajian Lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan dan Inventarisasi	7 Laporan	7 Laporan	2.370.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.370.000.000	
20528	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH		100 Persentase	870.000.000,00		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000	4.350.000.000	
20529	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai		225	936.000.000,00		936.000.000		936.000.000		936.000.000		936.000.000		936.000.000	4.680.000.000	
20531	Program Pelayanan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100%	100%	700.000.000,00	-	800.000.000,00	-	900.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	4.500.000.000,00	
20532	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15 Perusahaan	15 Perusahaan	295.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	295.000.000,00	
20533	Program Peningkatan Peran serta masyarakat	Jumlah LSM Lingkungan Aktif	4 Penghargaan	4 Penghargaan	1.094.400.000,00	4 Penghargaan	800.000.000,00	4 Penghargaan	900.000.000,00	4 Penghargaan	1.000.000.000,00	4 Penghargaan	1.100.000.000,00	4 Penghargaan	1.100.000.000,00	4.894.400.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	056	dalam pengelolaan Lingkungan Hidup															
2	056	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	57,33 Juta Ton CO2eq	26,30%	1.072.000.000,00	0,2689	2.500.000.000,00	0,2775	2.500.000.000,00	0,285	2.700.000.000,00	0,2933	4.700.000.000,00		12.400.000.000,00	
2	057	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	200.000 Ha	200.000 Ha	635.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	438.390,32 Ha	635.000.000,00	
2	05	Program Pengendalian dan Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Predikat kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3			800.000.000,00		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.800.000.000		6.800.000.000,00	
2	06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
2	077	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	100%	8.812.500.000	DPMPD
2	078	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	100%	1.655.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Aparatur															
2	079	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah		80%	946.800.000	80%	1.500.000.000	80%	1.650.000.000	80%	1.815.000.000	98%	1.996.500.000	100%	7.908.300.000	
2	070	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	300.000.000	80%	360.000.000	80%	450.000.000	80%	500.000.000	80%	479.160.000	100%	2.089.160.000	
2	075	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Mandiri		40 desa	4.000.000.000	40 desa	3.250.000.000	40 desa	3.575.000.000	40 desa	3.932.500.000	40 desa	4.325.750.000	200 Desa	19.083.250.000	
2	076	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		15 Unit	1.000.000.000	15 Unit	1.000.000.000	15 Unit	1.100.000.000	15 Unit	1.210.000.000	15 Unit	1.331.000.000	60 Unit	5.641.000.000	
2	077	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan		80%	1.000.000.000	80%	350.000.000	80%	385.000.000	80%	423.500.000	80%	465.850.000	100%	2.624.350.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2071	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		80%	1.000.000.000	80%	350.000.000,00	80%	385.000.000,00	80%	423.500.000,00	80%	465.850.000,00	100%	2.624.350.000,00	
2072	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	meningkatnya kualitas lembaga pos pelayanan teknologi		18 Unit	3.000.000.000	18 Unit	3.000.000.000	18 Unit	3.300.000.000	18 Unit	3.630.000.000	18 Unit	3.993.000.000	100%	16.923.000.000	
2076	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Terwujudny Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga		80%	1.100.000.000	80%	2.100.000.000	80%	2.310.000.000	80%	2.541.000.000	80%	2.795.100.000	100%	10.846.100.000	
2077	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Posyantek Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG		10 Posyantek	1.000.000.000	10 Posyantek	1.000.000.000	10 Posyantek	1.100.000.000	10 Posyantek	1.210.000.000	10 Posyantek	1.331.000.000	50 Posyantek	5.641.000.000	
2078	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan		80%	1.000.000.000	80%	4.000.000.000	80%	4.400.000.000	80%	4.840.000.000	80%	5.324.000.000	100%	19.564.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2079	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan berbasis Pemberdayaan yang Optimal		80%	1.000.000.000	80%	3.000.000.000	80%	3.300.000.000	80%	3.630.000.000	80%	3.993.000.000	100%	18.223.000.000	
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2085	Program Keluarga Berencana	Jumlah pasangan suami-istri yang produktif yang mengikuti program KB		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	DKP3A
2080	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)		100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.100.000.000	100 Orang	1.210.000.000	100 Orang	1.331.000.000	500 Orang	5.641.000.000	
209	Perhubungan															
2097	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		0,00%	4.352.250.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		19.152.250.000	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20908	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang laik, efisien dan efektif		100,00 %	3.489.200.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		12.289.200.000		
20909	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		100,00 %	2.672.850.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		12.883.050.000		
20910	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan		100,00 %	908.700.000		1.050.000.000		1.155.000.000		1.270.500.000		1.397.550.000		5.781.750.000		
20915	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		660 Kasus	21.618.900.000		25.200.000.000		25.200.000.000		25.200.000.000		25.200.000.000		122.418.900.000		
20916	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah prasarana perhubungan laut dan SDP yang melayani pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman	10 Dermaga SDP; 13 Pelabuhan Laut	2 Dermaga SDP	60.000.000.000	2 Dermaga SDP	60.000.000.000	1 Dermaga SDP	30.000.000.000	1 Dermaga SDP	30.000.000.000	1 Pelabuhan Laut	30.000.000.000	16 Dermaga SDP; 14 Pelabuhan Laut	210.000.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20917	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu		2 Simpul	4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		23.500.000.000	
20918	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani		650000 Penumpang	10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		50.000.000.000	
210	<b>Komunikasi dan Informatika</b>															
2107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		12 Bulan	4.863.730.000		3.863.730.000		5.863.730.000		5.863.730.000		3.463.730.000		23.918.650.000	
2108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	735.900.000		735.900.000		735.900.000		735.900.000		735.900.000		3.679.500.000	
2109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah		12 Bulan	2.032.520.000		1.800.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		1.300.000.000		9.332.520.000	Diskominfo
2100	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1 0 1	1 1	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlayannya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU													
					100%	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000.000			
2	1 0 2	1 2	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah														
					500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000			
2	1 0 3	1 3	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika														
					500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000			
2	1 0 4	1 4	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik														
					500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000			
2	1 0 5	1 5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	5.000.000.000	100%	3.100.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	19.600.000.000	
2	1 1		<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	1	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	26.010.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	33.542.000.000	100%	3.828.000.000	100%	10.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	3.828.000.000	100%	56.198.000.000	
2	1	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	100%	100%	2.556.596.000	100%	3.066.000.000	100%	3.679.000.000	100%	4.415.000.000	100%	5.298.000.000	100%	19.014.596.000	
2	1	1	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	100%	80%	1.000.000.000	80%	1.127.880.000	80%	1.353.456.000	80%	1.624.147.200	80%	1.949.000.000	80%	7.054.483.200	
2	1	1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah WUB yang Mandiri		1000 Wirausaha Baru	1.194.000.000	1000 Wirausaha Baru	800.000.000	1000 Wirausaha Baru	1.850.000.000	1000 Wirausaha Baru	1.900.000.000	1000 Wirausaha Baru	950.000.000	5000 Wirausaha Baru	6.694.000.000	
2	1	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM Naik Kelas		200	3.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	1.500.000.000	200	1.000.000.000	1000 UKM	9.500.000.000	
2	1	1	Program Peningkatan Kualitas	Jumlah Koperasi Berkualitas		100 Koperasi	1.500.000.000	100 Koperasi	1.700.000.000	100 Koperasi	1.850.000.000	100 Koperasi	2.000.000.000	100 Koperasi	2.300.000.000	100 koperasi	9.350.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kelembagaan Koperasi															
2	1 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih		300 orang 1.500.000.000	300 orang 1.000.000.000		300 orang 2.000.000.000		300 orang 2.200.000.000		300 orang 1.000.000.000		1500 orang 7.700.000.000			
		Program Pengembangan inovasi Bisnis dan pemasaran UKM	Jumlah UKM yang berorientasi ekspor		4.500.000.000	4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		22.500.000.000			
2	1 2	<b>Penanaman Modal</b>															
2	1 2 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	14.130.467.629	
2	1 2 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	100%	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	13.862.255.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 2 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	95%	300.000.000	95%	330.000.000	95%	363.000.000	95%	399.300.000	95%	439.230.000	95%	1.831.530.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	1 2 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		85 Nilai AKIP	370.000.000	85 Nilai AKIP	407.000.000	85 Nilai AKIP	447.700.000	86 Nilai AKIP	492.470.000	86 Nilai AKIP	541.717.000	86 Nilai AKIP	2.258.887.000	
2	1 2 8	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2879 Izin/ Non Izin	2800 Izin/ Non Izin	350.000.000	2800 Izin/ Non Izin	374.000.000	2800 Izin/ Non Izin	411.400.000	2800 Izin/ Non Izin	452.540.000	2800 Izin/ Non Izin	497.794.000	2800 Izin/ Non Izin	2.085.734.000	
2	1 2 7	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Luas ijin usaha tidak sesuai rencana investasi yang dicabut (Ha)			5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		6.723.000.000	
2	1 2 8	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1.770.000.000	5 Kebijakan	8.850.000.000									
2	1 2 9	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan (IKM)		82 Indeks	280.000.000	82 Indeks	438.000.000	83 Indeks	481.800.000	84 Indeks	529.980.000	84 Indeks	582.978.000	84 Indeks	2.312.758.000	
2	1 2 0	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal		2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	10	5.750.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1	3		Kepemudaan dan Olah Raga													
2	1	3	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran												
						100%	10.374.150.000	10.374.150.000		10.374.150.000		10.374.150.000		10.374.150.000		51.870.750.000	
2	1	3	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur												
						100%	6.609.800.000	2.199.175.000		2.199.175.000		2.199.175.000		2.199.175.000		15.406.500.000	
2	1	3	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah												
						100%	3.755.400.000	719.290.000		791.219.000		870.340.900		957.374.990		7.093.624.890	
2	1	3	10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapainya Penyusunan anggaran dan laporan kinerja SKPD sesuai aturan yang berlaku												
						98%	987.750.000	600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		3.772.350.000	
2	1	3	30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan												
						50 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000		5.500.000.000		6.050.000.000		6.655.000.000		28.205.000.000	
2	1	3	31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi pada level Nasional												
						450 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000		5.500.000.000		6.050.000.000		6.655.000.000		28.205.000.000	

Dispora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1 3	3 2	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga		3%	5.000.00 0.000		5.000.000.0 00		5.500.000.0 00		6.050.000.0 00		6.655.000.0 00		28.205.000. 000	
2	1 3	3 3	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi		5%	7.500.00 0.000		7.500.000.0 00		8.250.000.0 00		9.075.000.0 00		9.982.500.0 00		42.307.500. 000	
			Program peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Pemuda yang berwirausaha			7.500.00 0.000		7.500.000.0 00		7.500.000.0 00		7.500.000.0 00		7.500.000.0 00		37.500.000. 000	
2	1 4		<b>Statistik</b>															
2	1 4	1 5	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		92 Persen	2.327.25 0.000		2.400.000.0 00		2.500.000.0 00		2.675.000.0 00		2.680.000.0 00		12.582.250. 000	Bappeda
2	1 5		<b>Persandian</b>															
2	1 6		<b>Kebudayaan</b>															
2	1 6	1 5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan			20.000.0 00.000		20.000.000. 000		20.000.000. 000		20.000.000. 000		20.000.000. 000		5.584.590.0 00,00	Disdikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1	7																
2	1	7	0	Perpustakaan														
2	1	7	7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran													
						100%	1.823.220.000	1.823.220.000	1.823.220.000	1.823.220.000	1.823.220.000	1.823.220.000	1.823.220.000	1.823.220.000	9.116.100.000			
2	1	7	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur													
						100%	518.000.000	518.000.000	518.000.000	518.000.000	518.000.000	518.000.000	518.000.000	518.000.000	2.590.000.000			
2	1	7	9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah													
						12 bulan	552.000.000	750.000.000	825.000.000	907.500.000	998.250.000	998.250.000	998.250.000	998.250.000	4.032.750.000			
2	1	7	0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah													
						80%	200.000.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	266.200.000	266.200.000	266.200.000	1.128.200.000			
2	1	7	2	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Prosentase masyarakat yang mengakses perpustakaan													
							2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	4.280.750.000			
2	1	7	4	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan	Prosentase pengembangan koleksi bahan pustaka													
							800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	2.465.540.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Bahan Perpustakaan															
2	1 7 6	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Prosentase Perpustakaan yang memenuhi standar		2%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	12.500.000.000			
2	1 8	<b>Kearsipan</b>															
2	1 8 9	Program pengelolaan Arsip	Prosentasi Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik		148.658.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	302.500.000	302.500.000	332.750.000	332.750.000	1.308.908.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	1 8 5	Program Pembinaan Kearsipan	Prosentase Hasil pembinaan bidang kearsipan		281.800.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	302.500.000	302.500.000	332.750.000	332.750.000	1.442.050.000			
3		<b>Urusan Pilihan</b>															
3	0 1	<b>Kelautan dan Perikanan</b>															
3	0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	4.737.450.000,00	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	23.687.250.000	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	7.335.750.000	
3019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	5.000.000.000	
3010	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		12 Dokumen	1.413.000.000,00	12 Dokumen	1.554.300.000,00	12 Dokumen	1.709.730.000,00	12 Dokumen	1.880.703.000,00	12 Dokumen	2.068.773.300,00	12 Dokumen	8.626.506.300			
3021	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		118.580 Ton	15.000.000.000,00	121.188 Ton	15.000.000.000,00	123.854 Ton	20.000.000.000,00	126.332 Ton	18.000.000.000,00	128.858 Ton	15.000.000.000,00	128.858 Ton	83.000.000.000			
3025	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		32.600 Ton	15.000.000.000,00	34.200 Ton	15.000.000.000,00	35.900 Ton	20.000.000.000,00	37.400 Ton	18.000.000.000,00	40.100 Ton	15.000.000.000,00	40.100 Ton	83.000.000.000			
3026	Program Pengelolaan Ruang Laut	Pengembangan, Pengendalian, Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil		1 Dokumen	2.275.000.000,00	1 Dokumen	2.502.500.000,00	1 Dokumen	2.752.750.000,00	1 Dokumen	3.028.025.000,00	1 Dokumen	3.330.827.500,00	1 Dokumen	13.889.102.500			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	0217	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengawasan		46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	7.335.750.000	
3	0218	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan		125 Sampel 150.000.000,00	125 Sampel 165.000.000,00	125 Sampel 181.500.000,00	125 Sampel 199.650.000,00	125 Sampel 219.615.000,00	125 Sampel 915.765.000,00						
3	0219	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi		3000.000.000 Benur 5.000.000,00	3000.000.000 Benur 5.000.000,00	3000.000.000 Benur 3.000.000.000,00	3000.000.000 Benur 19.000.000,000								
3	0310	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Dihasilkan		65000 Ekor 421.000.000,00	65000 Ekor 463.100.000,00	65000 Ekor 509.410.000,00	65000 Ekor 560.351.000,00	65000 Ekor 616.386.100,00	65000 Ekor 2.570.247.100,00						
3	02	<b>Pariwisata</b>														
3	027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 11.777.000.000						
3	028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 14.020.000.000						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30209	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.603.360.000	100%	7.433.760.000		
30210	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	700.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	732.050.000	100%	805.255.000	100%	3.507.805.000		
30215	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata pada Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan			2.500.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		7.000.000.000		
30216	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang memiliki standar wisata Nasional	1	1	3.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	5	11.000.000.000		
30230	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikendalikan pengembangannya		0 Jenis Usaha	1.000.000.000	1 Jenis Usaha	1.100.000.000	1 Jenis Usaha	1.210.000.000	2 Jenis Usaha	1.331.000.000	2 Jenis Usaha	1.464.100.000	2 Jenis Usaha	6.105.100.000		
30231	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah UKM seni budaya dan ekonomi kreatif yang berkembang			2.000.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		11.282.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	0	3															
			<b>Pertanian</b>														
3	0	2	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA	Jumlah kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan	117 Siswa	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000		22.500.000.000
3	0	4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Buah	191.314 Ton	233.020 Ton	2.888.900.000	240.245 Ton	3.177.790.000	247.698 Ton	3.495.569.000	255.387 Ton	3.845.125.900	263.320 Ton	4.229.638.490		17.637.023.390
3	0	4	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tersedianya Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat		80%	1.575.690.400	81%	1.733.259.440	82%	1.906.585.384	83%	2.097.243.922	84%	2.306.968.315		9.619.747.461
3	0	4	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT	10.000 Ha	23.000 Ha	370.000.000	24.000 Ha	407.000.000	25.000 Ha	447.700.000	26.000 Ha	492.470.000	27.000 Ha	541.717.000		2.258.887.000
3	0	4	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilayani kegiatan sertifikasi	150 Ha	150 Ha	350.000.000	165 Ha	250.000.000	180 Ha	250.000.000	195 Ha	250.000.000	210 Ha	250.000.000		1.350.000.000
3	0	5	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	385.544 Ton	510.000 Ton	9.374.580.000	522.750 Ton	10.312.038.000	535.819 Ton	11.343.241.800	549.214 Ton	12.477.565.980	562.945 Ton	13.725.322.578		57.232.748.358

DPTPH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0 kawasan		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		75.000.000.000	
3	0307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	22.400.213.227	Disbun
3	0308	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	14.293.779.478	
3	0309	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%	100%	2.862.850.000	100%	3.292.277.500	100%	3.786.119.125	100%	4.354.036.994	100%	5.007.142.543	100%	19.302.426.162	
3	0310	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	100%	20%	763.915.000	40%	762.824.400	60%	991.671.720	80%	1.289.173.236	100%	1.675.925.207	100%	5.283.509.563	
3	03058	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	13249959	15.288.465	15.000.000.000	16.812.938	10.000.000.000	17.136.849	20.000.000.000	18.126.358	20.000.000.000	18.313.521	10.000.000.000	18.313.521	127.829.012.825	
3	03060	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani		20,00%	141.375.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		541.375.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 3 6 1	Program Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat (Produk)	0	2 Produk	1.000.00 0.000	2	1.000.000.0 00	2	1.000.000.0 00	3	1.000.000.0 00	3	1.000.000.0 00	12	13.199.728. 333		
3 0 3 6 2	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan		5 Komoditi	250.000. 000		200.000.00 0		300.000.00 0		400.000.00 0		200.000.00 0		1.350.000.0 00		
3 0 3 6 5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang		5 Komoditi	552.300. 000		391.636.50 0		391.636.50 0		391.636.50 0		391.636.50 0		2.118.846.0 00		
3 0 3 6 8	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu		2 Kelompok Tani	328.650. 000		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		1.691.250.0 00		
3 0 3 7 6	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	0,25	0	3.000.00 0.000	0	2.500.000.0 00	0	2.000.000.0 00	0	2.000.000.0 00	0	2.000.000.0 00	25	5.731.024.0 63		
3 0 3 7 7	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi		50%	250.000. 000		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		1.250.000.0 00		
3 0 3 7 8	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan		25 Orang	363.475. 000		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		1.726.075.0 00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Rakyat															
3	0 3 9	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani		5 Gapokt an	828.650. 000		1.625.200.0 00		1.625.200.0 00		1.625.200.0 00		1.625.200.0 00		7.329.450.0 00		
3	0 3 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	187	187 Perusa haan	878.975. 000	187	1.010.821.2 50	187	1.162.444.4 38	187	1.336.811.1 03	187	1.537.332.7 69	187	5.926.384.5 59		
3	0 3 1	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan		20 Kelom pok	262.600. 000		150.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		150.000.00 0		862.600.00 0		
3	0 3 2	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan			4.680.00 0.000		4.680.000.0 00		4.680.000.0 00		4.680.000.0 00		4.680.000.0 00		23.400.000. 000		
3	0 3 3	Program Pengendalian Kebakaran Kebun			40,00% 300.000. 000		300.000.00 0		300.000.00 0		300.000.00 0		300.000.00 0		1.500.000.0 00		
3	0 3 4	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	4003296		200000 0 Benih	1.023.45 0.000	2.000.0 00	1.154.462.5 00	2.000.00 0	1.327.631.8 75	2.000.00 0	1.526.776.6 56	2.000.0 00	1.755.793.1 55	10.000. 000	6.788.114.1 86	
3	0 3 5	Program pengujian dan sertifikasi benih			500000 0 Benih	450.100. 000		972.300.00 0		972.300.00 0		972.300.00 0		972.300.00 0		4.339.300.0 00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 3 8 6	Program Pengendalian OPT		Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT		30 Kelompok	557.500.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		2.977.500.000	
3 0 3 8 7	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		10000 KG	575.682.200		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.975.682.200	
3 0 3 8 8	Program penyediaan bahan tanaman		Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115000	1.646.000	1.471.188.000	1.727.000	1.618.306.800	2.227.000	1.780.137.480	2.227.000	1.958.151.228	2.253.000	2.153.966.351	10.080.000	8.981.749.859	
3 0 3	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		Jumlah tanaman perkebunan yang dikendalikan dari serangan OPT (Ha)	25	200 Ha	1.133.182.200	200	1.303.159.530	200	1.498.633.460	200	1.723.428.478	200	1.981.942.750	1.000	7.640.346.418	
	Program Pengembangan Pemanfaatan Limbah Perkebunan		Volume Limbah perkebunan yang dimanfaatkan (m3)			10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000			
3 0 3 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		80	3.909.707.000	83	3.909.707.000	85	3.909.707.000	88	3.909.707.000	90	3.909.707.000	90	24.909.707.000	
3 0 3 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Rasio aparatur yang memanfaatkan Personal		1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	5	14.867.750.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	0 3	0 9	Aparatur	Computer														
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran														
					92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	9.863.715.000		
3	0 3	1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Nilai SAKIP	1,3													
					1	1.080.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	3	6.480.000.000		
3	0 3	2 3	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)														
					10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	50	6.448.850.000		
3	0 3	3 4	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)														
					118	10.000.000.000	119	10.000.000.000	119	10.000.000.000	119	10.000.000.000	119	10.000.000.000	118	35.000.000.000		
3	0 3	8 9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Status kesehatan hewan														
					30	1.250.000.000	50	950.000.000	70	1.250.000.000	90	1.250.000.000	100	950.000.000	100	4.750.000.000		
3	0 3	9 0	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Laju Pertumbuhan populasi sapi														
						25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		30.125.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30391	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)		10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	50	4.000.000.000		
30392	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak		10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	50	5.000.000.000		
304	<b>Kehutanan</b>																
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	1	100	3.011.000.000,00	100	2.007.808.864,00	100	3.007.808.864,00	100	3.007.808.864,00	140000	507.808.865,00		11.542.235.457		
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	285.501.359,16		8.317.501.359		
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	100	2.507.000.000,00	100	507.000.000,00	100	2.507.500.000,00	100	2.508.000.000,00	100	1.008.500.000,00		9.038.000.000		Dishut
30410	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	68 Nilai LAKIP	80	2.001.500.000,00	80	501.600.000,00	80	2.011.700.000,00	80	2.001.800.000,00	80	1.001.900.000,00		7.518.500.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 6	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah penerimaan PNB	-	150 M	3.500.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00		23.500.000.000							
3 0 4 9	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu		1 DAS Prioritas	1.279.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		7.779.000.000	
3 0 4 1	Program Perlindungan dan KSDAE	% kerusakan hutan (menurunnya persentase kerusakan hutan)	6	≤ 2 %	2.000.000.000,00	≤ 1,75 %	2.000.000.000,00	≤ 1,5 %	2.000.000.000,00	≤ 1,25 %	2.000.000.000,00	≤ 1 %	2.000.000.000,00		10.000.000.000	
3 0 4 2	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Permohonan Perhutanan Sosial (Bertambahnya Luasan Permohonan Perhutanan Sosial)	5 KTH	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00		25.000.000.000	
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	-	48	1.504.013.750,00	48	1.004.013.750,00	48	1.504.013.750,00	48	1.504.013.750,00	48	1.004.013.750,00		6.520.068.750	
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	-	53	1.505.612.928,40	53	1.005.612.928,40	53	1.505.612.928,40	53	1.505.612.928,40	53	1.005.612.928,40		6.528.064.642	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		25,00%	15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		65.000.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	1.535.000.000,00		750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		750.000.000,00		6.535.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Prosentase peningkatan luas penanaman)	50 Ha	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	23.000.000.000,00	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	20.000.000.000,00		118.000.000.000	
3 0 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)		Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	-	0,57	1.500.280.000,00	0,57	280.000,00	0,57	1.500.280.000,00	0,57	1.500.280.000,00	0,57	280.000,00		4.501.400.000	
3 0 4	Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		% tutupan lahan (meningkatkan persentase tutupan lahan)	7.475 Ha	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00		12.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
304	Program Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi karbon	-	100 Ha	5.000.000,00	150 Ha	8.750.000,00	200 Ha	12.500.000,00	250 Ha	16.250.000,00	300 Ha	20.000.000,00		62.500.000	
304	Program Pengelolaan KPHL Balikpapan	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	-	100 Ha	5.000.000,00	150 Ha	8.750.000,00	200 Ha	12.500.000,00	250 Ha	16.250.000,00	300 Ha	20.000.000,00		62.500.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	698.804.000		598.804.000		698.804.000		698.804.000		598.804.000		3.294.020.000	
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	841.696.000		100.200.000		810.220.000		821.242.000		133.366.200		2.706.724.200	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	237.500.000		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		2.093.900.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		5,00%	462.500.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.862.500.000		
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		10,00%	1.462.500.000		600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		600.000.000		5.862.500.000		
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	19.400.000.000		8.500.000.000		23.500.000.000		23.500.000.000		8.500.000.000		83.400.000.000		
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	2.962.500.000		600.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		600.000.000		10.362.500.000		
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		86 Hektar	2.250.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.000.000.000		11.250.000.000		
3 0 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Penedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		10,00%	462.500.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.462.500.000		
3 0 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		86 Hektar	400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.400.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	0 4	5 0	Pendamping)																
			Program Pengelolaan Tahura	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	350.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.550.000.000		
3	0 4	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	1.435.100.000		435.100.000		1.435.100.000		1.435.100.000		435.100.000		5.175.500.000		
3	0 4	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	797.480.000		297.480.000		797.480.000		797.480.000		297.480.000		2.987.400.000		
3	0 4	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.820.500.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	0 4	4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		50,00%	1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		7.250.000.000		
3	0 4	4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		75,00%	20.200.000.000		3.200.000.000		20.200.000.000		20.200.000.000		3.200.000.000		67.000.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 0 4 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.750.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3 0 4 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 Hektar	2.650.000.000		2.000.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.000.000.000		11.950.000.000		
3 0 4 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		25,00%	700.000.000		200.000.000		700.000.000		700.000.000		200.000.000		2.500.000.000		
3 0 4 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		
3 0 4 5 1	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		20,00%	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000		
3 0 4 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	766.790.000		666.790.000		766.790.000		766.790.000		666.790.000		3.633.950.000		
3 0 4 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	668.710.000		268.710.000		668.710.000		668.710.000		268.710.000		2.543.550.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30409	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	310.000.000		310.000.000		341.000.000		375.100.000		412.610.000		1.748.710.000		
30403	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		10,00%	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000		
30404	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		10,00%	2.500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		500.000.000		8.500.000.000		
30405	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	16.800.000.000		4.800.000.000		16.800.000.000		16.800.000.000		4.800.000.000		60.000.000.000		
30406	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		10 kasus Tindak Pidana	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000		
30407	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	2.450.000.000		1.950.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		1.950.000.000		11.250.000.000		
30409	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 Hektar	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30541	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		10,00%	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000		
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00%	765.800.000		565.800.000		765.800.000		765.800.000		565.800.000		3.429.000.000		
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00%	1.530.600.000		225.000.000		1.247.500.000		1.272.250.000		299.475.000		4.574.825.000		
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00%	381.600.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.781.600.000		
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		10,00%	7.260.528.400		300.000.000		7.300.000.000		5.300.000.000		300.000.000		20.460.528.400		
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		75,00%	15.049.924.400		2.300.000.000		12.300.000.000		2.800.000.000		2.300.000.000		34.749.924.400		
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		6 kasus Tindak Pidana	2.677.012.200		1.000.000.000		2.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		7.677.012.200		

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 4	4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		105 Hektar	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		15.000.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3 0 4 9	4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		105 Hektar	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000	
3 0 4 1	5 1	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		25,00%	650.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.650.000.000	
3 0 4 7	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	685.420.000,00		485.420.000,00		685.420.000,00		485.420.000,00		485.420.000,00		2.827.100.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3 0 4 8	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		2.340.400.000	
3 0 4 9	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	674.500.000,00		355.000.000,00		890.500.000		629.550.000		472.505.000		3.022.055.000	
3 0 4 3	4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Persentase Pengelolaan		4 KTH	514.300.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		5.714.300.000	
3 0 4 4	4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		100,00 %	6.500.000.000,00		1.000.000.000,00		6.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		16.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		100 Persen	14.500.000.000,00		8.500.000.000,00		14.500.000.000,00		8.500.000.000,00		8.500.000.000,00		54.500.000.000		
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi		4850000	2.485.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		6.485.000.000		
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 Hektar	1.750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.754.000.000		
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,0 %	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000		
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 hektar	700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		3.500.000.000		
3041	Program Pengelolaan KPMP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,0 %	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		6.800.000.000		
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,0 %	683.750.000,00		483.750.000,00		683.750.000,00		683.750.000,00		483.750.000,00		3.018.750.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.250.000.000	Produksi Santan
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000,00		200.000.000,00		520.000.000		444.271.492		488.698.641		2.152.970.133	
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)			Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		50,00%	675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		3.375.000.000	
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)			Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		10,00%	670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		3.350.000.000	
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)			Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		25,00%	16.720.000.000,00		4.720.000.000,00		14.720.000.000,00		4.720.000.000,00		4.720.000.000,00		45.600.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)			Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	800.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		3.100.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)			Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		350 Hektar	6.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.859.856.239,99		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		16.859.856.240	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 0 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		25,00%	600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.000.000.000		
3 0 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		350 Hektar	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000		
3 0 4 1	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	2.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		8.000.000.000		
3 0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		3.935.750.000		
3 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	600.000.000,00		600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		3.384.600.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		2.820.500.000		
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani		100,00 %	1.100.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.500.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Hutan															
3	044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Presentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	100,0 %	2.276.363.054,44		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00			9.076.363.054	
3	045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	100,0 %	5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00			29.750.000.000	
3	046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana	800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00			4.000.000.000	
3	047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00			10.000.000.000	
3	048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Penedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100,0 %	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			2.500.000.000	
3	049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			2.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 0 4 5 1	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		7.250.000.000			
3 0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		2.390.000.000			
3 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.250.000.000			
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		846.150.000			
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		10,00%	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000			
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		35,00%	690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		3.450.000.000			
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		22.000.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 0 4 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		5 kasus Tindak Pidana	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3 0 4 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		250 Hektar	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		8.750.000,00		
3 0 4 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)		Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,00 %	235.000,00		235.000,00		235.000,00		235.000,00		235.000,00		1.175.000,00		
3 0 4 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		250 Hektar	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		2.000.000,00		
3 0 4 5 1	Program Pengelolaan KPHP		Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan		10,00%	1.050.000,00		1.050.000,00		1.155.000,00		1.270.500,00		1.397.550,00		5.923.050,00		
3 0 4 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	512.600,00		512.600,00		512.600,00		512.600,00		512.600,00		2.563.000,00		
3 0 4 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		525.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30409	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	510.400.000,00		510.400.000,00		561.440.000,00		617.584.000,00		679.342.400,00		2.879.166.400,00		
30403	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		100,00 %	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000,00		
30404	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		100,00 %	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000,00		
30405	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		22.000.000.000,00		
30406	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		10 kasus Tindak Pidana	925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		4.625.000.000,00		
30407	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 Hektar	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		8.750.000.000,00		
30409	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		2.000.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3051	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		10,00%	990.000.000,00	990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		4.950.000.000	
305	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>																
3057	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	85%	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000		12.965.000.000		
3058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	98,28	100%	1.142.110.000	100%	1.256.321.000	100%	1.381.953.100	100%	1.520.148.410	100%	1.672.163.251		6.972.695.761		
3059	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	85	100%	1.233.830.000	100%	1.357.213.000	100%	1.492.934.300	100%	1.642.227.730	100%	1.806.450.503		7.532.655.533		
3050	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	90	60%	1.060.000.000	60%	1.166.000.000	60%	1.282.600.000	60%	1.410.860.000	60%	1.551.946.000		6.471.406.000		
3057	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	1%	2%	7.000.000.000	4%	7.700.000.000	6%	5.000.000.000	8%	5.000.000.000	10,0%	5.000.000.000		29.700.000.000		
3057	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase Rasio Elektrifikasi	86,43	85,5%	33.250.000.000	87,5%	20.000.000.000	89,5%	20.000.000.000	92,00%	20.000.000.000	95,00%	20.000.000.000		113.250.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30359	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah		3%	850.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.850.000.000	
30541	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi		30%	571.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.571.000.000	
30542	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas		80 Perusahaan	2.500.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		19.500.000.000	
30543	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara		95%	800.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.200.000.000	
30544	Program mitigasi emisi gas rumah kaca sektor pertambangan	Jumlah pengurangan emisi sektor energi terhadap BAU	15,22 juta ton Co2 Eq	7,20%	500.000.000	10,15%	550.000.000	13,15%	605.000.000	15,78%	665.500.000	18,38%	732.050.000		3.052.550.000	
305	Pembinaan dan Pendataan hasil produksi Mineral dan Batubara	Total Produksi di Kalimantan Timur	85	80%	1.891.500.000	85%	2.100.000.000	90%	2.240.000.000	95%	2.490.000.000	90%	2.620.000.000		11.341.500.000	
305	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan air tanah	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	-	55	2.450.000.000	66	2.450.000.000	77	2.450.000.000	89	2.450.000.000	100	2.450.000.000		12.250.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
306	Perdagangan																
30615	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penanganan Kasus Mediasi dan saksi Ahli		25 kasus	1.500.000.000	30 kasus	2.000.000.000	40 kasus	2.300.000.000	50 kasus	2.500.000.000	60 kasus	2.750.000.000	60 kasus	11.050.000.000		
30617	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Milyar Rupiah)	US\$ 947.07 Juta	1,3	2.000.000.000	1,43	2.000.000.000	1,57	2.000.000.000	1,72	2.000.000.000	1,89	2.000.000.000	1,89	10.000.000.000		
30618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3,5	400%	10.000.000.000	450%	7.500.000.000	500%	5.000.000.000	550%	5.000.000.000	600%	3.000.000.000	600%	30.500.000.000		
30632	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan dg instansi terkait dan dunia usaha		3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	300.000.000	3 kerja sama	20.300.000.000		
30633	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani		15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	5.250.000.000		
307	Perindustrian																
30732	Program Penataan Struktur Industri	presentase pertumbuhan investasi industri		15%	1.000.000.000	15%	1.050.000.000	17%	1.100.000.000	18%	1.200.000.000	18%	1.300.000.000	18%	5.650.000.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	033	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan	3,47%	5,6%	3.000.000.000	5,7%	3.000.000.000	6,2%	1.150.000.000	6,5%	1.200.000.000	7%	1.250.000.000	7%	9.600.000.000	n, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3	08	<b>Transmigrasi</b>															
3	085	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi		4	1.812.500.000	4	2.498.250.000	4	2.748.075.000	4	3.022.882.500	4	3.325.170.750	4	3.657.687.825	Disnakertrans
4		<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>															
4	01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>															
4	017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		95,00%	20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		100.704.212.500	Biro umum (SETDA)
4	018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		90,00%	30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		151.089.500.000	
4	019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90,00%	17.869.620.000		19.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		96.869.620.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	740.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000			3.740.000.000	
4 0 1 0	Program Pelayanan Tata Usaha Umum		jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum		12 bulan	1.795.337.500		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000			8.995.337.500	
4 0 1 0	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda		jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga		190 buah	4.236.300.000		4.400.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000			22.136.300.000	
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	1.269.174.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000			6.619.174.000	
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana		25 Kegiatan	240.500.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000			1.440.500.000	Biro Humas (SETDA)
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda		21 OT	818.076.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000			4.418.076.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu		6 Laporan	15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		110.000.000		
4 0 1 7	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi kerjasama		60	900.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.700.000.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terwujudkan komunikasi kehumasan		1000	5.857.250.000		6.000.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		31.357.250.000		
4 0 1 0	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keprotokolan yang profesional		400	900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.900.000.000		
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		95,00%	313.900.000		350.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		1.743.900.000		Biro Hukum (SETDA)
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya Administrasi Perkantoran		95,00%	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100,00 % 369.500.000		369.500.000 0			369.500.000 0		369.500.000 0		369.500.000 0		1.847.500.000		
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP		9.000.000 0			9.000.000		9.000.000		9.000.000		45.000.000		
4 0 1 6	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah		Tercapainya Penyusunan Peraturan Daerah Tahunan		10		300.000.000 0			350.000.000 0		400.000.000 0		450.000.000 0		500.000.000 0		2.000.000.000
4 0 1 8	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi		meningkatnya produk hukum daerah provinsi		100%		250.000.000 0			300.000.000 0		350.000.000 0		400.000.000 0		450.000.000 0		1.750.000.000
4 0 1 9	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik		660		150.000.000 0			170.000.000 0		200.000.000 0		250.000.000 0		300.000.000 0		1.070.000.000
4 0 1 2	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah		Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kot		250		600.000.000 0			650.000.000 0		700.000.000 0		750.000.000 0		800.000.000 0		3.500.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		a															
4	0 1 3 3	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah serta Koordinasi Mengenai Penyelesaian Perkara/Kasus Bantuan Hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kot		90%	530.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	3.030.000.000						
4	0 1 6	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat		90%	170.000.000	200.000.000	250.000.000	280.000.000	300.000.000	1.200.000.000						
4	0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Laporan yang dikerjakan sesuai aturan		100%	423.800.000	423.800.000	423.800.000	423.800.000	423.800.000	2.119.000.000						Biro Organisasi (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peralatan/ Kelengkapan Kantor yang dimanfaatkan		100,00 %	87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		435.000.000	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi sesuai tupoksi		70,00%	475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.475.000.000	
4 0 1 2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat		100%	2.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.500.000.000		10.000.000.000	
4 0 1 1	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan		100%	50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		350.000.000	
4 0 1 3	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Area Perubahan yang dilaksanakan		100%	2.254.300.000		2.500.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		12.804.300.000	
4 0 1 0	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJIP sesuai aturan		100%	1.539.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		8.639.000.000	
4 0 1 0	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		100%	966.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		5.566.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Provinsi/Kab/Kota															
4	081	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan		100%	178.200.000	200.000.000	250.000.000	280.000.000	300.000.000						1.208.200.000	
4	017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		100,00 %	770.900.000	770.900.000	770.900.000	770.900.000	770.900.000						3.854.500.000	
4	018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		2,00%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000						125.000.000	
4	019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		80,00%	326.400.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000	450.000.000						1.926.400.000	
4	012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		90,00%	3.000.000	4.000.000	5.000.000	70.000.000	10.000.000						92.000.000	

Biro PPOD (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		1	211.400.000		250.000.000		265.000.000		270.000.000		270.000.000		1.266.400.000	
4 0 1 7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pe mbakuan Nama Rupabumi		100	854.500.000		880.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.634.500.000	
4 0 1 4	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Otda		1 Dokumen	373.900.000		390.000.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000		2.033.900.000	
4 0 1 5	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	267.900.000		290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.457.900.000	
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		95,00%	637.250.000		637.250.000		637.250.000		637.250.000		637.250.000		3.186.250.000	Biro Kesejahteraan Rakyat (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		95,00%	434.330.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		2.234.330.000	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95,00%	641.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		3.441.000.000	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		95,00%	70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		390.000.000	
4 0 1 7	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan		Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti		90%	2.388.700.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.388.700.000	
4 0 1 8	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		90%	1.213.600.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.213.600.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		yang ditindaklanjuti															
4	019	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti		90%	1.010.500.000	1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000			5.410.500.000	
4	019	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat		90%	3.393.820.000	3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000			17.393.820.000	
4	017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	647.800.000	700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000			3.447.800.000	Biro Perekonomian (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	450.000.000		500.000.000		530.000.000		600.000.000		650.000.000			2.730.000.000	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan		100%	162.500.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000			1.042.500.000	
4 0 1 8	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah		2	423.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000			2.573.000.000	
4 0 1 9	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Tersusunnya Kebijakan Promosi Daerah Sarana dan Prasarana Perekonomian, Peningkatan Investasi Daerah, Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola BUMD		3	644.300.000		670.000.000		700.000.000		720.000.000		750.000.000			3.484.300.000	
4 0 1 0	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa		6 Kebijakan	600.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000			2.980.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 9 9	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa		6	600.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		3.200.000.000		
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100,00 %	1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		5.511.000.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		90,00%	451.300.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.451.300.000		
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90,00%	994.120.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.994.120.000		Biro Adbang (SETDA)
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		80%	1.435.625.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.435.625.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 2 5	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	1.460.065.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.460.065.000	
4 0 1 4 6	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	2.411.300.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		12.511.300.000	
4 0 1 4 7	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Terlaksananya pengendalian kegiatan administrasi pembangunan dalam mencapai efektifitas program pembangunan		90%	3.622.990.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		18.422.990.000	
4 0 1 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi Perkantoran		100,0 %	329.300.000		400.000.000		450.000.000		470.000.000		470.000.000		2.119.300.000	Biro Infrastruktur (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00%	123.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000		170.000.000		763.000.000	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00%	1.019.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		6.019.000.000	
4 0 1 7	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan		90%	718.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		4.068.000.000	
4 0 1 8	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan		100%	612.500.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		3.712.500.000	
4 0 1 9	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya sinergitas dan perumusan kebijakan dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral		90%	501.800.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.901.800.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik		100 Persen	15.218.675.000		15.500.000.000		16.000.000.000		16.000.000.000		16.000.000.000		16.000.000.000		78.718.675.000	SET DPRD
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		80 Persen	5.230.130.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		26.430.130.000	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	26.912.575.000		27.000.000.000		27.000.000.000		27.000.000.000		27.000.000.000		27.000.000.000		134.912.575.000	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dengan baik		80 Persen	969.020.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		4.889.020.000	
4 0 1 5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	31.669.600.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		44.869.600.000	
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		12.046.725.000	Badan Penghubung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.279.425.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.279.425.000		
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	1.071.400.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.871.400.000		
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	44.500.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		274.500.000		
4 0 1 8	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII		24000	601.230.000		640.000.000		640.000.000		650.000.000		660.000.000		3.191.230.000		
4 0 1 9	Program Peningkatan Manajemen Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung		100%	700.500.000		750.000.000		770.000.000		770.000.000		770.000.000		3.760.500.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		100%	277.250.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.477.250.000		Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	560.500.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		2.880.500.000	Kalimantan Timur
4	0	4	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI		95%	1.787.900.000		1.800.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		9.287.900.000	
4	0	2	<b>Pengawasan</b>															
4	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani Administrasi Perkantoran		12 bulan	1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		5.872.000.000	
4	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		45 Buah	402.250.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		2.022.250.000	
4	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		60 Kegiatan	770.300.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		3.890.300.000	Inspektorat
4	0	1	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	152.300.000		153.000.000		153.000.000		153.000.000		153.000.000		764.300.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 2 2 1	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		60 orang	706.500.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		3.538.500.000
4 0 2 8 7	Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas		2 perang kat daerah	5.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		2.610.000.000		22.940.000.000
4 0 2 9 6	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan		0,9	900.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		1.580.000.000
4 0 2 9 7	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja		46 perang kat daerah	2.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		4.200.000.000
4 0 2 9 8	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah		17 laporan	1.963.250.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.963.250.000
4 0 2 9 9	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN		4 kegiatan	2.657.000		2.700.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		13.607.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	03		Perencanaan														
4	037	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100 Persen	10.635.875.000	10.700.000.000		10.700.000.000		10.700.000.000		10.700.000.000		53.435.875.000		Bappeda
4	038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	6.237.450.000	6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		32.237.450.000		
4	039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90 Persen	5.405.300.000	5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		28.205.300.000		
4	0310	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	526.425.000	550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.726.425.000		
4	030	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		90 Persen	4.854.100.000	4.900.000.000		4.900.000.000		4.900.000.000		4.900.000.000		24.454.100.000		

Kode	Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 3 2	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		75 Persen	2.894.26 0.000		2.900.000.0 00		3.000.000.0 00		3.000.000.0 00		3.000.000.0 00		14.794.260. 000	
4 0 3 6	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		90 Persen	2.599.30 0.000		2.700.000.0 00		2.700.000.0 00		2.700.000.0 00		2.700.000.0 00		13.399.300. 000	
4 0 3 7	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		100 Persen	2.100.00 0.000		2.200.000.0 00		2.200.000.0 00		2.200.000.0 00		2.200.000.0 00		10.900.000. 000	
4 0 3 8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100 Persen	8.740.40 0.000		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		28.740.400. 000	

4 0 4	Keuangan															
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	91.287.940.000	Badan Pendapatan Daerah
4 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	41.280.725.000	
4 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	3.181.167.000	100%	3.499.283.700	100%	3.849.212.070	100%	4.234.133.277	100%	4.657.546.605	100%	19.421.342.652		
4 0 4 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	305.100.000	100%	335.610.000	100%	369.171.000	100%	406.088.100	100%	446.696.910	100%	1.862.666.010		
4 0 4 0	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	100%	100%	1.032.000.000	100%	1.135.200.000	100%	1.248.720.000	100%	1.373.592.000	100%	1.510.951.200	100%	6.300.463.200		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 4 3 1	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	100%	3.832.280.000	100%	3.114.408.000	100%	3.425.848.800	100%	3.768.433.680	100%	4.145.277.048	100%	18.286.247.528	
4 0 4 3 2	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%	100%	4.045.400.000	100%	4.151.040.000	100%	4.566.144.000	100%	5.022.758.400	100%	5.525.034.240	100%	23.310.376.640	
4 0 4 3 3	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	19 dokumen	100 Dokumen	517.200.000	100 Dokumen	568.920.000	100 Dokumen	625.812.000	100 Dokumen	688.393.200	100 Dokumen	757.232.520	100 Dokumen	3.157.557.720	
4 0 4 3 4	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	100%	100%	2.441.412.000	100%	2.685.553.200	100%	2.954.108.520	100%	3.249.519.372	100%	3.574.471.309	100%	14.905.064.401	
4 0 4 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	6.370.401.900		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		32.370.401.900	BPKAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.372.298.100		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.372.298.100	
4 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	195.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		995.000.000	
4 0 4 7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas		100%	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		15.000.000.000	
4 0 4 8	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota		Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas		100%	2.287.762.500		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		11.487.762.500	
4 0 4 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	7.134.838.600		7.200.000.000		7.200.000.000		7.200.000.000		7.200.000.000		35.934.838.600	
4 0 5	<b>Kepegawaian</b>																
4 0 5 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran		12 bulan	1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		9.957.985.000	BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 5 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	1.416.699.991		1.252.000.000		1.252.000.000		1.252.000.000		1.252.000.000		6.424.699.991	
4 0 5 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Tercapainya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah		85%	1.301.290.000		1.667.800.000		1.834.580.000		2.018.038.000		2.219.841.800		9.041.549.800	
4 0 5 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	269.911.009		145.600.000		160.160.000		176.176.000		193.793.600		945.640.609	
4 0 5 7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan		97%	8.197.000.000		2.540.750.000		2.794.825.000		3.074.307.500		3.381.738.250		19.988.620.750	
4 0 5 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.374.350.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.374.350.000	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

4	0		Pendidikan dan														
---	---	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	6																
4	0 6	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		27.937.250.000
4	0 6	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	5.324.650.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		14.606.650.000
4	0 6	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah		100%	1.103.130.000		750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		4.583.880.000
4	0 6	1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	410.000.000		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		1.802.300.000
4	0 6	1 5	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Apartaur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan		90%	1.490.220.000		1.628.900.000		1.791.790.000		1.970.969.000		2.168.065.900		9.049.944.900

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 6 6	1 6	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis		90%	6.879.100.000		7.398.520.219		8.138.372.241		8.952.209.465		9.847.430.411		41.215.632.336	
4 0 6 7	1 7	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter		100%	9.205.450.000		8.251.550.000		9.076.705.000		9.984.375.500		10.982.813.050		47.500.893.550	
4 0 6 5	4 5	Program Pendidikan Kedinasan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat		155 Orang	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.453.673.500	BKD
4 0 6 7	4 7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan		70%	6.453.502.000		3.881.000.000		4.269.100.000		4.696.010.000		5.165.611.000		24.465.223.000	
4 0 7 7		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>															
4 0 7 7	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		6.341.850.000	Balitbangda
4 0 7 8	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur		100%	499.350.000		499.350.000		499.350.000		499.350.000		499.350.000		2.496.750.000	

Kode	Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 7 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		12 bulan	741.960.000		750.000.000		760.000.000		760.000.000		760.000.000		3.771.960.000	
4 0 7 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
4 0 7 3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal		80%	741.960.000		741.960.000		741.960.000		741.960.000		741.960.000		3.709.800.000	
4 0 7 1	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
4 0 7 7	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 7 8	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbnag bidang sosial dan pemerintahan		3 Rekom endasi	1.000.00 0.000		1.000.000.0 00		1.000.000.0 00		1.000.000.0 00		1.000.000.0 00		5.000.000.0 00	
	<b>TOTAL</b>				<b>5.653.93 5.180.47 6</b>		<b>5.546.369. 570.760</b>		<b>6.040.107. 106.203</b>		<b>6.394.527. 329.165</b>		<b>6.696.932.3 73.545</b>		<b>55.814.021 .986.647</b>	<b>0</b>



## **BAB 8**

### **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lain adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang diukur dengan indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambar dalam pencapaian indikator-indikator dari impact dan outcome. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Indikator impact dan outcome ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
  - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
  - b. Kesejahteraan sosial
- 2. Aspek Pelayanan Umum**
  - a. Pelayanan Urusan Wajib
  - b. Pelayanan Urusan Pilihan
  - c. Pelayanan urusan penunjang
- 3. Aspek Daya Saing Daerah**
  - a. Kemampuan Ekonomi;
  - b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

### 8.1. Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Indikator	Target Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1.	Indeks Kebahagiaan	73,59	73,60	73,65	73,67	74,00
2.	Indeks Gini	0,328	0,325	0,320	0,310	0,300
3.	Inflasi	3,61±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1
4.	Kinerja pelayanan infrastruktur dasar	65	69	73	77	85
5.	Laju pertumbuhan ekonomi pada kawasan strategis provinsi	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,68	82,70	82,72	82,82	82,85
7.	Nilai PDRB sektor sumber daya alam	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB		
9.	Indeks Persepsi Korupsi	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45

### 8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	1,78	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	
1.2	Inflasi	2,75	3,61±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	
1.3	Kemiskinan	6,19	6,10	6,01	5,98	5,96	5,50	
1.4	PDRB per kapita (000 Rp)	165.714,16	170.800	173.455	175.605	179.330	181.113	
1.5	Angka rata-rata lama sekolah	9,36	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	
1.6	Angka usia harapan hidup	73,70	73,73	73,76	73,80	74,45	75,00	
1.7	Persentase balita gizi buruk							
1.8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,75	64,65	65,23	66,50	67,20	70,00	
1.9	Tingkat pengangguran terbuka	6,91	6,87	6,80	6,75	5,75	5,00	
1.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	53,48%	51,48	54,93	55,99	57,04	57,74	
1.11	Pencapaian skor Ketersediaan Pola Pangan Harapan (PPH)	96	98,2	98,75	99	99,5	100	100
	Pencapaian skor Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH)	85,5	86,7	87,9	89,1	90,3	91,5	91,5
1.12	Kontribusi sektor pertanian	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5	8,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terhadap PDRB							
1.13	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	4,49	4,90	5,45	5,90	6,20	6,70	
1.14	Kontribusi sub sektor perikanan PDRB							
1.15	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,30	5,55	5,80	6,00	6,20	6,50	
1.16	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18,57	19,21	20,22	21,45	23,22	24,10	
1.17	Pertumbuhan Industri	3,47	5,60	5,70	6,20	6,50	7,00	
<b>2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	
2.2	Angka usia harapan hidup	73,70	74,21	74,86	75,90	75,98	76,01	
	Persentase balita gizi buruk							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,75	64,22	64,89	65,12	65,76	66,88	
	Tingkat pengangguran terbuka	6,91	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	
<b>3</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>							
	Jumlah Group Kesenian	861	870	875	880	885	890	
	Jumlah Gedung Kesenian	17	18	18	19	19	20	
	Jumlah Klub Olah Raga	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	
	Jumlah Gedung Olahraga	101	103	104	104	105	106	
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>A</b>	<b>Fokus : Urusan Wajib</b>							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Pelayanan Dasar</b>							
1	Pendidikan							
1.1.	Angka partisipasi kasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,07	108,75	109,50	110,20	110,80	111,5	
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B	91,46	91,88	91,97	92,05	92,83	93,39	
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/Paket C	99,51	100	100,50	101,0	101,5	102	
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.2.1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	10,1	10,00	9,8	9,7	9,6	9,5	
1.2.2	SD/Sederajat	24,11	25,10	25,85	26,10	26,58	26,90	
1.2.3	SLTP/Sederajat	21,81	22,0	22,5	23	23,5	24	
1.2.4	SLTA/SMK/Sederajat	33,29	33,67	33,97	34,19	34,78	34,90	
1.2.5	Diploma/Sarjana	10,77	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	
1.3.	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,43	97,43	97,70	97,80	98,43	99,00	
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,58	79,58	79,67	79,77	80,58	82,58	
1.3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	68,23	68,23	68,23	68,23	68,23	68,23	
1.4	Angka partisipasi sekolah							
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS)	99,67	99,7	99,8	99,9	100	100,1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SD/MI/Paket A							
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98,79	98,87	98,96	99,01	99,24	99,31	
1.4.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	81,32	81,5	81,7	82	82,3	82,5	
1.5	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	
1.5.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1,21	1,20	1,19	1,16	1,15	1,14	
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	18,68	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	
2	Kesehatan							
2.1.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Seha	63	64	65	66	67	70	
2.2.	Persentase Rumah Sehat	60,31	61,29	62,88	63,24	63,87	64,11	
2.3.	Pravelensi penyakit menular							
2.4.	Cakupan temuan dan penanganan kasus TB BTA							
2.5.	Pravelensi penyakit tidak menular degeneratif							
2.6.	Pravelensi penyakit tidak menular non degenerative							
2.7.	Rasio Rumah Sakit Dibanding Jumlah Penduduk							
2.8.	Rasio Perawat per 100.000							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penduduk							
2.9.	Rasio Bidan per 100.000 penduduk							
2.10.	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1.660	1.665	1.670	1.675	1.680	1.685	
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk							
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk							
2.13.	Rasio Analisis Kesehatan per 100.000 penduduk							
2.15.	Persentase penduduk terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional							
2.16.	Persentase penduduk terlayani dalam jaminan kesehatan nasional							
2.17.	Rasio dokter spesialis kandungan per 100.000 penduduk							
2.18.	Rasio dokter spesialis anak per 100.000 penduduk							
2.19.	Persentase Kunjungan K4	85	86	87	88	89	90	
2.20.	Persentase Kunjungan Nifas							
2.21.	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	88	89	90	91	92	93	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.22.	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1-3)	89	90	91	92	93	94	
2.23.	Persentase Desa UCI (Universal Child Immunization)	81	82	83	84	85	86	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	35,69	40,20	43,20	45,50	46,30	47,00	
3.2.	Persentase penduduk berakses air minum	76,86	77,86	79,86	82,86	86,86	90,86	
3.3.	Luas Ruang Terbuka Hijau	102.505	102.505	102.520	102.520	102.530	102.540	
3.4.	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	5.940	1000	1000	1000	1000	1000	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat							
4.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3							
4.2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada							
4.3.	Persentase LSM/Ormas yang aktif dalam pembangunan	36	40	44	48	52	56	
5	Sosial							
5.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	99,60	99,7	99,8	99,9	100	100	
5.2.	Persentase PMKS yang tertangani	31,09	31,55	31,89	32,15	33,21	34,18	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3.	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	15,45	15,75	16,00	16,25	16,55	16,80	
<b>b</b>	<b>Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>							
1	Tenaga Kerja							
1.1.	Jumlah Pengangguran yang Menjadi Wirausaha Baru	270	275	280	285	290	295	
1.2.	Jumlah Orang Terkena PHK	2.264	2.200	2.180	2.160	2.120	2.100	
1.3.	Produktivitas tenaga kerja							
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,82	6,98	7,25	7,43	7,52	7,89	
2.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	42,33	43,14	43,66	43,84	44,03	44,37	
3.	Pangan							
3.1.	Ketersediaan pangan utama	79	80	81	82	83	84	
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	1	1	Digabung dalam Program Tata Lingkungan/ Program Penurunan Emisi GRK				
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	1	1					
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	1	1					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	1	1					
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1	1					
	Indeks Kualitas Air Sungai	74		74,5	75	75,5	76	76
	Peningkatan Indeks Kualitas Udara			89,1 %	89,2	89,3	89,3	89,3
	Persentase jumlah sampah yang tertangani		55 %	56 %	57 %	58 %	58 %	
	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	70,19	71,59	73,02	74,48	74,48
	Laporan Inventarisasi GRK	10 Juta Ton CO2eq	10 Juta Ton CO2eq	Kegiatan sudah digabung dengan Program Penurunan Emisi GRK				
	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	2 Laporan	2 Laporan					
	Jumlah limbah B3 yang dikelola		80 %	-	-	-	-	
	Penetapan hak MHA	5 Desa	5	Kegiatan digabung dengan Program Penataan, Penanganan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup				
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	4	4					
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-					
	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	4	4					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1.	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP	95	96	97	98	99	100	
6.2.	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	26	28	30	32	36	38	
6.3.	Persentase keluarga yang memiliki KK	76	80	85	90	95	100	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,03	26	27	28	29	30	
7.2.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,43	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
8	Perhubungan							
8.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,89	7,24	7,43	7,56	7,68	7,71	
9	Komunikasi dan Informatika							
9.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	74,30	75	75,70	76,4	77,1	77,8	
9.2.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet							
10.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.1.	Persentase koperasi aktif	64,6	66,4	67,4	68,4	69,4	70,4	
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	308.623	308.823	309.023	309.223	309.423	309.623	
11	Penanaman Modal							
11.1.	Jumlah nilai investasi PMDN (Triliun Rp)	10.9	11.4	12.5	13.7	14.55	15	
11.2.	Jumlah nilai investasi PMA(Ribu Us\$)	1.285.215,2	1.346.578	1.422.298	1.503.310	1.580.656	1.590.633	
12	Kepemudaan dan Olahraga							
12.1.	Jumlah organisasi kepemudaan	107	110	115	120	125	130	
12.2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	44	45	46	47	48	
13	Statistik							
13.1.	Persentase kelengkapan data sistem informasi pembangunan daerah							
14.	Kebudayaan							
14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	60	62	64	66	68	70	
15	Perpustakaan							
15.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	109.939	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	
16	Kearsipan							
16.1.	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>c</b>	<b>Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan</b>							
1	Pariwisata							
1.1	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (ribu orang)	7.24	6,065	6,570	7,075	7,580	8,085	8,085
1.2	Kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
2	Pertanian							
2.1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5	8,5
2.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,24 Ton/Ha						
2.3	Produksi daging sapi (ton)	8.241,26	8.480,73	9.500,86	10.259,49	11.152,45	12.176,78	12.176,78
3	Kehutanan							
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	50 Ha	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	5.413.215,49 Ha	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	6 %	≤ 2 %	≤ 1,75 %	≤ 1,5 %	≤ 1,25 %	≤ 1 %	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1.	Persentase desa berakses listrik	11	11	-	-	-	-	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	86,43 %	85,5 %	87,5 %	89,5 %	92 %	95 %	
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin	75	75	100	-	-	-	
5.	Perdagangan							
5.1.	Nilai Ekspor	17.480.900	17.970.654	18.236.473	18.408.674	18.693.482	18.956.036	
5.2	Nilai Impor	3.230.970	3.230.960	3.229.641	3.227.521	3.225.421	3.222.631	
5.3	Neraca Perdagangan Luar Negeri	14.249.930	14.476.095	14.633.954	14.857.034	15.238.568	15.405.457	
	Disparitas Harga antar wilayah	16,8	16,8	16,5	16	15,5	15	15
	Jumlah Kerjasama Perdagangan Yg di tindak lanjuti	1	3	5	5	6	8	8
	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	15 (kasus pengaduan konsumen)	25	30	40	50	60	
6	Perindustrian							
6.1.	Kontribusi subsector Industri Pengolahan non migas terhadap PDRB							
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1.	Produksi perikanan tangkap	159.345	118.580	121.188	123.854	126.322	128.858	618.312
7.2.	Produksi perikanan budidaya/darat	239.710	122.780	125.850	128.995	132.220	135.525	645.370

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.3	Nilai tukar nelayan	101,37						
7.4	Cakupan bina kelompok nelayan							
<b>d</b>	<b>Fokus : Urusan Penunjang</b>							
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>							
1.1.	Persentase perusahaan yang telah menyalurkan CSR tepat sasaran							
1.2.	Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan							
1.3.	Persentase keterpaduan RKPD terhadap RPJMD							
1.4.	Persentase keterpaduan APBD terhadap RKPD							
1.5.	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan							
1.6.	Persentase ketercapaian indikator RPJMD							
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>							
2.1.	Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu							
2.2.	Persentase belanja modal dalam							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	APBD							
2.3.	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	22,75	8,45	13,89	12,18	10,57	8,95	
2.4.	Persentase peningkatan realisasi retribusi daerah							
2.5.	Persentase aset daerah yang dilegalisasi							
2.6.	Persentase aset daerah yang dimanfaatkan							
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1.	Persentase pejabat struktural yang telah diklat PIM sesuai syarat jabatan							
3.2.	Persentase aparatur yang telah lulus diklat fungsional							
3.3.	Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis sesuai kebutuhan							
3.4.	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi							
3.5.	Persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu							
4	Penelitian dan Pengembangan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	Persentase hasil kajian pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti							
4.2.	Persentase hasil kajian pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti							
4.3.	Persentase hasil kajian prasarana wilayah dan SDA yang ditindaklanjuti							
4.4.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							
4.5.	Persentase aparatur yang pindah/purna tugas PNS tepat waktu							
4.6.	Persentase aparatur yang terpenuhi kebutuhan diklat							
5	Pengawasan							
5.2.	Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP BB/A							
5.3.	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SPIP							
5.4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ditindaklanjuti							
5.5.	Persentase pemenuhan kebutuhan auditor sesuai obyek pemeriksaan							
5.6.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti							
5.7.	Persentase penurunan kasus pengaduan gratifikasi							
5.8.	Persentase realisasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi							
5.9.	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur							
6	Umum/Sekretariat							
6.1.	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB							
6.2.	Persentase target IKK pada komponen perumusan kebijakan yang terpenuhi							
6.3.	Persentase target IKK pada komponen pelaksanaan kebijakan yang terpenuhi							
6.4.	Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu							
6.5.	Persentase kelengkapan bahan-							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bahan penyusunan Raperda							
6.6.	Persentase perda yang terpublikasi							
6.7.	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	92	92,50	93,00	93,50	94,50	95,00	
6.8.	Persentase batas wilayah yang ditetapkan							
6.9.	Persentase OPD yang telah memiliki dan menjalankan standar pelayanan public							
6.10.	Persentase proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu							
6.11.	Persentase tertib pengelolaan barang/aset daerah di lingkungan setda							
6.12.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang sinkron dengan provinsi	60	70	80	90	100	100	
6.13.	Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja dan keuangan tepat waktu							

## BAB IX

### Penutup

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kalimantan Timur lima tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur Yang Berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi gubernur serta wakil gubernur **“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”** yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan dengan pendekatan Teknokratis, Top Down, Bottom Up dan Politis.

Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pada tahapan meso makro selanjutnya tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Guna memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

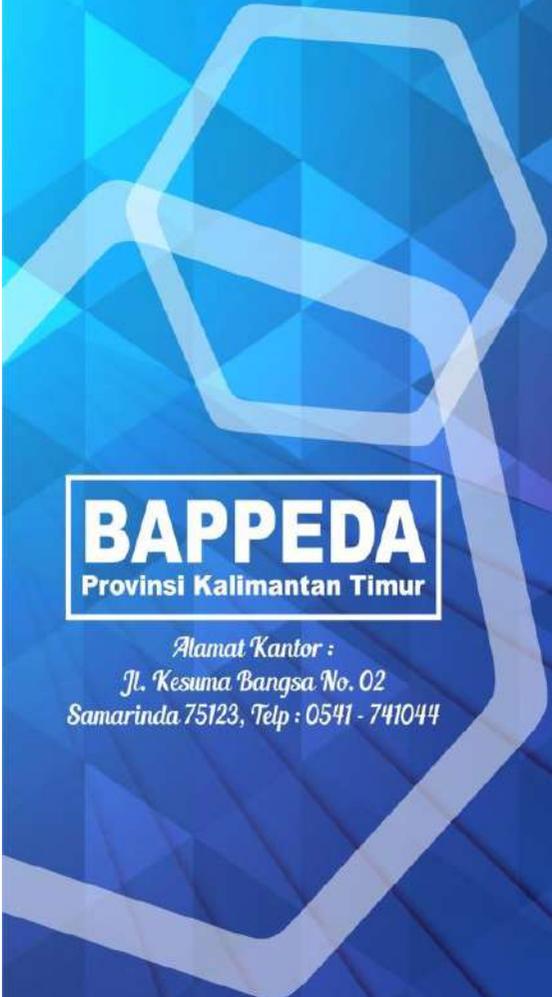
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efesieinsi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2019;
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
4. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 tiap tahunnya;

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020;

**Samarinda, 10 November 2018**

**GUBENUR KALIMANTAN TIMUR**

**DR. Ir. H. Isran Noor, M.Si**



**BAPPEDA**  
Provinsi Kalimantan Timur

*Alamat Kantor :*  
*Jl. Kesuma Bangsa No. 02*  
*Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044*